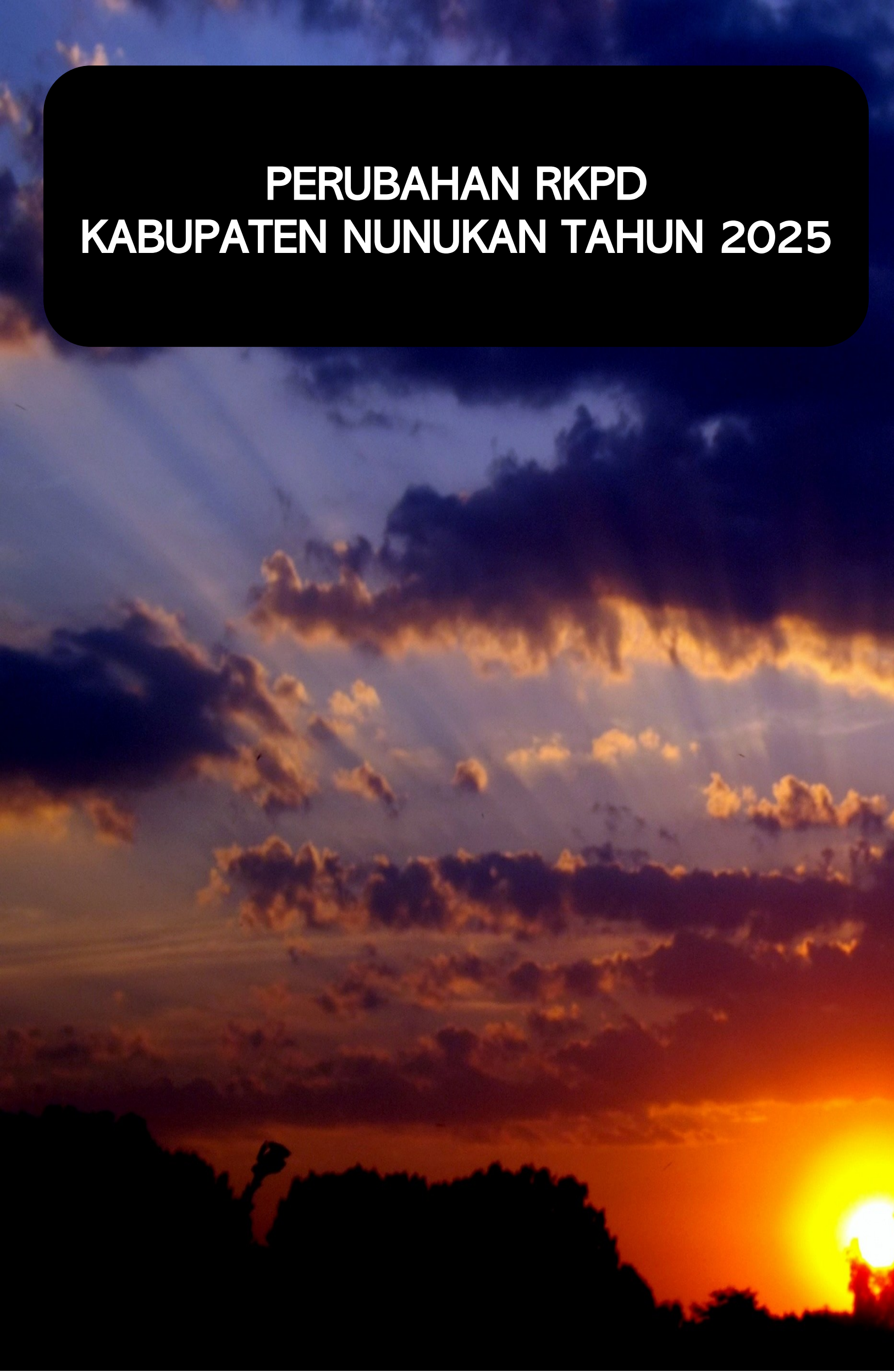


PERUBAHAN RKPD KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025





SALINAN

BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan/kondisi;
 - b. bahwa ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dimaksud dengan huruf a meliputi perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah dan perubahan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana perubahan Renja Perangkat Daerah dan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan:

- a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- b. pedoman penyusunan KUPA serta perubahan PPAS Tahun 2025.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika terdiri atas:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan I (satu) Tahun 2025;
- BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
- BAB VI : Penutup.

- (2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 20 Juni 2025

BUPATI NUNUKAN,

ttd

IRWAN SABRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 20 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

JABBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 NOMOR 19



KATA PENGANTAR

Puji Syukur di ucapkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan hidayah dan kesempatan hingga selesainya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

Dasar acuan penyusunan P-RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Cakupan P-RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini meliputi analisis ekonomi dan keuangan daerah khususnya kondisi riil semester I, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 triwulan I, penelaahan terhadap kondisi riil kebijakan Pemerintah Pusat tahun 2025 dan kondisi riil kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025, perumusan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nunukan dan perumusan perubahan program dan perubahan kegiatan beserta perubahan pagu indikatif.

P-RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini merupakan transisi awal implementasi RPJMD kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Diharapkan bulan Juli 2025 yang merupakan awal triwulan III menjadi awal pelaksanaan APBD-P Tahun 2025.

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam membantu penyusunan P-RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 disampaikan terima kasih.

Akhir kata semoga segala upaya kita bersama dalam membangun Kabupaten Nunukan senantiasa memperoleh petunjuk dan ridho dari Allah Swt.

Nunukan, 20 Juni 2025

BUPATI

IRWAN SABRI

DAFTAR ISI

	Halaman
PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR XX TAHUN 2025	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I 1
1.1 Latar Belakang	I 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I 3
1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan	I 7
1.3.1 Maksud	I 7
1.3.2 Tujuan	I 7
1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan	I 8
1.4 Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025	I 8
BAB II EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 TRIWULAN I	II 1
2.1 Metode Analisis Evaluasi RKPD Tahun 2025	II 1
2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Pelaksanaan Urusan Pemerintah	II 2
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III 1
3.1.1 Kondisi Umum Perekonomian Daerah Tahun 2024	III 8
3.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025	III 9
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025	III 11
3.2.1 Proyeksi Keuangan dan Kerangka Pendanaan	III 11
3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah	III 12
3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah	III 13
3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah	III 15
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025	IV 1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025	IV 15
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V 1
BAB VI PENUTUP	VI 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah terlaksananya Pemilihan Kepala daerah serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih maka dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih maka perlu penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 yang didahului dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

P-RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 yang paling mendasar adalah penyesuaian atas arah kebijakan pembangunan daerah yang mengakomodir visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, visi, misi dan program Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Utara terpilih serta program Asta Cita.

Regulasi paling umum tentang perubahan RKPD adalah Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa P-RKPD dapat dilakukan bila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan yang meliputi target pendapatan dan belanja pembangunan;
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

4. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Nunukan melaksanakan P-RKPD 2025, dilatar belakangi atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terbaru serta hal – hal fundamental sebagai berikut:

1. Memenuhi amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Penyesuaian atas periodisasi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;

Selain hal diatas, perubahan RKPD 2025 juga mempertimbangkan hasil evaluasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Triwulan ke-I, kewajaran dan kelayakan penganggaran, dan waktu pelaksanaan sub kegiatan pada semua Perangkat Daerah.

Sebagai sebuah produk hukum daerah, P-RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025, disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratif, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada kondisi terkini, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar wilayah, antar ruang, antar waktu dan antar urusan pemerintah daerah. Selain itu juga mengutamakan sinergi dengan Pemutakhiran

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan P-RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

Penyusunan P-RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 345 yang terdiri atas :

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
- c. Penetapan.

Selanjutnya P-RKPD menjadi dasar Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Semester II tahun anggaran 2025 oleh masing-masing PD Kabupaten Nunukan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan.

Dasar hukum penyusunan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan

- Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017–2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);
 25. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

26. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
27. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

1.

1.3.1. Maksud

P-RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini memuat dasar pertimbangan utama yaitu capaian program dan kegiatan dari hasil evaluasi Program dan Kegiatan tahun 2025 triwulan I dan pertimbangan-pertimbangan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada Semester II tahun 2025.

2.

P-RKPD ini disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan daerah yang dinamis dalam menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, dengan tetap mengintegrasikan program-program pembangunan daerah tahun transisi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan P-RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah dengan melihat sumber daya yang ada;
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk mengatasi permasalahan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nunukan Tahun 2025;

3. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) dalam rangka penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-RAPBD) Tahun 2025.
4. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (P-Renja-OPD) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Pemerintah Daerah (P-RKA OPD) Tahun 2025.

1.3.3. Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan teknis P-RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan daerah;
2. Adanya penguatan atas prioritas dan sasaran pembangunan daerah melalui rencana program dan kegiatan PD.
2. Belum optimalnya capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dikarenakan kebijakan pergeseran pendanaan.
3. Kegiatan dan sub kegiatan baru yang harus ditampung dalam P-RKPD Tahun 2025 sebagai upaya untuk mengakomodir penguatan atas prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025

P-RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 disajikan dengan Sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025 Kabupaten Nunukan Triwulan I;
- BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah Perubahan;
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan;
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan;
- BAB VI : Penutup.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025

TRIWULAN I

2.1 Metode Analisis Evaluasi

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 triwulan I dilakukan melalui analisa capaian program, kegiatan dan sub kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan menghitung capaian indikator program dan kegiatan yaitu membandingkan capaian program dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk mempermudah penilaian terhadap capaian program dan kegiatan dari sisi kinerja dan penyerapan anggaran triwulan I Tahun 2025, digunakan interpretasi sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

Evaluasi kinerja program dan kegiatan merupakan proses menentukan nilai suatu program, kegiatan atau kebijakan. Sebuah penilaian yang se-obyektif dan se-sistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau yang telah selesai dilaksanakan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan laporan realisasi rata-rata capaian kinerja program, realisasi rata-rata capaian kinerja keuangan pada aplikasi e-monev yang dikelola bersama oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Triwulan I tahun 2025 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Rata-rata Capaian Kinerja Program dan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Triwulan I

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DINAS PENDIDIKAN	6	16	92	2.08	SR	2.52	SR
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8	28	87	1.164	SR	3.353	SR
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	16	49	2.5	SR	0.945	SR
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	8	15	29	0.521	SR	5.589	SR
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2	13	33	10.642	SR	1.991	SR
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	10	30	11.016	SR	5.573	SR
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	10	44	10.321	SR	2.338	SR
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13	25	54	0.066	SR	6.31	SR
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	19	32	11.665	SR	13.858	SR
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	18	39	51.439	R	2.345	SR
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	14	29	4.171	SR	1.977	SR
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5	10	38	1.429	SR	6.807	SR
13	DINAS PERHUBUNGAN	3	16	38	3.611	SR	5.22	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	5	10	36	18.744	SR	4.216	SR
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15	23	41	8.345	SR	0.818	SR
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	6	13	19	7.977	SR	0.801	SR
17	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	12	24	45	9.377	SR	11.172	SR
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6	14	32	2.639	SR	1.558	SR
19	DINAS PERIKANAN	5	15	35	10.74	SR	5.966	SR
20	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	6	13	21	18.382	SR	2.03	SR
21	SEKRETARIAT DAERAH	11	22	64	36.72527	SR	7.91	SR
22	SEKRETARIAT DPRD	2	14	30	13.061	SR	5.114	SR
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4	16	54	19.48	SR	3.00	SR
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	11	46	17.984	SR	10.21	SR
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3	7	27	13.165	SR	7.175	SR
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	11	27	6.946	SR	5.448	SR
27	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	2	8	23	1.79	SR	2.95	SR
28	INSPEKTUR DAERAH	3	9	22	15.239	SR	9.517	SR
29	KEC. NUNUKAN	6	14	28	5.685	SR	2.92	SR
30	KEC. NUNUKAN SELATAN	5	12	25	18.363	SR	6.337	SR
31	KEC. SEBATIK	6	15	33	18.091	SR	6.811	SR
32	KEC. SEBATIK BARAT	6	14	29	7.009	SR	0.661	SR
33	KEC. SEBATIK TIMUR	6	12	24	1.496	SR	0.599	SR
34	KEC. SEBATIK UTARA	5	14	30	40.96	SR	2.023	SR
35	KEC. SEBATIK TENGAH	6	13	23	6.134	SR	3.774	SR
36	KEC. SEIMANGGARIS	4	9	20	33.968	SR	1.006	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	KEC. SEBUKU	6	13	22	1.218	SR	0.786	SR
38	KEC. TULIN ONSOI	6	12	20	10.71	SR	4.18	SR
39	KEC. SEMBAKUNG	6	11	24	18.687	SR	0.391	SR
40	KEC. SEMBAKUNG ATULAI	4	12	22	12.308	SR	0.875	SR
41	KEC. LUMBIS	4	11	32	10.903	SR	7.076	SR
42	KEC. LUMBIS OGONG	4	8	13	31.25	SR	2.762	SR
43	KEC. KRAYAN	6	12	27	1.06	SR	0.567	SR
44	KEC. KRAYAN SELATAN							
45	KEC. KRAYAN BARAT	6	12	22	2.564	SR	0.75	SR
46	KEC. KRAYAN TIMUR	6	11	20	3.333	SR	0.853	SR
47	KEC. KRAYAN TENGAH	4	9	17	2.841	SR	1.248	SR
48	KEC. LUMBIS HULU	4	9	16	1.511	SR	0.646	SR
49	KEC. LUMBIS PANSIANGAN	5	13	24	25.934	SR	6.641	SR
50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	10	21	4.103	SR	2.059	SR
	RATA-RATA KESELURUHAN	280	666	1608	11.62	SR	3.87	SR

Capaian atas kinerja dan keuangan atas masing-masing program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tersaji pada tabel 2.3 Berikut:

Tabel 2.3.

Rata-rata Capaian Kinerja Program dan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Triwulan I

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN	2.08	SR	2.52	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.61	SR	0.78	SR
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0.00	SR	0.00	SR
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0.00	SR	0.00	SR
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	0.00	SR	0.00	SR
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0.00	SR	0.00	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.61	SR	14.36	SR
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.164	SR	3.353	SR
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	9.314	SR	22.099	SR
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0.00	SR	0.00	SR
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0.00	SR	0.00	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0.00	SR	0.00	SR
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0.00	SR	0.00	SR
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0.00	SR	0.00	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0.00	SR	0.00	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5	SR	4.727	SR
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.5	SR	0.945	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.37	SR	7.557	SR
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	0.521	SR	5.589	SR
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0	SR	4.923	SR
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0	SR	0	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	0	SR	6.686	SR
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0	SR	20.438	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0	SR	7.239	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.663	SR	5.424	SR
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	10.642	SR	1.991	SR
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.601	SR	0.378	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.54	S	3.604	SR
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.016	SR	5.573	SR
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.964	SR	1.082	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.297	SR	10.065	SR
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.321	SR	2.338	SR
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	8.8	SR	0.231	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.842	SR	4.445	SR
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0.066	SR	6.31	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0	SR	2.563	SR
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	0	SR	4.448	SR
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	0	SR	4.393	SR
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0	SR	0.315	SR
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0	SR	24.868	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0	SR	2.264	SR
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0	SR	33.935	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0	SR	0	SR
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0.855	SR	9.241	SR
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	11.665	SR	13.858	SR
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0	SR	6.99	SR
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	30	SR	8.565	SR
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0	SR	71.179	S
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0	SR	7.984	SR
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	SR	2.782	SR
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.955	SR	1.123	SR
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	22.222	SR	6.204	SR
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	34.783	SR	14.274	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.687	SR	19.479	SR
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	51.439	R	2.345	SR
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	0	SR	2.693	SR
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	493.5	UNK	1.988	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	31.25	SR	8.896	SR
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	5.556	SR	0	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.677	SR	4.479	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.846	SR	7.733	SR
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.171	SR	1.977	SR
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	7.937	SR	3.604	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	0	SR	0.908	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.988	SR	5.372	SR
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1.429	SR	6.807	SR
	PROGRAM PENATAAN DESA	0	SR	3.102	SR
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	0	SR	5.487	SR
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	0	SR	3.62	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0	SR	9.126	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.095	SR	12.701	SR
13	DINAS PERHUBUNGAN	3.611	SR	5.22	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0	SR	0.636	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0	SR	5.586	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.846	SR	9.439	SR
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	18.744	SR	4.216	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	19.286	SR	1.748	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	12.308	SR	11.645	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	24.138	SR	0	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	20	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.991	SR	7.686	SR
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.345	SR	0.818	SR
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	9.5	SR	0	SR
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	50	SR	7.995	SR
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	24	SR	0	SR
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0	SR	0	SR
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	7.053	SR	0	SR
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0	SR	0	SR
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.615	SR	4.272	SR
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	7.977	SR	0.801	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0	SR	0	SR
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0	SR	0	SR
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	25.132	SR	0	SR
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.727	SR	4.806	SR
17	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	9.377	SR	11.172	SR
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	12.5	SR	17.5	SR
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	0	SR	3.5	SR
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0	SR	14.463	SR
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	0	SR	17.582	SR
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0	SR	26.637	SR
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0	SR	10.953	SR
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	14.286	SR	5.343	SR
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0	SR	9.83	SR
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	33.333	SR	19.826	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.406	R	8.427	SR
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.639	SR	1.558	SR
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.667	SR	0.953	SR
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0	SR	0	SR
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	0	SR	1.338	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.417	SR	7.058	SR
19	DINAS PERIKANAN	10.74	SR	5.966	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0.693	SR	0.102	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.222	SR	22.937	SR
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	20	SR	0	SR
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0	SR	0.503	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.782	SR	6.288	SR
20	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	18.382	SR	2.03	SR
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0	SR	0.506	SR
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	41.128	SR	1.443	SR
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	30	SR	0.77	SR
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0	SR	3.168	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.167	SR	6.296	SR
21	SEKRETARIAT DAERAH	36.7253	SR	7.91	SR
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.714	SR	2.17	SR
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	26.166	SR	1.69	SR
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	26.098	SR	8.69	SR
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	79.333	T	5.30	SR
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	20.238	SR	9.65	SR
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0	SR	6.01	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50	SR	3.48	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.719	SR	13.57	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.36	SR	4.94	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.183	SR	5.25	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	94.167	ST	26.26	SR
22	SEKRETARIAT DPRD	13.061	SR	5.114	SR
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.143	SR	9.888	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.978	SR	0.339	SR
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	19.48	SR	3.00	SR
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	58.33	R	7.10	SR
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.72	SR	1.20	SR
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0.00	SR	0.40	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.87	SR	3.30	SR
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17.984	SR	10.21	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	15.189	SR	5.065	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7.692	SR	9.113	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.071	SR	16.454	SR
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	13.165	SR	7.175	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	SR	9.487	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.396	SR	6.86	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.101	SR	5.178	SR
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.946	SR	5.448	SR
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	15.393	SR	1.612	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	SR	3.552	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.795	SR	11.181	SR
27	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	1.79	SR	2.95	SR
	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.714	SR	5.151	SR
28	INSPEKTUR DAERAH	15.239	SR	9.517	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.612	SR	8.399	SR
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	20.907	SR	15.206	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.68	SR	4.946	SR
29	KEC. NUNUKAN	5.685	SR	2.92	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.25	SR	6.179	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.667	SR	4.024	SR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.19	SR	7.315	SR
30	KEC. NUNUKAN SELATAN	18.363	SR	6.337	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	62.5	R	16.35	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.625	SR	8.442	SR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.69	SR	6.894	SR
31	KEC. SEBATIK	18.091	SR	6.811	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.429	SR	2.702	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50	SR	25.873	SR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25	SR	2.573	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.118	SR	9.715	SR
32	KEC. SEBATIK BARAT	7.009	SR	0.661	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.053	SR	3.968	SR
33	KEC. SEBATIK TIMUR	1.496	SR	0.599	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.974	SR	3.592	SR
34	KEC. SEBATIK UTARA	40.96	SR	2.023	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50	SR	0	SR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50	SR	0	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	40	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.801	SR	10.114	SR
35	KEC. SEBATIK TENGAH	6.134	SR	3.774	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25	SR	16.686	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.803	SR	5.958	SR
36	KEC. SEIMANGGARIS	33.968	SR	1.006	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.667	SR	0	SR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.206	SR	4.022	SR
37	KEC. SEBUKU	1.218	SR	0.786	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.308	SR	4.717	SR
38	KEC. TULIN ONSOI	10.71	SR	4.18	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.33	SR	7.05	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0.00	SR	0.00	SR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.00	SR	4.70	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0.00	SR	3.33	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0.00	SR	0.00	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.95	SR	10.02	SR
39	KEC. SEMBAKUNG	18.687	SR	0.391	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.5	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25	SR	0	SR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25	SR	0	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.667	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.953	SR	2.348	SR
40	KEC. SEMBAKUNG ATULAI	12.308	SR	0.875	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.667	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.564	SR	3.499	SR
41	KEC. LUMBIS	10.903	SR	7.076	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20	SR	20	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.611	SR	8.303	SR
42	KEC. LUMBIS OGONG	31.25	SR	2.762	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25	SR	11.048	SR
43	KEC. KRAYAN	1.06	SR	0.567	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.358	SR	3.403	SR
44	KEC. KRAYAN SELATAN	29.865	SR	0.442	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.333	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	SR	0	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.992	SR	2.208	SR
45	KEC. KRAYAN BARAT	2.564	SR	0.75	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	SR	0	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.385	SR	4.499	SR
46	KEC. KRAYAN TIMUR	3.333	SR	0.853	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20	SR	5.118	SR
47	KEC. KRAYAN TENGAH	2.841	SR	1.248	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.364	SR	4.992	SR
48	KEC. LUMBIS HULU	1.511	SR	0.646	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.044	SR	2.582	SR
49	KEC. LUMBIS PANSIANGAN	25.934	SR	6.641	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	108.333	UNK	24.276	SR

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA PROGRAM		CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.336	SR	8.926	SR
50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.103	SR	2.059	SR
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0	SR	5.76	SR
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0	SR	0.67	SR
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0	SR	0	SR
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0	SR	0.822	SR
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0	SR	0	SR
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.615	SR	5.099	SR

Dari 50 OPD Pada Triwulan Ke-I hanya 49 OPD yang menyampaikan progres pelaksanaan, sedangkan 1 OPD yaitu Kecamatan Krayan selatan Tidak/belum melakukan penginputan laporan.

Rata-rata Capaian Kinerja OPD yang mencapai predikat Sangat Rendah (SR) sebanyak 48 OPD dan Rendah (R) sebanyak 1 OPD.

Rata-rata Capaian Anggaran OPD yang mencapai predikat Sangat Rendah (SR) sebanyak 49 OPD.

Dengan Rata-rata capaian Anggaran Pada Triwulan ke I adalah 3,87 Persen atau dengan predikat Rendah (SR). Total Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I seluruh PD dari sipd adalah Rp. 199.988.445.009,-

Capaian umum tersebut tergolong wajar mengingat triwulan I APBD merupakan penyesuaian awal dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBD Tahun 2025.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Bab ini membahas kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, dan sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Nunukan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2025 ini mengacu pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029, dan diselaraskan dengan arahan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, serta arah kebijakan ekonomi provinsi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

3.1.1. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia

Kondisi dan arah kebijakan ekonomi makro Indonesia yang tertuang dalam RKP Tahun 2025 bersumber dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 Pemutakhiran.

3.1.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang berkontraksi sebesar 1,23 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,52 persen; diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 9,84 persen; Jasa Perusahaan sebesar 9,27 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,01 persen. Sementara itu, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,55 persen dan 5,03 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 19,25 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,22 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,66 persen; Konstruksi sebesar 9,84 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,99 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,96 persen.

Sedangkan jika dilihat dari PDB menurut pengeluaran Ekonomi Indonesia Triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen PK-P yang berkontraksi sebesar 1,38 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,78 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,89 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,07 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,12 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut Pengeluaran) juga tumbuh sebesar 3,96 persen.

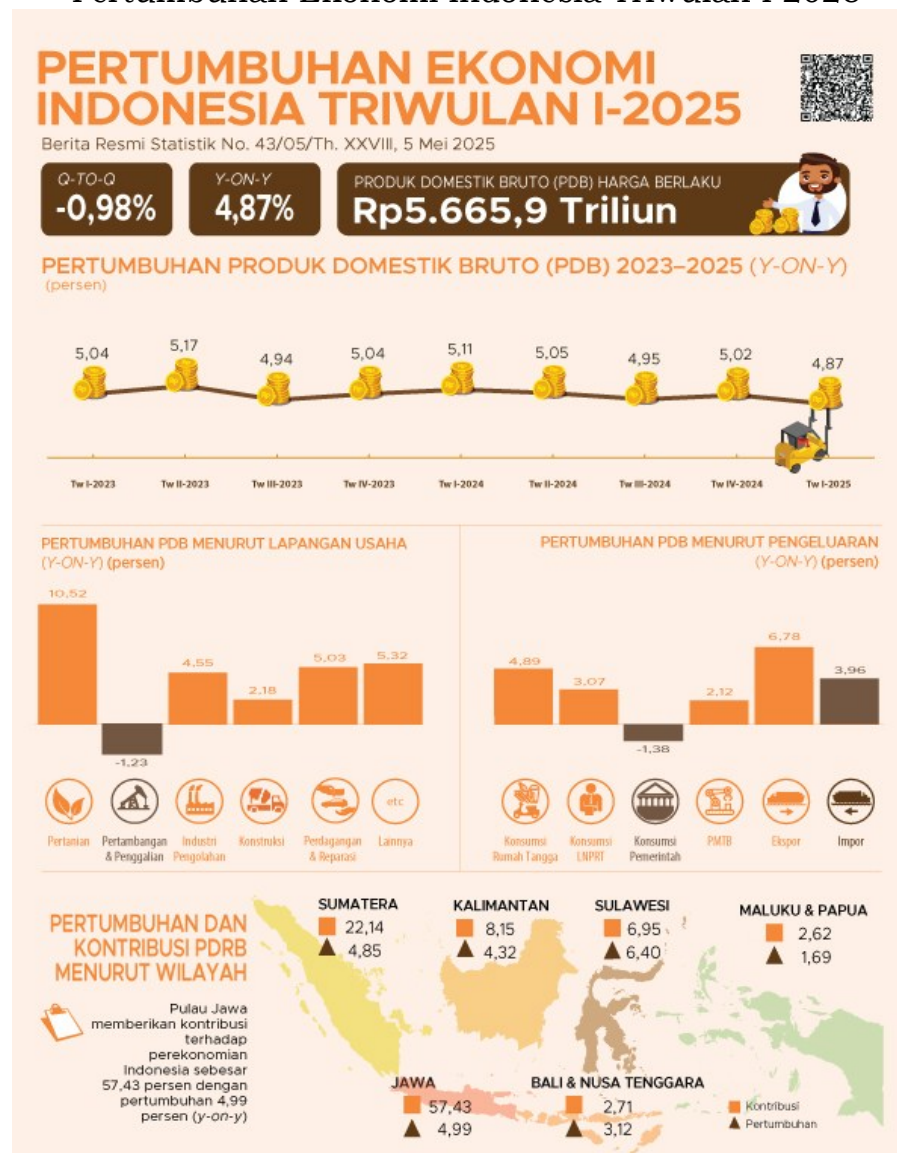
Struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama Triwulan I tahun 2025 menurut kelompok pulau masih disumbangkan oleh Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57,43 persen; diikuti Pulau Sumatera 22,14 persen; Pulau Kalimantan 8,49 persen; Pulau Sulawesi 6,95 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara 2,71 persen; serta Pulau Maluku dan Papua 2,62 persen.

Pada triwulan I-2025, pertumbuhan ekonomi secara spasial di beberapa kelompok provinsi tercatat mengalami penguatan. Kelompok provinsi yang mencatat penguatan pertumbuhan (y-on-y) adalah Pulau Sulawesi yang tumbuh sebesar 6,40 persen, tertinggi di Indonesia; diikuti oleh Pulau Jawa sebesar 4,99 persen; dan Pulau Sumatera sebesar 4,85 persen.

Sementara itu, kelompok provinsi di Pulau Kalimantan mencatat pertumbuhan sebesar 4,32 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,12 persen; serta kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 1,69 persen.

Secara lengkap disajikan pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2025, Pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha dan Pertumbuhan PDB menurut pengeluaran, serta Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Pulau, pada gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I 2025



Sumber Data : Berita Resmi Statistik RI, 2025.

Situasi ekonomi global 2024 – 2025 masih menghadapi tantangan, dengan kinerja perekonomian yang bervariasi antarnegara serta ketidakpastian yang meningkat di awal 2025. Ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat seiring dengan pergantian kepemimpinan di banyak negara yang memicu perubahan kebijakan, terutama terkait kebijakan tarif. Kondisi pemburukan perang dagang dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun 2025.

Bagi Indonesia, transisi dampak terjadi melalui dua jalur utama, yaitu jalur perdagangan dan jalur arus modal. Dari jalur perdagangan, tarif AS berpotensi menurunkan ekspor Indonesia langsung ke AS maupun secara tidak langsung melalui penurunan permintaan negara-negara mitra dagang Indonesia (khususnya Tiongkok dan negara tujuan ekspor Indonesia) yang selanjutnya memicu penurunan harga komoditas global. Hal ini berisiko menekan pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada gilirannya berdampak pada penerimaan negara, kemampuan negara melakukan belanja, serta peningkatan beban utang.

3.1.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia

Pada peringatan 100 tahun kemerdekaan bangsa, Indonesia bertekad mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu *"Menjadi Negara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"*. Dalam rangka untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 tersebut ditempuh antara lain melalui:

1. Penguatan kualitas sumber daya manusia agar produktif, inovatif dan berdaya saing;
2. Penguatan hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan transformasi ekonomi hijau;
3. Penguatan inklusivitas untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan;
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi;
5. Penguatan birokrasi dan regulasi;
6. Penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas;
7. Penguatan pertahanan dan keamanan serta memperkuat kemandirian melalui ketahanan pangan, energi; dan
8. Penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Kemudian Pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2025, yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dapat dilakukan baik melalui kebijakan ekonomi maupun kebijakan fiskal.

Pada tahun 2025, secara umum arah kebijakan ekonomi ditujukan untuk mencapai tiga goals jangka pendek yakni (a) akselerasi pertumbuhan ekonomi; (b) penguatan *well-being*; dan (c) percepatan konvergensi antardaerah.

a. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan investasi, baik yang bersumber dari investasi domestik maupun *Foreign Direct Investment* (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA).
- 2) Penguatan kualitas tenaga kerja.
- 3) Peningkatan produktivitas, melalui: (i) hilirisasi sumber daya alam; (ii) revitalisasi industri manufaktur, termasuk industri halal; (iii) reformasi sektor pertanian; (iv) transformasi ekonomi hijau; (v) pengembangan dan pendalaman sektor keuangan; (vi) dan dukungan terhadap UMKM dan kolaborasi dengan perusahaan besar untuk memperluas basis ekonomi.

b. Penguatan Well-Being

Penguatan *well-being* ditempuh melalui penguatan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

c. Percepatan Konvergensi Antardaerah

Penguatan pemerataan pendapatan antardaerah dapat ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan ekonomi pedesaan dan pesisir untuk mewujudkan petani makmur, nelayan sejahtera, dan peningkatan desa mandiri.
- 2) Penguatan ekosistem pembangunan daerah dan kapasitas pemerintah.
- 3) Merancang kebijakan dan strategi pembangunan wilayah, dengan memperhatikan karakteristik unik dari setiap wilayah.

Selanjutnya, secara kewilayahan arah kebijakan dan indikasi intervensi Pemerintah Pusat untuk wilayah Kalimantan Utara pada RKP 2025 berdasarkan 8 Prioritas Nasional. Berikut disajikan arah kebijakan ekonomi berdasarkan Prioritas Nasional:

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	▪ Penyediaan sarana penangkapan ikan ▪ Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut ▪ Penyiapan bantuan sarana pengolahan hasil kelautan dan perikanan ▪ Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpadu di Kabupaten Nunukan ▪ Penguatan sarana dan prasarana pertanian ▪ Pengembangan komoditas perkebunan dan hortikultura ▪ Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	▪ Preservasi jalan ruas Sekatak Buji-Malinau; ▪ Preservasi Jalan Lingkar Pulau Sebatik ▪ Penguatan dan perluasan infrastruktur TIK ▪ Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	▪ Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki) ▪ Peningkatan adopsi teknologi, riset, inovasi di industri nikel, tembaga, dan bauksit
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	▪ Pembangunan Jalan Akses Perbatasan Malinau-Long Semamu ▪ Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan ▪ Pembangunan kawasan perbatasan di pusat kegiatan strategis nasional dan kecamatan perbatasan prioritas di Provinsi Kalimantan Utara

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
	▪ Pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat subjek reforma agraria ▪ Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat ▪ KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako ▪ Bantuan PSU bidang perumahan ▪ Bantuan pembangunan rumah swadaya

Sumber: *Perpres 109 Tahun 2024*

3.1.2. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Utara

Arah kebijakan ekonomi Kalimantan Utara diekstraksi dari RKPD 2025, yang merupakan perencanaan tahun ke-1 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

3.1.2.1. Kondisi Perekonomian Kalimantan Utara

Kondisi ekonomi Kalimantan Utara triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,06 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang berkontraksi sebesar 0,06 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,89 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 10,63 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,34 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 0,53 persen dan 9,08 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Kalimantan Utara masih didominasi oleh Lapangan Pertambangan dan Penggalian sebesar 28,67 persen; diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,94 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,56 persen; Konstruksi sebesar 12,03 persen; serta Industri

Pengolahan sebesar 8,69 persen. Peran kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Utara mencapai 77,89 persen.

Dari sisi PDRB Pengeluaran pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh komponen pengeluaran kecuali komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,77 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,81 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,54 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 2,88 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 1,76 persen.

Namun demikian pertumbuhan perekonomian Kalimantan Utara lebih tinggi tertahan oleh melambatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan serta industri pengolahan. Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan demand global terhadap komoditas perikanan, serta sejalan dengan tren normalisasi *demand* pada awal tahun. Dari sisi permintaan, kinerja perekonomian yang tetap bertumbuh positif terutama didukung oleh ekspor seiring dengan masih terjaganya kebutuhan ekspor batubara antar daerah dalam negeri terutama untuk keperluan industri seperti pembangkit listrik, industri semen serta smelter mineral. Di sisi lain, kinerja pertumbuhan perekonomian Kaltara yang dapat tumbuh lebih tinggi tertahan oleh melambatnya kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meskipun masih tetap tinggi dibandingkan tren historisnya sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan sejumlah proyek strategis di Kaltara.

3.1.2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Utara

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 yaitu ***“Pemantapan Industri dan Perdagangan Komoditas Daerah”***.

Untuk mendukung agenda pembangunan tersebut, fokus pembangunan ekonomi Kalimantan Utara tahun 2025 ditujukan untuk

mengembangkan Produk Unggulan, Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Pariwisata. Adapun arah kebijakan ekonomi kalimantan utara sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Produktivitas dan Produksi Peternakan, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 2) Meningkatkan Pengamanan Sumberdaya Perikanan
- 3) Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
- 4) Mewujudkan SDM Kelembagaan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif yang Unggul dan berdaya Saing
- 5) Mengembangkan Destinasi Wisata dan Produk Ekonomi Kreatif yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing
- 6) Meningkatkan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Kemitraan dan Teknologi Digital
- 7) Mengembangkan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata
- 8) Meningkatkan Fasilitas Kemitraan, Jaringan Pemasaran

3.1.3. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Nunukan

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten pada perubahan RKPD Kabupaten Nunukan 2025 sebagaimana amanat SE Mendagri 900.1.1/640/SJ Tahun 2025, ditujukan untuk mengakomodir dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah baru. Dengan demikian arah kebijakan ekonomi mengacu pada Rancangan Awal Dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 pasca pembahasan Pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Nunukan.

3.1.3.1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Nunukan

Untuk memperoleh gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Nunukan terkini, berikut akan disajikan data dan informasi (a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (b) Tingkat Kemiskinan; (c) Indeks Gini; dan (d) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh unit barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu atau di wilayah domestik suatu negara, yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk setempat.

Perhitungan PDRB secara konseptual dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan Produksi (Lapangan Usaha), Pengeluaran, dan Pendapatan. Namun untuk kepentingan penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini perhitungan PDRB menggunakan pendekatan Produksi (Lapangan Usaha).

PDRB terbagi menjadi 2 jenis yakni:

- 1) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) atau PDRB Riil, yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan berfungsi untuk mengukur Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara riil dari tahun ke tahun; dan
- 2) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau dikenal dengan PDRB Nominal yang disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan berfungsi untuk mengetahui kemampuan ekonomi serta melihat struktur perekonomian suatu daerah

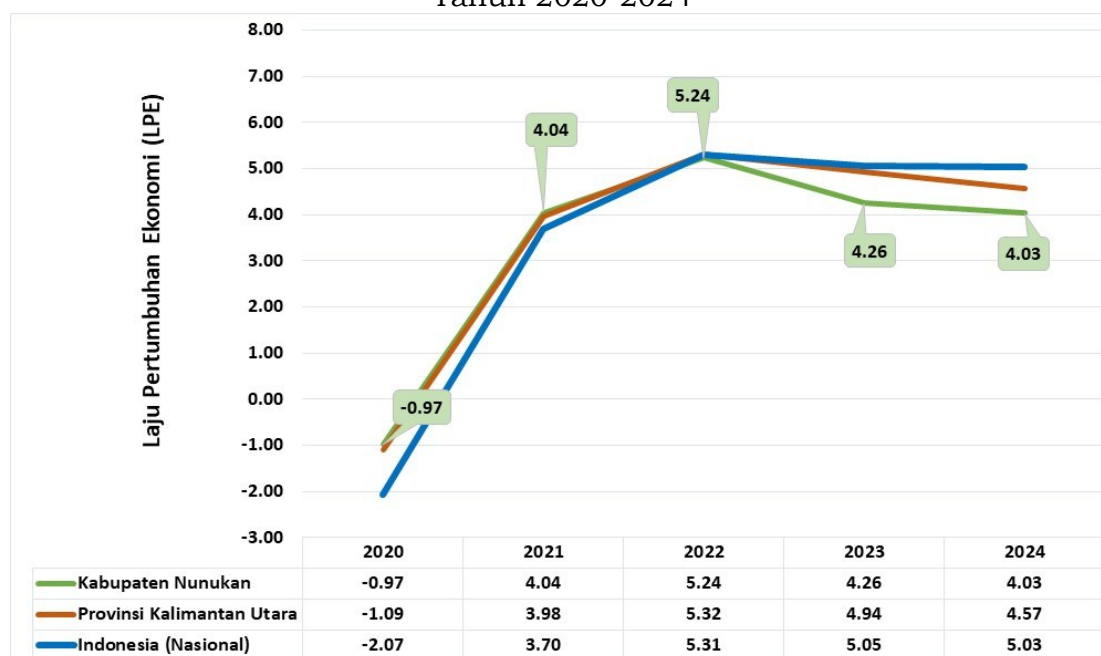
Berdasarkan buku Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2025 yang diterbitkan oleh BPS, pada tahun 2024 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 atau PDRB Riil Kabupaten Nunukan mencapai 18,65 triliun. Capaian 2024 lebih tinggi dari PDRB ADHK tahun lalu yang berada diangka 17,91 triliun. Hal tersebut menunjukkan terdapat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,03 persen di tahun 2024.

Lapangan usaha yang meraih pertumbuhan riil tertinggi di tahun 2024, yakni (1) Sektor Konstruksi 18,66 persen; (2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,51 persen; dan (3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,27 persen.

Untuk mendapatkan informasi historis capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Nunukan selama 5 tahun terakhir berdasarkan PDRB ADHK, berikut disajikan perbandingannya dengan LPE Provinsi Kalimantan Utara dan LPE Indonesia (Nasional) Tahun 2020-2024.

Gambar 3.2

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Indonesia
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara/daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Daerah yang mempunyai

pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu membawa kondisi perekonomiannya relatif lebih baik.

Berdasarkan Gambar 3.2, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nunukan mulai tahun 2023 hingga 2024 lebih rendah daripada LPE Indonesia (Nasional). Bahkan pada tahun 2021, Kabupaten Nunukan mengungguli Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2024 LPE Kabupaten Nunukan mengalami perlambatan, hanya mencapai 4,03 persen atau lebih rendah 0,23 persen dibandingkan tahun lalu. Bahkan lebih rendah 0,54 persen dibandingkan dengan LPE Provinsi Kalimantan Utara, dan 1,00 persen di bawah LPE Indonesia. Kondisi ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dikaji dalam rangka mencari solusi peningkatan LPE di Kabupaten Nunukan.

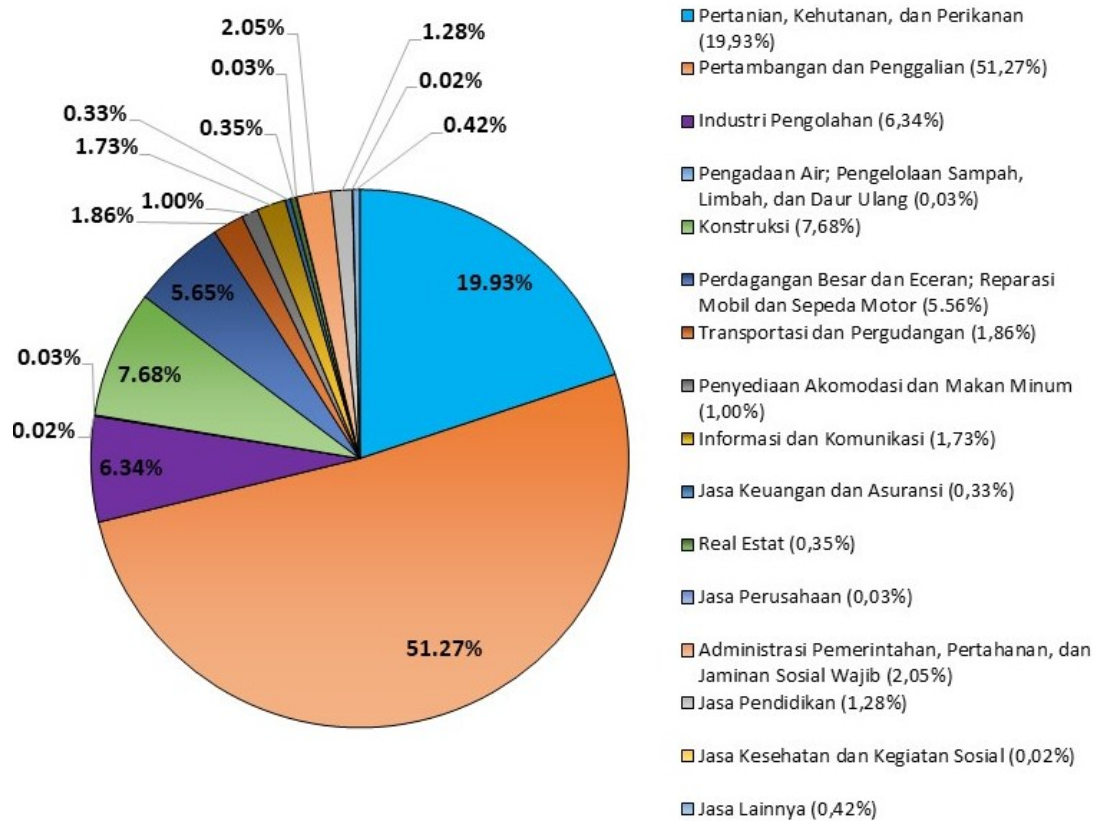
Kemudian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Nunukan tahun 2024 mencapai 40,54 triliun, atau menurun 4,69 persen dibanding tahun lalu yang mana PDRB ADHB berada diangka 42,53 triliun. Struktur ekonomi Kabupaten Nunukan tahun 2024 relatif memiliki pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana kontribusi PDRB didominasi sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sebesar 40,35 persen dari total PDRB Kabupaten Nunukan. Namun pertumbuhan share di sektor pertambangan dan penggalian melemah yakni menurun sebesar 6,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya share margin terbesar kedua, berasal dari lapangan usaha pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 19,92 persen dari total PDRB, dan di posisi ketiga dengan kontribusi sebesar 7,68 persen ditempati oleh sektor konstruksi.

Berikut disajikan secara detail kontribusi 17 Lapangan Usaha dalam struktur ekonomi Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.3

Struktur Ekonomi Kabupaten Nunukan
Berdasarkan 17 Lapangan Usaha Pembentuk PDRB ADHB Tahun 2024

**Struktur Ekonomi Kabupaten Nunukan
Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2024**



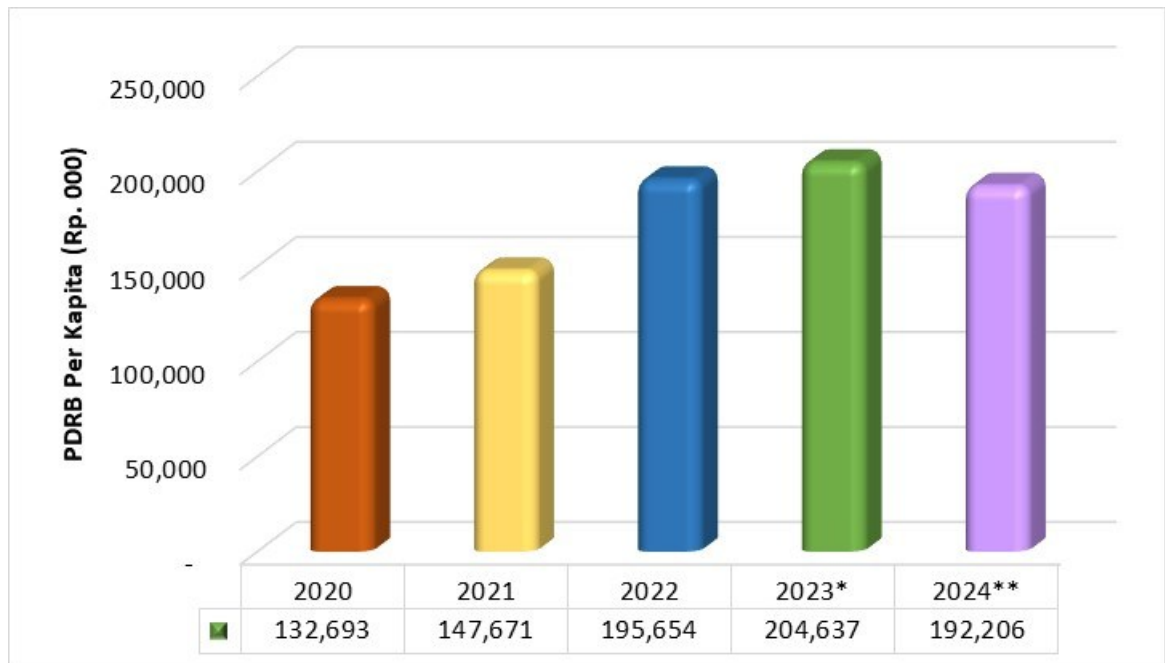
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2025

Selain berfungsi untuk memotret struktur ekonomi, dari PDRB ADHB juga dapat diketahui perkembangan PDRB Per Kapita dari tahun ke tahun.

PDRB Per Kapita merupakan gambaran pendapatan rata-rata penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah tertentu, yang didapat dari hasil bagi antara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah pendudukan suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut diasumsikan semakin membaik perekonomiannya serta sejahtera masyarakatnya.

Berikut ini disajikan PDRB Per Kapita Kabupaten Nunukan dalam kurun 5 tahun terakhir, serta gambaran pertumbuhannya.

Gambar 3.4
PDRB Per Kapita Per Tahun Penduduk Kabupaten Nunukan
Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku



*Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Nunukan, diolah, 2025

Secara nominal PDRB Per Kapita penduduk Kabupaten Nunukan dalam kurun 2020-2023 terus menunjukkan tren kenaikan. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6,07 persen, dengan demikian laju pertumbuhan rata-rata PDRB dalam lima tahun terakhir dikisaran 9,01 persen per tahun. Sementara persentase pertambahan penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2024 sebesar 1,47 persen, sehingga menjadi salah faktor yang mempengaruhi penurunan PDRB Per Kapita Kabupaten Nunukan, karena pertumbuhan Penduduk lebih tinggi daripada pertumbuhan PDRB.

Faktor lain yang mempengaruhi penurunan PDRB Per Kapita Kabupaten Nunukan tahun 2024, karena memiliki struktur ekonomi yang belum terdiversifikasi, dan masih tergantung pada sektor primer sehingga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas utama.

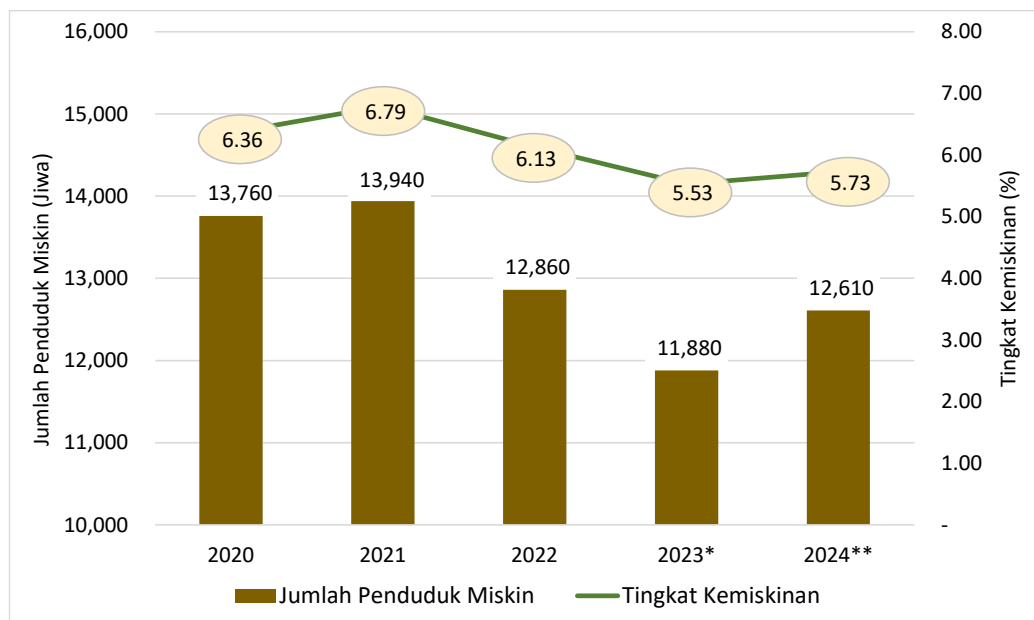
Penurunan ini perlu diperhatikan dan dianalisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mendasarinya dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.

b. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Dan Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Berikut ini disajikan perkembangan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan Kabupaten Nunukan Tahun dalam 5 tahun terakhir.

Gambar 3.5
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024



Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara
Sumber: Data BPS Nunukan, diolah, 2025

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 597.431 per kapita per bulan.

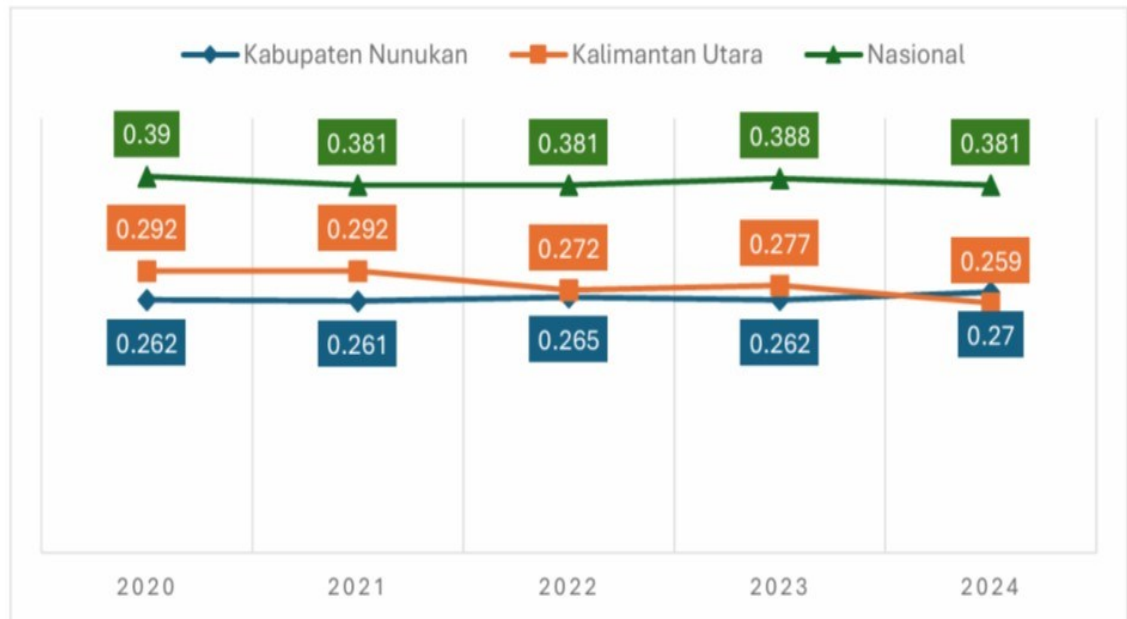
Berdasarkan Gambar 3.5 di atas, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif, dengan rata-rata tingkat kemiskinan 6,11 persen. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 730 Jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga tingkat kemiskinan mengalami peningkatan 0,20 persen dari 5,53 persen di tahun 2023 menjadi 5,73 persen di tahun 2024. Namun masih berada di bawah tingkat kemiskinan Indonesia yakni 8,57 persen di tahun 2024.

c. Indeks Gini

Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan dan dipublikasi oleh Corrado Gini, ahli statistik, demografi sekaligus sosiolog Italia pada tahun 1912 dalam bukunya “*Variabilita e Mutabilita*” atau *Variability dan Mutability*. Kini Indeks Gini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah.

Berikut disajikan perkembangan Indeks Gini Kabupaten Nunukan dalam 5 (Lima) tahun terakhir.

Gambar 3.6
Perbandingan Indeks Gini
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Indonesia
Tahun 2020-2024



Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2025

Indeks Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pendapatan per kapita yang sama. Sedangkan Indeks Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti pendapatan per kapita hanya dimiliki satu penduduk atau sumber pendapatan hanya dikuasai satu pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Indeks Gini, semakin tinggi tingkat kesenjangan distribusi pendapatan suatu daerah antara penduduk yang berpendapatan tinggi dengan penduduk yang berpendapatan rendah.

Dari Gambar 3.6 tampak bahwa Indeks Gini Kabupaten Nunukan memiliki tren lebih rendah daripada Provinsi Kalimantan Utara maupun Nasional, kecuali pada tahun 2024 lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Utara yakni di angka 0,270. Capaian ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di Kabupaten Nunukan relatif rendah. Baik Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional

memiliki tingkat ketimpangan pendapatan rendah karena seluruhnya berada di bawah nilai 0,400.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

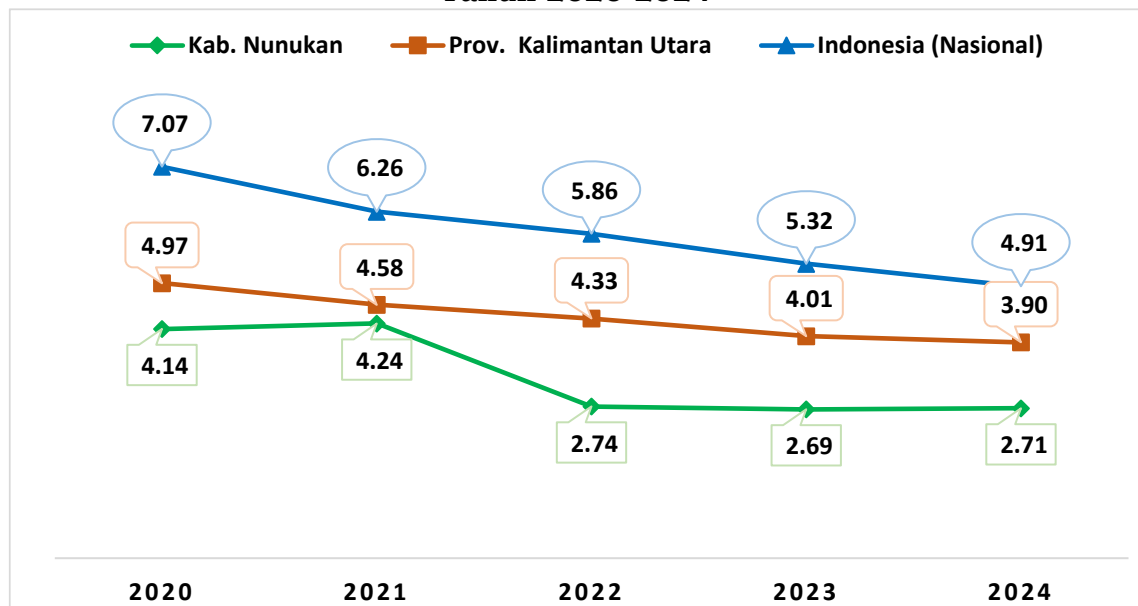
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang tergolong penganggur terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Kemudian yang dimaksud angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi bukan termasuk angkatan kerja.

Perkembangan TPT di Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 3.7
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2020-2024



Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2025

Dari grafik pada Gambar 3.7 tampak bahwa dalam lima tahun terakhir TPT Kabupaten Nunukan konsisten berada di bawah Provinsi Kalimantan Utara, serta jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Indonesia, dengan rata-rata TPT hanya 3,30% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan angkatan kerja di Kabupaten Nunukan cukup baik dan bukan merupakan Kabupaten dengan TPT tertinggi baik di Tingkat Provinsi maupun Nasional.

Pada tahun 2024 jumlah penduduk angkatan kerja Kabupaten Nunukan sebanyak 113.968 Jiwa, dan 2,71 persen atau 3.283 Jiwa diantaranya termasuk dalam kategori penganggur terbuka. Jumlah penganggur terbuka tahun 2024 bertambah sebanyak 213 Jiwa dari tahun sebelumnya, demikian pula tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 0,02 persen.

3.1.3.2. **Prospek dan Tantangan Ekonomi Kabupaten Nunukan**

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Kabupaten Nunukan menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua di Kalimantan Utara pada 2024. Dengan kontribusi sebesar 27,03 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi, posisi Nunukan hanya berada di bawah Kota Tarakan yang masih memimpin perekonomian wilayah. Capaian ini menegaskan peran strategis Nunukan dalam struktur perekonomian provinsi.

Kabupaten Nunukan memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan, terutama pada sektor industri pengolahan dan perdagangan. Kedua sektor ini dinilai lebih tahan terhadap gangguan eksternal dan cenderung memiliki pertumbuhan yang stabil sepanjang waktu. Stabilitas sektor perdagangan menjadi andalan di tengah fluktuasi harga komoditas, seperti batu bara dan rumput laut. Sektor ini dapat menjadi alternatif unggulan bagi Nunukan jika dikembangkan secara berkelanjutan dan didukung infrastruktur memadai.

Kemudian pasca 4 tahun terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kini geliat aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Nunukan yang bersumber dari pelaku UMKM juga semakin meningkat, bahkan terdapat produk UMKM yang telah berhasil diekspor.

Selain itu dengan adanya penandatanganan pembaruan Perjanjian Perdagangan Perbatasan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia atau Indonesia-Malaysia *Border Trade Agreement (BTA)* pada 8 Juni 2023, dan telah beroperasinya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan, maka Kabupaten Nunukan berpeluang meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional di antara kedua Negara. Dengan kondisi geografis dan karakteristik sumber daya yang dimiliki, Kabupaten Nunukan juga dapat mendukung Prioritas Nasional ke-2 atau Asta Cita ke-2 melalui peningkatan ekonomi sektor pertanian dan perikanan dalam rangka

swasembada pangan, pengembangan ekonomi kreatif, serta implementasi ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Kemudian Kabupaten Nunukan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekosistem serta pemanfaatan ekonomi digital.

Tantangan ekonomi Kabupaten Nunukan tidak hanya bersumber dari kondisi internal Kabupaten Nunukan, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi dan situasi ekonomi nasional maupun global. Tantangan yang hendaknya disikapi oleh Pemerintah Daerah, diantaranya:

1. Struktur ekonomi Kabupaten Nunukan masih sangat bergantung pada sektor primer, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga. Kondisi ini menjadi tantangan agar terjadi balancing maka perlu melakukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kinerja perekonomian sektor sekunder dan tersier.
2. Regulasi perizinan berusaha, serta aturan ekspor Indonesia yang sulit dipenuhi persyaratannya oleh pelaku usaha sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
3. Kondisi geopolitik utamanya kebijakan perang tarif dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar global, fluktuasi harga komoditas dan berpotensi meningkatkan inflasi di Daerah.
4. Ketersediaan pangan kabupaten Nunukan masih sangat tergantung pada pasokan dari luar daerah, sementara prioritas nasional Indonesia menuju Swasembada Pangan, yang utamanya difokuskan dalam rangka implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
5. Tantangan ekonomi digital diantaranya kesenjangan akses internet dan infrastruktur digital yang belum memadai, literasi digital yang masih rendah dan isu keamanan data.
6. Tahun 2025 merupakan tahun transisi pergantian kepala dan wakil kepala daerah, sehingga beberapa arah kebijakan termasuk kebijakan ekonomi mengalami perubahan, sehingga perlu disesuaikan pada Perubahan RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2025.

3.1.3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Nunukan

Tema Perubahan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 yaitu **“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Stabilitas Wilayah sebagai Dasar Pembangunan Sosial Ekonomi Berkelanjutan”**.

Tema tersebut merupakan acuan fokus pembangunan tahun pertama dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Fokus pembangunan Ekonomi pada tahun 2025, yaitu peningkatan potensi ekonomi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Membangun dasar Pelaksanaan pelatihan *re-skilling* dan *up-skilling* dan transisi *school-to-work*.
- 2) Membangun dasar Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
- 3) Membangun dasar Peningkatan Produktivitas BUMD.
- 4) Membangun dasar Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.
- 5) Membangun dasar Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
- 6) Membangun dasar Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan

perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

- 7) Membangun dasar Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
- 8) Membangun dasar Pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.
- 9) Membangun dasar Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
- 10) Membangun dasar Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.

Dari 17 Arah Baru Menuju Perubahan Kabupaten Nunukan yang merupakan Arah Kebijakan/Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Periode 2025-2030, terdapat 9 Arah Kebijakan yang dapat mendukung peningkatan ekonomi daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberian Bantuan Bibit, Pupuk kepada Petani, dan Alat Mekanisasi Pertanian Secara Gratis.
- 2) Membuat Kampung Pertanian Hortikultura dan Palawija Berbasis Pengwilayahan
- 3) Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Lahan Pertanian Produktif Khususnya Lahan Persawahan dan Hortikultura.
- 4) Memastikan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi Untuk Tanaman Padi Dan Perkebunan.
- 5) Memberikan Bantuan Alat Tangkap Untuk Nelayan.
- 6) Pengembangan Sektor Budidaya Ikan Dengan Pembuatan Kampung Perikanan
- 7) Bantuan Modal Dan Peningkatan Keterampilan Pelaku Usaha UMKM.

- 8) Satu Desa Satu Program Unggulan Berbasis Potensi Lokal Melalui Penguatan Bumdes.
- 9) Pembangunan 100 Kilometer Jalan Tani Pertahun.

Selain itu, pada tahun 2025 kebijakan pengendalian inflasi akan secara konsisten terus dilakukan melalui penguatan sinergi dengan Bank Indonesia ditingkat pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi pusat dan daerah. Strategi-strategi terus ditempuh melalui kebijakan menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, menjamin dan mengawasi kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif terus dilakukan dalam upaya bersama mengendalikan inflasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Penggunaan Produk dalam negeri juga menjadi agenda perekonomian daerah yang ditopang oleh sektor perindustrian dan perdagangan sehingga kegiatan ekonomi di daerah bahan dalam negeri dapat semakin menggeliat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan keuangan daerah diselaraskan dengan kebijakan fiskal Indonesia, dan mandat peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan fiskal nasional secara umum merupakan upaya untuk penyehatan APBN yang ditempuh melalui ***collecting more, spending better, dan innovative financing***.

Pada tahun 2025, seiring dengan arah kebijakan ekonomi nasional, kebijakan fiskal Indonesia juga dimaksudkan untuk mencapai tiga goals jangka pendek yakni (a) akselerasi pertumbuhan ekonomi; (b) penguatan *well-being*; dan (c) percepatan konvergensi antardaerah.

Arahan kebijakan belanja guna mencapai tiga tujuan tersebut khusus untuk wilayah Kalimantan Utara yang tentunya juga akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan, disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Arahan Kebijakan Keuangan
Wilayah Kalimantan Utara Tahun 2025

Goals 2025		Arahan Kebijakan Keuangan
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi		Peningkatan Proporsi <i>Mandatory Spending</i> infrastruktur dalam APBD Peningkatan rasio rata-rata belanja modal Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.
Penguatan <i>Well-Being</i>	Stunting	Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Intervensi sensitif di Kaltara seperti upaya pencegahan stunting sejak dini, pembangunan sarana prasarana pengentasan stunting dilakukan lebih fokus
	Kemiskinan	APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas wellbeing Kalimantan Utara dari aspek perumahan, pekerjaan, keamanan dan kesejahteraan. Belanja fungsi perlintas, perumahan dan fasilitas umum pada APBD serta penguatan mandatory spending menjadi strategi utama. Perbaikan target sasaran orang miskin juga menjadi salah satu strategi yang perlu digencarkan dalam pengentasan kemiskinan
	Pelayanan Publik	Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik melalui pinjaman program dan kegiatan Penguatan belanja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas
Percepatan Konvergensi Antardaerah		Penguatan Belanja Fungsi Ekonomi dan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM. Secara spesifik belanja dimaksudkan untuk mewujudkan Kerja sama sektor-sektor ekonomi seperti industri makanan minuman, sayuran, daging serta industri hijau rumput laut dengan mitra Sulsel. Dan pembentukan Kawasan Hilirisasi batubara, hasil hutan, petrokimia serta kendaraan listrik dengan Kab/Kota sekitar Kaltara

Sumber: Dokumen KEM dan PPKF Tahun 2025 (Pemutakhiran)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Kebijakan Fiskal 2025 diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan kondisi APBN yang sehat dan diselaraskan dengan dukungan dari pemerintah daerah melalui APBD.

Strategi jangka pendek diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan Well-being, dan konvergensi antar daerah.

Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, Pemda diharapkan terus meningkatkan belanja produktif melalui peningkatan belanja modal dan/atau belanja infrastruktur untuk mendukung akselerasi pembangunan dan melakukan efisiensi belanja operasional. Selain itu, dalam menyusun kebijakan pendapatan, optimalisasi PAD perlu dilakukan utamanya melalui perbaikan administrasi perpajakan daerah dan terus melakukan penggalian potensi.

Selanjutnya, untuk aspek penguatan Well-being dilakukan melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) yang asimetris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik setiap Pemda dan penguatan terhadap earmarking TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta penguatan evaluasi terhadap pemenuhan mandatory spending agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Adapun, untuk aspek konvergensi daerah, diharapkan Pemda dapat melakukan penguatan kerjasama antar daerah sehingga dapat lebih terlibat dalam pemenuhan global supply chain melalui pengembangan sentra ekonomi baru. Selain itu, dengan pengembangan desa mandiri diharapkan dapat lebih mempercepat proses konvergensi antar daerah.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berdasarkan fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi otorisasi memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- 2) Fungsi perencanaan memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- 3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- 5) Fungsi distribusi mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 6) Fungsi stabilisasi mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang bukan hanya mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau *output* melainkan *outcome* bahkan manfaat suatu program dan kegiatan dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Prinsip pengelolaan keuangan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap prospek serta tantangan perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab sebelumnya, dirumuskan arah kebijakan keuangan Kabupaten Nunukan tahun 2025 yang mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, secara umum upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membangun komunikasi dan konsolidasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor migas (*lifting*), dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Dana Insentif Insentif Fiskal.

Selain itu pemerintah daerah melakukan langkah-langkah strategis lainnya khususnya dalam mendorong peningkatan kinerja pendapatan daerah pasca terbitnya regulasi undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mana salah satu upaya yang dilakukan adalah merancang peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi daerah.

Upaya lain yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan instansi vertikal baik yang berhubungan dengan pertanahan maupun terkait dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terkait pertukuran data obyek dan subyek yang ada di kabupaten nunukan, realisasi penerimaan PBB P3, PPh 21 dan PPh 25/26 di Wilayah Kabupaten Nunukan sebagai dasar perhitungan proyeksi pendapatan berikutnya. Selanjutnya melakukan sinergitas dengan provinsi khususnya pembahasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi kepada daerah terkait Opsen (pungutan tambahan pajak menurut persentase) yakni Opsen pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang disebut Opsen BBNKB yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Pemerintah daerah juga akan terus berupaya meningkatkan sistem dan memberikan layanan pajak agar lebih optimal khususnya peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui beberapa strategi dari sektor PBB P2 dengan menaikkan NJOP Bumi dan Bangunan dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam rangka sinergitas, pertukaran data, pengawasan, pengendalian dan penagihan pajak serta pengembangan sistem pelayanan pajak untuk memudahkan proses perpajakan daerah menjadi mutlak dimaksimalkan.

Realisasi, target dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2026

KODE	KODE	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2022 (n-3)	Realisasi Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Tahun 2024 (n-1)	Proyeksi/Target Tahun 2025* (n)	Proyeksi/Target Tahun 2026** (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	PENDAPATAN DAERAH	1,302,632,345,034	1,775,514,283,946	2,027,564,758,481	1,981,187,317,056	1,244,818,952,256
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106,015,465,480	193,175,709,910	127,653,753,821	140,610,106,310	113,036,629,321
4.1.01	Pajak Daerah	26,100,354,101	96,346,709,187	35,522,091,611	46,451,741,620	18,592,407,215
4.1.02	Retribusi Daerah	3,124,879,187	3,617,007,695	5,950,326,059	5,334,492,839	3,232,417,092
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,012,339,622	4,510,249,390	4,923,804,211	3,600,000,000	5,100,000,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	72,777,892,570	88,701,743,637	81,257,531,939	85,223,871,851	86,111,805,013
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,189,745,669,297	1,572,303,816,978	1,894,166,786,504	1,828,017,210,746	1,128,782,322,936
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,089,052,509,903	1,446,241,730,713	1,714,521,203,790	1,701,881,679,000	1,047,289,894,891
4.2.01.01	Dana Perimbangan	911,564,393,703	1,267,055,308,213	1,502,379,376,490	1,517,781,982,000	869,519,203,891
4.2.01.01	Dana Insentif Daerah	2,126,013,000	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	175,362,103,200	179,186,422,500	209,361,032,800	176,857,567,000	175,644,678,000
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-	-	2,780,794,500	7,242,130,000	2,126,013,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	100,693,159,395	126,062,086,265	179,645,582,714	126,135,531,746	81,492,428,045
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	41,753,184,147	79,391,305,466	148,048,133,922	126,135,531,746	58,546,428,045
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	58,939,975,248	46,670,780,799	31,597,448,792	-	22,946,000,000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6,871,210,257	10,034,757,059	5,744,218,156	12,560,000,000	3,000,000,000
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	110,000,000	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6,871,210,257	9,924,757,059	5,744,218,156	12,560,000,000	3,000,000,000

Keterangan: *Angka Sementara; **Proyeksi Ranwal RPJMD Kab. Nunukan 2025-2029

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 secara normatif dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan, dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) Untuk implementasi pemenuhan pelayanan dasar (SPM), dan belanja wajib mengikat (*mandatory spending*).
- 2) Untuk belanja pelaksanaan program prioritas daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029
- 3) Untuk belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, kepala daerah diinstruksikan untuk:

- 1) Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
- 2) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
- 3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
- 4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
- 5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran.
- 6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

Hasil efisiensi anggaran, dialihkan untuk belanja terkait:

- 1) Bidang Pendidikan;

- 2) Bidang Kesehatan;
- 3) Infrastruktur dan Sanitasi;
- 4) Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
- 5) Stabilitas harga makanan dan minuman;
- 6) Penyediaan cadangan pangan; dan
- 7) Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi.

Realisasi, target dan proyeksi belanja daerah tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2026

KODE	KODE	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2022 (n-3)	Realisasi Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Tahun 2024 (n-1)	Proyeksi/Target Tahun 2025* (n)	Proyeksi/Target Tahun 2026** (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	BELANJA DAERAH	1,277,824,422,962	1,587,439,099,840	1,929,323,822,237	2,143,288,523,329	1,258,818,952,256
5.1	BELANJA OPERASI	859,200,467,333	981,670,537,549	1,149,763,023,002	1,347,562,162,350	929,727,386,928
5.1.01	Belanja Pegawai	448,152,972,492	464,588,640,563	551,649,473,806	747,933,347,203	506,710,280,104
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388,055,290,095	468,688,861,749	537,436,588,758	552,172,226,689	403,178,635,279
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	7,959,755,228	8,886,137,080	9,489,311,596	12,505,185,400	9,432,259,248
5.1.05	Belanja Hibah	10,075,276,418	35,974,013,757	50,333,418,128	34,056,472,793	9,379,841,897
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4,957,173,100	3,532,884,400	854,230,714	894,930,266	1,026,370,400
5.2	BELANJA MODAL	163,568,874,038	319,894,374,903	527,109,325,511	481,714,452,394	73,466,345,537
5.2.01	Belanja Modal Tanah	157,000,000	-	7,197,360,000	53,306,473,246	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,766,909,478	68,466,707,799	73,715,885,849	102,072,253,358	8,715,461,577
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44,928,962,644	64,842,758,540	127,189,991,518	322,164,631,881	34,567,743,320
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86,706,011,917	180,244,356,560	316,932,298,386	1,666,763,949	26,127,105,000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,990,000	6,340,552,004	1,887,309,758	2,504,329,960	3,367,285,640
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	186,480,000	-	688,750,000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4,729,340,190	2,757,072,105	143,291,417	18,865,358,704	10,052,663,802
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4,729,340,190	2,757,072,105	143,291,417	18,865,358,704	10,052,663,802
5.4	BELANJA TRANSFER	250,325,741,401	283,117,115,283	252,308,182,306	295,146,549,881	245,572,555,989
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	250,325,741,401	283,117,115,283	252,308,182,306	295,146,549,881	245,572,555,989

Keterangan: *Angka Sementara; **Proyeksi Ranwal RPJMD Kab. Nunukan 2025-2029

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.4
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2026

KODE	KODE	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2022 (n-3)	Realisasi Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Tahun 2024 (n-1)	Proyeksi/Target Tahun 2025* (n)	Proyeksi/Target Tahun 2026** (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	96,785,845,984	89,692,343,605	306,662,310,511	35,000,000,000	14,000,000,000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	96,785,845,984	139,692,343,605	309,662,310,511	35,000,000,000	17,000,000,000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	96,785,845,984	121,587,126,405	277,767,527,711	35,000,000,000	17,000,000,000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	18,105,217,200	31,894,782,800	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	50,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	50,000,000,000	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	3,000,000,000	-	3,000,000,000
	PEMBIAYAAN NETTO	96,785,845,984	89,692,343,605	306,662,310,511	35,000,000,000	14,000,000,000

Keterangan: *Angka Sementara; **Proyeksi Ranwal RPJMD Kab. Nunukan 2025-2029

BAB IV**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan dalam P-RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini mengalami penyesuaian antara lain:

1. Mengakomodir visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Nunukan terpilih hasil Pemilukada serentak tahun 2024;
2. Mengakomodir visi misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara terpilih hasil Pemilukada serentak tahun 2024;
3. Mengakomodir Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029;
4. Hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 Triwulan I;
5. Perubahan atas Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Nunukan maka visi Pembangunan Daerah dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah:

**MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF,
SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI**

Untuk memberikan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berkarakter;

2. Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat, dan tuntas;
4. Percepatan dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil dan Merata
5. Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan Menjaga dan Melestarikan Nilai - Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Penjelasan dan penjabaran atas 5 misi tersebut diatas sebagai berikut:

1. Misi 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berkarakter

Misi ini merupakan jawaban atas tantangan utama yang dihadapi daerah, yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia. Masih terbatasnya kompetensi, ketimpangan distribusi tenaga pendidik dan kesehatan, serta akses layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata menyebabkan daya saing SDM Kabupaten Nunukan tertinggal dibandingkan wilayah lain. Oleh karena itu, pemerintah daerah merancang program-program yang terintegrasi untuk membangun SDM unggul, di antaranya melalui perbaikan fasilitas pendidikan, penyediaan akses internet bagi sekolah di wilayah terpencil, pemberian beasiswa kepada mahasiswa dan pelajar berprestasi dari keluarga tidak mampu, serta pengadaan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP sebagai stimulus dan upaya meringankan biaya pendidikan. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru honorer, P3K, maupun ASN, menjadi perhatian utama. Penguatan lembaga pelatihan kerja berbasis standar nasional dan penyediaan 1.000 pelatihan kerja gratis setiap tahun bertujuan memperluas keterampilan masyarakat agar siap bersaing di dunia kerja.

Di sisi lain, membangun SDM berkualitas tidak hanya bertumpu pada pendidikan, melainkan juga pada kesehatan masyarakat yang

optimal. Oleh karena itu, komitmen melaksanakan perbaikan total manajemen rumah sakit daerah, meningkatkan ketersediaan dokter umum dan spesialis, serta memperluas akses layanan kesehatan hingga ke pelosok melalui penyediaan ambulans mobile di setiap kecamatan. Fokus pada penurunan angka stunting dan perbaikan gizi balita juga menjadi prioritas, dengan memberdayakan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar. Selaras dengan itu, peningkatan kesejahteraan tenaga medis diupayakan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan. Dengan pendekatan yang holistik, misi ini diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia Nunukan yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sehat secara fisik dan mental serta berkarakter kuat, guna mendukung percepatan pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi.

2. Misi 2 : Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Misi ini menjawab isu strategis tentang belum optimalnya pengelolaan sumber daya berbasis lokal. Potensi pertanian, perikanan, peternakan, dan kekuatan UMKM yang tersebar di berbagai wilayah desa hingga pesisir masih belum dimanfaatkan secara maksimal, baik dalam peningkatan produksi maupun hilirisasi produknya. Karena itu, program-program yang dirancang, seperti pemberian bantuan bibit tanaman pangan dan hortikultura, alat mekanisasi, serta pupuk bersubsidi dan non-subsidi, ditujukan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Di sisi lain, upaya ini juga mengarah pada penguatan hilirisasi produk pertanian dan perikanan kelautan, yang menjadi isu strategis dalam rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029. Hilirisasi ini dilakukan melalui pembentukan kampung hortikultura, kampung perikanan, dan pemberian fasilitas

budidaya yang mendorong produksi berkelanjutan serta siap didistribusikan ke pasar yang lebih luas.

Lebih jauh lagi, tantangan distribusi perdagangan yang selama ini terhambat, sebagaimana disebut dalam rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029, dijawab dengan strategi penguatan UMKM berbasis potensi lokal melalui program satu desa satu UMKM yang didukung oleh penguatan BUMDes. Dengan begitu, akses masyarakat ke modal usaha, pelatihan keterampilan, dan penguatan jejaring pemasaran menjadi lebih terbuka. Ini diperkuat pula dengan upaya peningkatan infrastruktur penunjang seperti sarana dan prasarana pariwisata, yang tidak hanya mendukung ekonomi kreatif lokal, tetapi juga memperluas akses pasar hasil-hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM. Melalui pendekatan terintegrasi ini, diharapkan pengelolaan sumber daya berbasis lokal dapat lebih optimal, hilirisasi produk unggulan berjalan lancar, dan distribusi perdagangan daerah Nunukan semakin efisien serta kompetitif

3. Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat dan Tuntas

Misi ketiga ini berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat, dan tuntas. Hal ini menjawab isu strategis RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045, yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang mendukung percepatan pembangunan wilayah perbatasan. Melalui pengembangan E-Government, pemenuhan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas informasi publik, diharapkan pelayanan pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan publik di wilayah perbatasan akan semakin mudah diakses masyarakat, mendukung percepatan pembangunan, dan meningkatkan daya saing daerah.

Selain itu, penerapan Sistem Merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) menjadi langkah strategis dalam menjawab isu

Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029, yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah. Penempatan ASN berbasis sistem meritokrasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan ASN serta tenaga honorer, hingga pemberian insentif RT, diharapkan mendorong profesionalisme dan integritas birokrasi daerah. Pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pelayanan ini menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan percepatan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan

4. Misi 4 : Percepatan dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Adil dan Merata

Misi keempat ini diarahkan untuk menjawab isu strategis RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045, yaitu terbatasnya aksesibilitas dan belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar wilayah serta belum optimalnya tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Fokus utama pembangunan infrastruktur dasar meliputi jalan dan jembatan, perumahan dan air bersih, hingga energi listrik dan jaringan. Penyediaan 100 km jalan tani per tahun, alat berat di setiap kecamatan, serta subsidi transportasi hasil pertanian di wilayah perbatasan seperti Krayan dan Lumbis diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Selain itu, pembangunan rumah layak huni, sarana air bersih, serta pemerataan energi listrik dan internet di desa-desa blank spot menjadi fondasi utama dalam pemerataan pembangunan yang inklusif.

Lebih jauh, misi ini juga menjadi jawaban atas isu strategis dalam Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029, khususnya terkait masih terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar, serta belum optimalnya pembangunan pedalaman tertinggal dan perbatasan. Upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar ini diharapkan juga mampu

mengatasi degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit, dengan mendorong sistem pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, ketahanan air, energi, dan pangan diperkuat melalui pemerataan akses air bersih, energi listrik, dan internet, yang menjadi prasyarat penting dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, adil, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.

5. Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Misi ini bertujuan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Nunukan yang harmonis, inklusif, dan sejahtera melalui pelestarian nilai-nilai budaya, agama, dan kearifan lokal. Penguatan peran lembaga adat dan keagamaan menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan yang berakar pada nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Program peningkatan bantuan dan anggaran lembaga adat serta intensif bulanan bagi kepala iman masjid, guru mengaji, pengelola rumah ibadah, dan guru sekolah minggu, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan tokoh masyarakat yang menjadi panutan di wilayahnya. Ruang yang lebih luas bagi partisipasi lembaga adat dalam perencanaan kebijakan pemerintah daerah juga menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan berbasis kearifan lokal, menciptakan rasa memiliki, serta memperkuat kohesi sosial.

Selain itu, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Program penguatan organisasi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan, serta perlindungan sosial bagi generasi emas Nunukan, lanjut usia, dan difabel diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan produktif. Peningkatan kualitas organisasi pemuda juga diharapkan dapat menciptakan ruang partisipasi generasi muda

dalam pembangunan berbasis potensi lokal. Dengan demikian, misi ini berkontribusi langsung dalam mengatasi rendahnya kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga identitas budaya sebagai kekuatan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025.

P-RKPD Tahun 2025 menjadi bagian dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga Tujuan dan Sasaran pembangunan Daerah tersaji sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Dan Berkarakter.	1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Merata		Indeks Pembangunan Manusia
		1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
		2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata	Angka Harapan Hidup
Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	2. Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif melalui Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya Lokal Yang Berdampak Pada Penurunan Kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi
			Tingkat Kemiskinan
		3. Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian
			Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan
		4. Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas
		5. Meningkatnya Daya Tarik	Nilai Realisasi Investasi

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
		Investasi Daerah	
		6. Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka.
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melani, Cepat Dan Tuntas.	3. Terwujudnya Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional		Indeks Reformasi Birokrasi
		7. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP
		8. Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik
		9. Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Indeks SPBE
		10. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Opini BPK
		11. Meningkatnya Profesionalitaskan ASN	Indeks Profesionalisme Aparatur
Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata.	4. Terwujudnya infrastruktur dasar adil dan merata antar wilayah yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
		12. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat	Indeks Infrastruktur Daerah
		13. Meningkatkan Ketahanan Daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)
		14. Meningkatkan kualitas penataan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan Menjaga Dan Melestarikan Nilai - Nilai Budaya Dan Kearifan	5. Terciptanya Masyarakat Harmoni dan Berkarakter Melalui Peningkatan Inklusi Sosial dan Pelestarian Kearifan		Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)
		15. Lestarnya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi dalam	Indeks Kerukunan Umat Beragama
			Indeks Pembangunan Kebudayaan

MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA
Lokal		Lokal		Kehidupan Masyarakat	
				Meningkatnya Keberdayaan dan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan	Indeks Pembangunan Gender

Mempedomani Rancangan Awal RPJMD maka perumusan perubahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Serta Perubahannya
Tahun 2024-2025

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (RPJMD Tahun 2021-2026)	PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (Ranwal RPJMD Tahun 2025- 2029)		CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET PADA RKPD TAHUN 2025	PERUBAHAN TARGET PADA P-RKPD TAHUN 2025	TARGET RPJPD BASELINE TAHUN 2025
1	2	3		4	5	6	7
I	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	I	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,27	69,10	69,96	69,10
1	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	1	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,39	8,30	8,49	8,57
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,69	12,94	12,70	13,22
3	Angka Harapan Hidup (Tahun)	3	Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,13	71,42	73,16	71,84
4	Pengeluaran per kapita (Juta Rupiah)		---	1.429.621	1.438.374	Tidak dicantumkan	Tidak dicantumkan
II	Laju pertumbuhan ekonomi	II	Laju pertumbuhan ekonomi	4,03	5,47	5,50	5,50
III	Tingkat kemiskinan	III	Tingkat kemiskinan	5,73	5,72	5,38	5,38
5	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian	4	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	19,93	7,32	20,5	7,32
6	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	5	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	6,34	2,71	7,03	5,89
		6	Persentase UMKM Naik Kelas	---	Tidak dicantumkan	0,5	Tidak dicantumkan
7	Jumlah Nilai Realisasi Penanaman Modal (Milyar Rupiah)	7	Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)	3050,41		4546,17	
8	Tingkat pengangguran terbuka	8	Tingkat pengangguran terbuka	2,71	3,79	2,59	2,59

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (RPJMD Tahun 2021-2026)	PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (Ranwal RPJMD Tahun 2025- 2029)		CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET PADA RKPD TAHUN 2025	PERUBAHAN TARGET PADA P-RKPD TAHUN 2025	TARGET RPJPD BASELINE TAHUN 2025
1	2	3		4	5	6	7
IV	Indeks Reformasi Birokrasi	IV	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	B	BB	B
9	Nilai SAKIP	9	Nilai SAKIP	B	B	B	B
10	Indeks kepuasan masyarakat	10	Indeks Pelayanan Publik	3,74	Tidak dicantumkan	3,885	3,16 (B-)
11	Nilai mandiri SPBE	11	Nilai mandiri SPBE	2,61	Cukup (2,00)	2,74	3,08
12	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	12	Opini BPK	WTP	Tidak dicantumkan	WTP	Tidak dicantumkan
13	Indeks profesionalitas ASN	13	Indeks profesionalitas ASN	73,13	62,00	76,78	62,00
		V	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	50	Tidak dicantumkan	52,5	Tidak dicantumkan
14	Indeks infrastruktur	14	Indeks Infrastruktur Daerah	65,04	Tidak dicantumkan	66,21	Tidak dicantumkan
		15	Indeks Risiko Bencana (IRB)	138,29	Tidak dicantumkan	134,41	144
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,62	78,42	80,55	79,81
		VI	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	---	Tidak dicantumkan	66	Tidak dicantumkan
		17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,94	Tidak dicantumkan	79,98	82
		18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,4	Tidak dicantumkan	61,23	67,42 - 68,49
16	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	19	Indeks Pembangunan Gender	83,97	Tidak dicantumkan	85,20	Tidak dicantumkan

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 (Perubahan).

Prioritas pembangunan Nasional Tahun 2025 yang menjadi tema dan isu strategis antara lain:

- a. Penguatan SDM, pendidikan dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis;
- c. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan ekstrem;
- d. Pengendalian inflasi daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan;
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan pada P-RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari visi misi Kepala Daerah terpilih seperti tersaji pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Misi Kepala Daerah dan Prioritas Daerah Tahun 2025

MISI	PRIORITAS DAERAH	RENCANA AKSI
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Dan Berkarakter.	1. Penguatan SDM melalui pendidikan dan Kesehatan	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas; 2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan; 3. Peningkatan budaya literasi masyarakat; 4. Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak; 5. Penguatan sistem kesehatan; 6. Peningkatan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
Peningkatan dan	2. Peningkatan pertumbuhan	1. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian;

MISI	PRIORITAS DAERAH	RENCANA AKSI
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	ekonomi daerah;	2. Peningkatan sarana prasarana pertanian; 3. Pengembangan SDM pertanian; 4. Pengembangan industri pengolahan berbahan baku lokal; 5. Penguatan layanan jasa dan perdagangan; 6. Pengembangan iklim investasi yang kondusif; 7. Pengembangan layanan destinasi wisata dan ekonomi kreatif.
	3. Pengendalian inflasi daerah;	1. Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat; 2. Penguatan distribusi barang dan jasa; 3. Penyaluran subsidi tepat sasaran.
	4. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem	1. Mengoptimalkan pemberian MBG; 2. Mengoptimalkan perlindungan sosial; 3. Mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat Dan Tuntas.	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan	1. Peningkatan fungsi dan kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel; 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat; 3. Peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk pelayanan publik; 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah; 5. Peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan daerah.
Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata.	5. Pemenuhan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan; 2. Peningkatan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air; 3. Pengembangan moda transportasi secara terpadu; 4. Peningkatan layanan dan pemanfaatan prasarana pendukung transportasi;

MISI	PRIORITAS DAERAH	RENCANA AKSI
		5. Peningkatan pelayanan air minum; 6. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sanitasi layak; 7. Peningkatan penanganan kawasan kumuh; 8. Memperkuat pengelolaan sistem persampahan; 9. Memperkuat sistem mitigasi bencana.
Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan Menjaga Dan Melestarikan Nilai - Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal		

Sinergi atas Prioritas Nasional yang dikenal dengan Asta Cita, Prioritas Provinsi Kalimantan Utara dan Prioritas Kabupaten Nunukan tersaji pada Tabel 4.4 Berikut:

Tabel 4.4
Sinergi Antar Prioritas

PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025	PRIORITAS KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, Pemuda, dan penyandang disabilitas.	Transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan	Penguatan SDM melalui pendidikan dan Kesehatan

PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025	PRIORITAS KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025
Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Transformasi ekonomi daerah yang berkeadilan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam Negeri.		
		Pengendalian inflasi daerah;
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	Transformasi tata kelola yang kolaboratif dan inovatif	Peningkatan tata Kelola pemerintahan
Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, Mengembangkan industry kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Pemantapan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan	Pemenuhan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar
	Pemantapan sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan	
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan Budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		

PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025	PRIORITAS KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan supremasi hukum dan stabilitas daerah sebagai beranda depan NKRI	
	Pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi	
	Perwujudan kesinambungan pembangunan Kalimantan Utara untuk mengawal Indonesia Emas	

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 merupakan penyesuaian dengan 17 arah pembangunan daerah (perubahan) yang menjadi janji Bupati dan Wakil Bupati Nunukan pada pelaksanaan kampanye pemilukada yang tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 4.5
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
Pada RKPD 2025 dan P-RKPD 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		NO	JANJI KAMPANYE KEPALA DAERAH
RKPD 2025	P-RKPD 2025		
Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Penguatan SDM melalui pendidikan dan Kesehatan	7	Seragam Sekolah Gratis Untuk Peserta Didik SD Dan SMP Di Tahun Pertama
		8	1.000 Pertahun Basiswa Untuk Siswa Dan Mahasiswa Yang Berprestasi Dan Kurang Mampu
		9	Satu Sekolah Satu <i>Starlink</i> Yang Tidak Terjangkau Jaringan Internet
		11	Memastikan Pemenuhan Tenaga Medis Dan Dokter Spesialis Di Setiap Rumah Sakit
		10	Penguatan Fungsi Dan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dan RS Pratama
		17	Satu Desa Satu Program Unggulan Berbasis Potensi Lokal

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		NO	JANJI KAMPANYE KEPALA DAERAH
RKPD 2025	P-RKPD 2025		
			Melalui Penguatan Bumdes
Pengembangan ekonomi yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	12	Pemberian Bantuan Bibit, Pupuk Kepada Petani Dan Alat Mekanisasi Pertanian Secara Gratis
		15	Memberikan Bantuan Alat Tangkap Dan Mesin Kepada Nelayan, Serta Mendorong Kampung Budidaya Perikanan
		13	Membuat Kampung Pertanian Hortikultura Dan Palawija Berbasis Pengwilayahan
		3	100 Kilometer Jalan Tani Tahun
		16	Pemberian Bantuan Modal Dan Peningkatan Keterampilan Pelaku Usaha UMKM
		14	Menjaga Stabilitas Harga Rumput Laut Melalui Perda
Peningkatan pembangunan infrastruktur	Pemenuhan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	1	Memastikan Ketersediaan Air Bersih Di Seluruh Wilayah.
		2	Memastikan Kebutuhan Energi Listrik Terpenuhi
		3	Memastikan Pembangunan Jalan 50 Kilometer Jalan Penghubung Kecamatan Dan Desa
		5	Satu Kecamatan, Satu Unit Alat Berat (Peruntukan mitigasi bencana)
		6	200 Rumah Layak Huni Tahun Dengan Penganggaran 25 Juta/Unit
Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan sosial yang terintegrasi dan tepat sasaran	Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem		
Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui agenda reformasi birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih		
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			
Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum			
	Pengendalian inflasi		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		NO	JANJI KAMPANYE KEPALA DAERAH
RKPD 2025	P-RKPD 2025		
	daerah		

Untuk mewujudkan pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 yang responsif dan berkualitas, maka penjabaran Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Program-program pembangunan daerah seperti pada Tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.6
**PENJABARAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PADA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2025		PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penguatan SDM melalui pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah dan	8,30	8,49	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum • Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan • Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Harapan Lama Sekolah	12,94	12,70		
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata	Angka Harapan Hidup	71,42	73,16	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2025		PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kesehatan Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	
2	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	7,32	20,5	- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner - Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Perizinan Usaha Pertanian - Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	2,71	7,03	- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri - Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian serta Perdagangan
		Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas		0,5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2025		PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan (UMKM)	
		Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi		4546,17	• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal PTSP
		Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka.	3,79	2,59	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	Pemenuhan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat	Indeks Infrastruktur Daerah	Tidak dicantumkan	66,21	• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengelolaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2025		PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
						Dan Pengembangan Sistem Drainase • Program Pengembangan Permukiman • Program Penataan Bangunan Gedung • Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya • Program Penyelenggaraan Jalan	
		Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Tidak dicantumkan	134,41	• Program Penanggulangan Bencana • Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	BPBD Disdamkar
		Meningkatnya kualitas penataan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,42	80,55	• Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Persampahan	DLH
4	Pencegahan	Terkendalinya /	Prevalensi	15,8	13	• Program Pemenuhan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2025		PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
	stunting dan kemiskinan ekstrem (Implementasi Perpres Nomor 72 Tahun 2021) dan	Menurunnya Balita Stunting	Stunting			Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
	(implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2022)	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,38	5,38	• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Perikanan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2025		PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
						Veteriner • Program Penyuluhan Pertanian • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi	Nilai SAKIP	B	B	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi Setda dan seluruh Perangkat Daerah
		Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Tidak dicantumkan	3,885	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Seluruh Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik
		Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Indeks SPBE	Cukup (2,00)	2,74	• Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DKISP

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2025		PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				RKPD	P-RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Opini BPK	Tidak dicantumkan	WTP	- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Bappeda Litbang BPKAD
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalisme Aparatur	62,00	76,78	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
6	Pengendalian inflasi daerah	Terkendalinya daya beli masyarakat	Angka Inflasi	Tidak dicantumkan	2,5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Sosial PPPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian serta Perdagangan

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah dalam P-RKPD ini merupakan uraian rinci dalam bentuk matrik yang menjelaskan perubahan nama program, kegiatan, sub kegiatan perubahan indikator kinerja, perubahan target dan perubahan pagu indikatif.

Rencana program tersebut merupakan bagian dari kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dikelompokkan menjadi 8 (delapan) unsur urusan yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebanyak 6 (enam) bidang urusan yaitu bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial;
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebanyak 18 (delapan belas) bidang urusan yaitu tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan dan kearsipan;
3. Urusan Pemerintahan Pilihan sebanyak 8 (delapan) bidang urusan yaitu kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian dan transmigrasi;
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sebanyak 2 (dua) bidang urusan yaitu sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebanyak 6 (enam) bidang urusan yaitu perencanaan; keuangan; kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan dan pengelolaan perbatasan;

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebanyak 1 (satu) bidang urusan yaitu Inspektorat Daerah;
7. Unsur kewilayahan sebanyak 1 (satu) bidang urusan yaitu Kecamatan; dan
8. Unsur Pemerintahan Umum sebanyak 1 (satu) bidang urusan yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan pembiayaannya pada P-RKPD tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang telah 4 (empat) kali dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rincian Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta perubahan target kinerja yang disertai Pendanaan Daerah disajikan dalam Tabel 5.1 yang telah di input pada sistem aplikasi sipd-ri.kemendagri.go.id

Tabel 5.1
Perubahan Rencana Program Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2025

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	DINAS PENDIDIKAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	10 Dokumen	10 Dokumen	87,017,895.00	63,875,194.20	Dana Bagi Hasil (DBH)
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	49,842,352.50	33,330,313.90	Dana Bagi Hasil (DBH)
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	227.690.937,75	47.640.046,70	Dana Bagi Hasil (DBH)
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	549.358.707,50	377.447.091,20	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen			
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	1600 Orang bulan	1720 Orang bulan	323.856.663.710,27	329.810.906.324,27	Dana Alokasi Umum (DAU)
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	407,289,328.00	209,968,628.50	Dana Bagi Hasil (DBH)
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	210.534.091,00	108.088.860,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	112.055.519,00	64.895.519,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	229.736.696,00	173.684.525,90	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-			
10	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	247,080,304.40	247,080,304.40	Dana Bagi Hasil (DBH)
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	131.937.300,00	93.237.935,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-			
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	523.310.660,00	393,893,264.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja internal,yang men dapatkan,layanan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	595.340.730,00	595.340.730,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1 Paket	1 Paket	53.683.252,00	53.683.252,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	119.979.135,00	99.932.226,60	Dana Bagi Hasil (DBH)
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	99.993.871,50	99.993.871,50	Dana Bagi Hasil (DBH)
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	243.859.253,00	182.283.957,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	274.177.600,00	152.721.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	413.804.000,00	413.804.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.039.390.600,00	4.007.490.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal,yang men dapatkan,layanan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen			
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	14 Unit	14 Unit	238.087.097,00	238.087.097,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	1.254.405.400,00	1.254.405.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	64.713.000,00	64.713.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	347.700.000,00	347.700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 2. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 1. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam	100 Persen 60,11 Persen 62,51 Persen 97,80 Persen 99,04 Persen	100 Persen 60,11 Persen 62,51 Persen 97,80 Persen 99,04 Persen			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar 2. Persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 3. Angka putus sekolah SD/MI 4. Angka partisipasi Murni SD/MI	58.70 Persen 59.25 Persen 0.40 Persen 95.81	58.70 Persen 59.25 Persen 0.40 Persen 95.81			
		6. Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 7. Persentase SD dan SMP Negeri Terakreditasi 8. Persentase peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 9. Persentase peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya Pendidikan Persentase terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
28	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang	3 Ruang	3 Ruang	753.595.000,00	712.325.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
29	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	1.226.545.000,00	1.208.335.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
30	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah	2 Unit	2 Unit	3.282.360.000,00	3.230.860.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
31	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	15 Paket	15 Paket	1.997.692.000,00	1.945.392.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
32	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	158 Peserta Didik	158 Peserta Didik	377.785.690,00	256.407.690,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
33	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	139 Orang	139 Orang	286.041.470,00	207.440.470,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
34	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	205.055.860,00	123.379.860,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
35	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	139 Satuan Pendidikan	139 Satuan Pendidikan	31.230.136.420,00	31.078.798.420,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
39	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	1 Komunitas	765.811.030,00	397.312.780,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
41	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1400 Paket	1400 Paket	725.191.930,00	583.145.930,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
42	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18 Ruang	18 Ruang	20.075.462.990,00	19.841.970.080,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
43	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang	1 Orang	1 Orang	202.789.710,00	187.756.710,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
44	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	139 Satuan Pendidikan	139 Satuan Pendidikan	285.724.010,00	180.769.240,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	8 Ruang	2.033.960.000,00	1.918.180.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
46	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	348.838.900,00	312.736.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang	15 Paket	15 Paket	3.913.605.620,00	3.677.240.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Persentase peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 2. Persentase peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 3. Persentase sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik 4. Angka putus sekolah SMP/MTs 5. Angka partisipasi Murni SMP/MTs 6. Angka kelulusan SMP/MTs 7. Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	1.89 Persen 95.18 Persen 71.16 Persen 1.00 Persen 87.26 Persen 99.90 Persen 98.85 Persen 100 Persen	1.89 Persen 95.18 Persen 71.16 Persen 1.00 Persen 87.26 Persen 99.90 Persen 98.85 Persen 100 Persen			
48	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	3.622.595.000,00	3.568.375.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
49	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	609.425.000,00	583.955.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
50	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah	4 Unit	4 Unit	1.980.520.000,00	1.875.280.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
51	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	684.985.000,00	684.985.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
52	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	817.105.000,00	727.010.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
53	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	434.719.789,00	380.635.248,80	Dana Bagi Hasil (DBH)
54	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	127 Peserta Didik	127 Peserta Didik	1.015.654.787,00	732.522.652,60	Dana Bagi Hasil (DBH)
56	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	60 Orang	440.502.129,00	319.067.272,50	Dana Bagi Hasil (DBH)
58	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	16.969.002.879,00	16.923.246.307,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
63	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	401.373.767,00	63.045.006,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
64	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	8 Ruang	4.940.860.175,00	4.894.775.130,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
66	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket	1.128.784.895,00	844.080.895,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
67	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	247.655.000,00	240.405.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Angka Partisipasi Murni Paud 2. Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 3. Persentase peserta didik PAUD yang menerima perlaengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Persentase peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya Pendidikan Persentase unit kerja internal,yang men dapatkan,layanan sarana dan prasarana aparatur	55.80 Persen 96.00 Persen 4.64 Persen 94.63 Persen 100 Persen	55.80 Persen 96.00 Persen 4.64 Persen 94.63 Persen 100 Persen			
68	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	1.404.376.907,88	1.404.376.907,88	Dana Bagi Hasil (DBH)
69	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	15 Paket	15 Paket	264.983.870,00	247.052.170,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
70	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	232.782.650,00	208.961.730,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
71	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	730 Orang	730 Orang	3.023.425.120,00	3.006.623.060,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
72	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	40 Orang	242.770.300,00	209.096.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
73	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	685.526.625,00	381.430.495,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
74	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	185 Satuan Pendidikan	185 Satuan Pendidikan	9.109.300.000,00	9.109.300.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
75	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana	185 Orang	185 Orang	173.631.270,00	131.058.480,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
77	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang	65 Orang	65 Orang	230.001.190,00	175.436.890,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
78	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	2 Doku men	2 Doku men	185.339.805,00	97.384.970,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
79	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang	3 Doku men	3 Doku men	233.958.555,00	143.450.455,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
80	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	355.585.000,00	355.585.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
82	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	3 Ruang	1.483.529.498,10	1.439.064.498,10	Dana Bagi Hasil (DBH)
85	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	800 Paket	800 Paket	562.487.860,00	477.584.100,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
87	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	37 Paket	37 Paket	1.010.247.780,00	970.182.100,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
88	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses	185 Satuan Pendidikan	185 Satuan Pendidikan	120.673.070,00	120.673.070,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	1. Persentase satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 2. Persentase peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Persentase peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan Persentase unit kerja internal,yang men dapatkan,layanan sarana dan prasarana aparatur	69.37 Persen 0.01 Persen 75.98 Persen 100 Persen	69.37 Persen 0.01 Persen 75.98 Persen 100 Persen			
90	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30 Peserta Didik	30 Peserta Didik	48.708.000,00	36.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
91	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	35 Orang	35 Orang	233.234.350,00	231.257.320,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
92	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	10 Orang	129.729.375,00	99.724.950,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
93	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	321.488.210,00	217.736.020,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
94	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	2.624.710.000,00	2.624.710.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler Dana Bagi Hasil (DBH)
95	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah	30 Orang	30 Orang	153.893.440,00	116.638.480,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
96	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang	30 Orang	30 Orang	151.232.550,00	112.436.090,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
99	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	60 Paket	60 Paket	200.001.050,00	169.667.880,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
102	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	4558 Peserta Didik	4558 Peserta Didik	322.901.155,00	144.373.440,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
103	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	2 unit	2 unit	1.113.567.768,14	1.004.055.768,14	Dana Bagi Hasil (DBH)
104	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang	1 Paket	1 Paket	395.902.500,00	272.366.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal spesifik lokasi	85 Persen	85 Persen			
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum	1 Persen	1 Persen			
106	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	157.912.620,00	78.443.870,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
108	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	30 Orang	30 Orang	153.575.040,00	65.614.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2. Rasio guru terhadap rombongan belajar sekolah pendidikan dasar 1. Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan	1,07 Persen 12.15 Murid/ Guru	1,07 Persen 12.15 Murid/ Guru			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV Sekolah Pendidikan Dasar 2. Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik Sekolah Pendidikan Dasar 3. Kepala Sekolah yang memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah 4. Rasio Tenaga Kependidikan terhadap Satuan Pendidikan/Lembaga 5. Peningkatan Jenjang Karir Pendidik 6. Pengembangan Jenjang Karir Pendidik	85.00 Persen 30.79 Persen 49.7 Persen 3.53 Persen 25.33 Persen 9.67 Persen	85.00 Persen 30.79 Persen 49.7 Persen 3.53 Persen 25.33 Persen 9.67 Persen			
112	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	435 Dokumen	435 Dokumen	309.293.040,00	198.795.540,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
113	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	245 Laporan	245 Laporan	398.856.940,00	276.730.940,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah swasta yang mengelola pendidikan secara mandiri	100 Persen	100 Persen			
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar	100 Persen	100 Persen			
114	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25 Dokumen	25 Dokumen	128.248.000,00	84.418.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
115	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25 Dokumen	25 Dokumen	114.117.646,00	43.092.270,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penilaian Kelayakan usul Perizinan Paud dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen			
116	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20 Dokumen	20 Dokumen	122.254.850,00	77.849.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
117	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20 Dokumen	20 Dokumen	107.518.839,00	94.125.780,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEN GEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase kegiatan pengembangan bahasa dan sastra	65 Persen	65 Persen			
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Kamus Bahasa Daerah kabupaten/kota	1 Buku	1 Buku			
118	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	1 Kamus	1 Kamus	169.292.040,00	147.120.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
119	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan	1 Publikasi	1 Publikasi	84.421.775,00	69.412.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
120	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang	100 Buku	100 Buku	94.515.720,00	93.219.970,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
121	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	250.076.720,00	236.685.770,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Puskesmas Lapri						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
122	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	461.841.660,00	461.841.660,00	PENDAPATAN ASLI DAER AH (PAD)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
123	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	126 Orang	126 Orang	103.302.000,00	103.302.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
124	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1541 Orang	1541 Orang	45.300.000,00	45.300.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
125	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2 Orang	2 Orang	14.400.000,00	14.400.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
126	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14 Orang	14 Orang	10.500.000,00	10.500.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
127	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	131.280.000,00	131.280.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
128	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
129	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	23.700.000,00	23.700.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
130	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.241.000,00	22.241.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
131	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	2 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
132	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	1 Dokumen	1 Dokumen	81.503.000,00	81.503.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
133	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	102.707.000,00	102.707.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
134	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	1 Orang	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
135	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	12.675.000,00	12.675.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
136	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1.433.000,00	1.433.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
137	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
138	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	9.546.000,00	9.546.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	Puskesmas Aji Kuning						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
139	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.436.640.355,00	1.436.640.355,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
140	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Kegiatan Orang	1 Kegiatan Orang	116.688.000,00	116.688.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
141	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Kegiatan Orang	1 Kegiatan Orang	40.500.000,00	40.500.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
142	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Kegiatan Orang	1 Kegiatan Orang	19.800.000,00	19.800.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
143	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Kegiatan Orang	1 Kegiatan Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
144	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	282.739.150,00	282.739.150,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
145	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000,00	6.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
146	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.900.000,00	24.900.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
147	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.500.000,00	15.500.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
148	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Kegiatan Orang	1 Kegiatan Orang	27.000.000,00	27.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
149	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	1 Dokumen	1 Dokumen	115.409.973,60	115.409.973,60	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
150	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	116.371.800,00	116.371.800,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
151	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Kegiatan Orang	1 Kegiatan Orang	1.320.026,40	1.320.026,40	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
152	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	18.835.000,00	18.835.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
153	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
154	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	17.100.000,00	17.100.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
155	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	14.670.200,00	14.670.200,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	Puskesmas Seimenggaris						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
156	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	850.731.011,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
157	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	216 Orang	216 Orang	92.379.000,00	92.379.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
158	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2012 Orang	2012 Orang	88.200.000,00	88.200.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
159	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	18 Orang	18 Orang	21.600.000,00	21.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
160	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang	40 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
161	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen	274.020.000,00	274.020.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
162	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.600.000,00	24.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
163	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	31.200.000,00	31.200.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
164	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
165	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18 Orang	18 Orang	10.800.000,00	10.800.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
166	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	4 Dokumen	4 Dokumen	139.326.000,00	139.326.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
167	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	6 Dokumen	6 Dokumen	173.952.000,00	173.952.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
168	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	200 Orang	200 Orang	2.100.000,00	2.100.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
169	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	16.904.000,00	16.904.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
170	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	2 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
171	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
172	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	14.150.000,00	14.150.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
173	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	850.731.011,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Puskesmas Pembelian						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
174	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	688.860.080,00	688.860.080,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
175	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	250 Orang	137.651.750,00	137.651.750,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
176	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang	72.000.000,00	72.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
177	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	14 Orang	14 Orang	16.200.000,00	16.200.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
178	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	244 Orang	244 Orang	27.000.000,00	27.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
179	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Doku men	1 Doku men	224.154.150,00	224.154.150,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
180	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	1 0	1 0	9.600.000,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
181	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.300.000,00	18.300.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
182	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.424.500,00	16.424.500,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
183	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	100 Orang	9.600.000,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
184	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	1 Dokumen	1 Dokumen	154.891.500,00	154.891.500,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
185	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	158.401.000,00	158.401.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
186	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	40 Orang	40 Orang	750.000,00	750.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
187	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	28.108.800,00	28.108.800,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
188	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	2.459.450,00	2.459.450,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
189	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	36.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
190	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	19.009.000,00	19.009.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	Puskesmas Atap						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
191	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	469.500.000,00	469.500.000,00	PAD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
192	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140 Orang	140 Orang	74.256.000,00	74.256.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
193	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1500 Orang	1500 Orang	95.660.000,00	95.660.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
194	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	20 Orang	29.520.000,00	29.520.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
195	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Orang	9 Orang	14.910.000,00	14.910.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
196	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	226.053.750,00	226.053.750,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
197	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.920.000,00	25.920.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
198	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.420.000,00	24.420.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
199	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Doku men	1 Doku men	26.940.000,00	26.940.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	300 Orang	300 Orang	11.760.000,00	11.760.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
201	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	1 Dokumen	1 Dokumen	70.750.000,00	70.750.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
202	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	154.037.600,00	154.037.600,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
203	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	25.920.000,00	25.920.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
204	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	16.464.000,00	16.464.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
205	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	17.160.000,00	17.160.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
206	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	67.120.000,00	67.120.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
207	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	14.922.400,00	14.922.400,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	Puskesmas Tanjung Harapan						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
208	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	288.577.707,00	288.577.707,00	PAD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
209	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 Orang	65 Orang	122.290.000,00	122.290.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
210	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	611 Orang	611 Orang	31.800.000,00	31.800.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
211	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	11 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
212	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	66 Orang	66 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
213	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	144.075.000,00	144.075.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
214	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000,00	6.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
215	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
216	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.074.000,00	12.074.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
217	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	14 Orang	14 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
218	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	1 Dokumen	1 Dokumen	71.211.000,00	71.211.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
219	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	99.790.000,00	99.790.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
220	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	25.335.000,00	25.335.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
221	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
222	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
223	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	36.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
224	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Doku men	1 Doku men	11.782.000,00	11.782.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	Puskesmas Mansalong						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
225	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	755.367.000,00	755.367.000,00	PAD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
226	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	103.428.000,00	103.428.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
227	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	39.000.000,00	39.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
228	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	33.600.000,00	33.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
229	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
230	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	228.444.800,00	228.444.800,00	DAK Non Fisik-BOKKB-B OK
231	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	0 Dokumen	0 Dokumen	15.300.000,00	15.300.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-B OK
232	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0 Dokumen	22.500.000,00	22.500.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
233	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	26.940.550,00	26.940.550,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
234	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
235	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	0 Dokumen	0 Dokumen	49.745.450,00	49.745.450,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
236	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	0 Dokumen	0 Dokumen	110.702.000,00	110.702.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
237	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
238	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0 Dokumen	11.223.000,00	11.223.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
239	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	0 Dokumen	13.964.000,00	13.964.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
240	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	0 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
241	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan	0 Dokumen	0 Dokumen	42.000.000,00	42.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
242	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Doku men	0 Doku men	13.646.000,00	13.646.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	Puskesmas Binter						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
243	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136 Orang	136 Orang	393.886.415,24	0,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
244	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1044 Orang	1044 Orang	62.100.000,00	62.100.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
245	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	10 Orang	23.340.000,00	23.340.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
246	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7 Orang	7 Orang	12.960.000,00	12.960.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
247	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Doku men	1 Doku men	311.590.284,80	311.594.400,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
248	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Doku men	1 Doku men	16.740.000,00	20.340.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
249	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Doku men	2 Doku men	15.960.000,00	25.740.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
250	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Doku men	3 Doku men	50.850.000,00	59.040.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
251	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	10 Orang	12.240.000,00	23.760.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
252	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	4 Doku men	4 Doku men	44.983.500,00	65.525.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
253	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Doku men	1 Doku men	192.151.200,00	248.276.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
254	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Doku men	1 Doku men	17.472.000,00	37.060.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
255	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Doku men	2 Doku men	16.700.000,00	83.730.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
256	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Doku men	1 Doku men	21.240.000,00	21.240.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
257	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan	1 Doku men	1 Doku men	103.680.000,00	103.680.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
258	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Doku men	1 Doku men	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	Puskesmas Nunukan Timur						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
259	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	922.022.400,00	922.022.400,00	PAD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
260	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	354 Orang	354 Orang	61.776.000,00	61.776.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
261	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1619 Orang	1619 Orang	32.400.000,00	32.400.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
262	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8 Orang	8 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
263	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	10 Orang	10.800.000,00	10.800.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
264	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Doku men	1 Doku men	239.010.000,00	239.010.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
265	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Doku men	1 Doku men	31.950.000,00	31.950.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
266	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Doku men	1 Doku men	27.300.000,00	27.300.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
267	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Doku men	1 Doku men	36.500.000,00	36.500.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
268	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8 Orang	8 Orang	33.600.000,00	33.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
269	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	1 Doku men	1 Doku men	50.125.000,00	50.125.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
270	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Doku men	1 Doku men	114.346.000,00	114.346.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
271	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Doku men	1 Doku men	8.273.000,00	8.273.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
272	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Doku men	1 Doku men	17.101.000,00	17.101.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
273	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Doku men	3 Doku men	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
274	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Doku men	1 Doku men	32.400.000,00	32.400.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
275	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan	1 Doku men	1 Doku men	26.850.000,00	26.850.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
276	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Doku men	1 Doku men	5.183.000,00	5.183.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
	Puskesmas Binusan						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
277	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	83 Orang	83 Orang	46.176.000,00	46.176.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
278	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	653 Orang	653 Orang	8.400.000,00	8.400.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
279	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	16.200.000,00	16.200.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
280	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	6.600.000,00	6.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
281	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Doku men	1 Doku men	141.820.000,00	141.820.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
282	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Doku men	1 Doku men	12.000.000,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
283	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Doku men	1 Doku men	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
284	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Doku men	1 Doku men	27.450.000,00	27.450.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
285	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
286	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	1 Doku men	1 Doku men	45.240.000,00	45.240.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
287	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Doku men	1 Doku men	89.624.000,00	89.624.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
288	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Doku men	1 Doku men	17.800.000,00	17.800.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
289	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Doku men	1 Doku men	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
290	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Doku men	1 Doku men	10.800.000,00	10.800.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
291	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Doku men	1 Doku men	1.800.000,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	RUMAH SAKIT PRATAMA SEBUKU						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
292	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Doku men	1 Doku men	3.520.000.000,00	3.022.047.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
293	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Doku men	1 Doku men	0,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	RUMAH SAKIT PRATAMA KRAYAN						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
294	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	0 Doku men	0 Doku men	2.990.400.380,00	2.625.732.970,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
295	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	0 Doku men	0 Doku men	9.598.700,00	9.598.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	ersentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	9 Doku men	9 Doku men			
296	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25 Dok umen	25 Dok umen	684.894.000,00	543.283.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-			
297	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	657 Or ang/bu lan	657 Or ang/bu lan	108.320.742.331,00	101.158.581.976,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
298	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Doku men	5 Doku men	135.506.000,00	67.562.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
299	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulana n/Triwulanan/Sem esteran SKPD	31 Lap oran	31 Lap oran	74.472.000,00	37.510.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	0 doku men	0 doku men			
300	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lapo ran	1 Lapo ran	49.580.000,00	24.784.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
301	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lapo ran	1 Lapo ran	66.188.000,00	42.723.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	0 doku men	0 doku men			
302	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dok umen	24 Dok umen	29.810.000,00	14.940.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	24 Unit kerja in ternal	24 Unit kerja in ternal			
303	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	29.996.920,00	29.996.920,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
304	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	278.795.200,00	230.395.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
305	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	5 Paket	5 Paket	30.181.800,00	15.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
306	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	80.000.000,00	54.266.840,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
307	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
308	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Lap oran	50 Lap oran	270.564.000,00	135.250.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	24 Unit kerja internal	24 Unit kerja internal			
309	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Lap oran	12 Lap oran	1.026.540.150,00	1.026.540.150,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
310	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap oran	12 Lap oran	20.863.509.080,00	7.382.531.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	24 Unit kerja internal	24 Unit kerja internal			
311	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	60 Unit	295.836.870,00	262.892.790,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
312	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	30.000.000,00	21.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
313	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	15.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
314	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	3 Unit Kerja	416.137.500,00	103.108.900,00	DAU SG Bidang Kesehatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan RS milik pemerintah daerah yang terakreditasi nasional Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu	100 % 10,9 per 1.000 KH 158 per 10 0.000 KH	100 % 10,9 per 1.000 KH 158 per 10 0.000 KH			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia sarana, prasarana, Farmasi dan Alat kesehatan	24 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24 Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
316	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	5.027.210.000,00	3.542.790.000,00	DAU SG Bidang Kesehatan
317	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	6.344.420.000,00	0,00	DAU SG Bidang Kesehatan
318	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	0,00	6.344.420.000,00	DAU SG Bidang Kesehatan
319	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai	1 Unit	1 Unit	3.848.000.000,00	0,00	DAU SG Bidang Kesehatan
320	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai	1 Unit	1 Unit	0,00	4.047.500.000,00	DAU SG Bidang Kesehatan
321	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	315.000.000,00	1.565.600.000,00	DAU SG Bidang Kesehatan
322	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh	2 Unit	2 Unit	1.343.768.000,00	0,00	DAU SG Bidang Kesehatan

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
323	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh	2 Unit	2 Unit	0,00	3.493.734.000,00	DAU SG Bidang Kesehatan
324	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	2 Unit	2.188.333.500,00	1.921.954.830,00	DAU SG Bidang Kesehatan
325	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	1.636.127.630,00	1.611.127.630,00	DAU SG Bidang Kesehatan
326	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100 Unit	100 Unit	4.147.200.000,00	4.132.943.100,00	DAU SG Bidang Kesehatan
327	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	200 Unit	200 Unit	554.868.400,00	444.708.400,00	DAU SG Bidang Kesehatan
328	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	4 Unit	4 Unit	7.071.580.000,00	4.873.660.000,00	DAU SG Bidang Kesehatan
329	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	80 Paket	80 Paket	15.837.585.856,00	15.828.777.856,00	DAU SG Bidang Kesehatan
330	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	1 Laya nan	1 Laya nan	168.392.000,00	84.020.000,00	DAK Non Fisik-BOK KB
331	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas	92 Paket	92 Paket	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOK KB
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Visit Rate Puskesmas	100 persen	100 persen			
332	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3887 Orang	3887 Orang	416.275.694,00	320.699.694,00	DAU SG Bidang Kesehatan
333	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4069 Orang	4069 Orang	582.410.000,00	417.844.000,00	DAU SG Bidang Kesehatan
334	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3700 Orang	3700 Orang	456.136.220,00	450.736.220,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
335	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12695 Orang	12695 Orang	303.105.100,00	200.691.700,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
336	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21800 Orang	21800 Orang	699.009.790,00	505.447.790,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
337	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37000 Orang	37000 Orang	754.871.620,00	664.671.620,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
338	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	5730 Orang	5730 Orang	653.852.042,00	563.444.017,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
339	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5997 Orang	5997 Orang	29.900.000,00	17.040.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
340	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1382 Orang	1382 Orang	51.791.660,00	36.401.660,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
341	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	314 Orang	314 Orang	46.722.500,00	45.089.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
342	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6170 Orang	6170 Orang	63.535.000,00	36.325.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
343	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2441 Orang	2441 Orang	96.840.000,00	87.120.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
344	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Doku men	1 Doku men	87.454.500,00	47.908.500,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
345	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Doku men	1 Doku men	50.999.000,00	26.590.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
346	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Doku men	1 Doku men	316.999.000,00	232.755.000,00	DAU SG Bidang Kesehatan
347	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Doku men	1 Doku men	153.680.500,00	107.035.300,00	DAU SG Bidang Kesehatan
348	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Doku men	1 Doku men	416.476.000,00	370.120.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Bagi Hasil (DBH)
349	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Doku men	1 Doku men	297.124.200,00	297.124.200,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
351	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Doku men	1 Doku men	150.652.000,00	126.592.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Bagi Hasil (DBH)
352	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	59.613.930,00	59.613.930,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
353	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Doku men	1 Doku men	37.317.000,00	19.405.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
354	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	1 Doku men	1 Doku men	176.547.500,00	92.684.000,00	DAU SG Bidang Kesehatan
355	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Doku men	1 Doku men	20.262.000.000,00	20.262.000.000,00	DAU SG Bidang Kesehatan
356	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan	100 Orang	100 Orang	34.999.250,00	13.993.045,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
357	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	199.152.000,00	199.152.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
358	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Doku men	1 Doku men	211.559.055,00	156.739.055,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
360	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Doku men	1 Doku men	90.443.680,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
361	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Doku men	1 Doku men	0,00	86.241.878,00	DAU SG Bidang Kesehatan
362	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Doku men	2 Doku men	633.527.250,00	633.527.250,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Bagi Hasil (DBH)
363	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	21 Unit	21 Unit	146.978.000,00	72.956.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
364	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Lapo ran	1 Lapo ran	38.260.000,00	19.130.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
365	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang	2.340.000,00	2.340.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
366	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	100 Orang	2.340.000,00	2.340.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
367	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	505 Orang	505 Orang	46.980.000,00	23.450.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
368	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tata nan	7 Tata nan	25.200.000,00	15.120.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
369	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Doku men	1 Doku men	49.950.000,00	49.950.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
370	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Doku men	1 Doku men	119.723.000,00	119.723.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas secara	33 persen	33 persen			
371	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Doku men	5 Doku men	894.170.000,00	554.087.000,00	DAU SG Bidang Kesehatan
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah sakit kelas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang teregister	23 Unit	23 Unit			
373	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.025.988.000,00	683.260.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang memenuhi standart kualifikasi	100 Persen	100 Persen			
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemberian Izin dan Rekomendasi Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen			
374	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	19.942.000,00	19.942.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Bagi Hasil (DBH)
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendencygunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kerja Internal yang direncanakan Sumberdaya Manusia Kesehatan	24 Unit kerja internal	24 Unit kerja internal			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
375	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10 Dokumen	10 Dokumen	23.536.000,00	23.536.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
376	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	92.357.000,00	74.445.000,00	DAU SG Bidang Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit internal yang mendapatkan peningkatan kompetensi SDM	3 Puskesmas dan RSP	3 Puskesmas dan RSP			
377	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	9 Orang	9 Orang	1.517.735.600,00	1.144.271.600,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase PKRT yang diawasi	100 persen	100 persen			
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen pemberian izin dan rekomendasi Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	1 dokumen	1 dokumen			
378	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	95.008.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan Dana Bagi Hasil (DBH)
379	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	1 Dokumen	1 Dokumen	27.510.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen sertifikat PIRT yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen			
380	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	136.270.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
381	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Doku men	1 Doku men	44.174.300,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan	100 persen	100 persen			
382	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Doku men	1 Doku men	47.319.500,00	0,00	DAK Non Fisik- BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diterbitkan	0 Doku men	0 Doku men			
383	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan	1 Doku men	1 Doku men	22.380.462,00	12.180.462,00	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah	0 dokumen	0 dokumen			
384	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan n-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Unit	1 Unit	0,00	149.117.000,00	DAK Non Fisik- BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan Dana Bagi Hasil (DBH)
385	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan n-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Unit	1 Unit	90.658.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa yang melaksanakan STBM	94 Persen	94 Persen			
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen			
386	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	31.288.350,00	14.613.050,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kampanye GERMAS melalui Penggerakan Masyarakat	16 dokumen	16 dokumen			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
387	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5 Dokumen	5 Dokumen	49.790.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
388	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	26.060.000,00	DAU SG Bidang Kesehatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang melakukan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	19 Kecamatan	19 Kecamatan			
389	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	161.144.450,00	134.162.850,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan	0.35	0.35			
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian	9 OPD	9 OPD			
390	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1 Dokumen	1 Dokumen	45.591.750,00	45.591.750,00	DAK Non Fi sik-BO KKB-B OKB Dana Bagi Hasil (DBH)
391	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	53.991.760,00	30.521.740,00	DAU SG Bidang Kesehatan
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang memiliki data lengkap terkait program KKBPK/Bangga Kencana	21 kecamatan	21 kecamatan			
392	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.150.000,00	0,00	DAK Non Fi sik-BOKKB-BOKB
393	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	DAK Non Fi sik-BOKKB-BOKB
394	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	144,000,000.00	144,000,000.00	DAK Non Fi sik-BO KKB-B OKB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	71,53 %	71,53 %			
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi dan KIE melalui Media, audien, dan momentum Bangsa Kencana	8 stakholder	8 stakholder			
396	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	2 Laporan	462,035,650.00	281,814,840.00	DAK Non Fisik-BOKKB-B OKB Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
397	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	333.000.000,00	333.000.000,00	DAK Non Fi sik-BO KKB- B OKB
398	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	8 Laporan	8 Laporan	140.000.000,00	140.000.000,00	DAK Non Fi sik-BO KKB- B OKB
399	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	DAK Non Fi sik-BO KKB- B OKB
401	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Orga nisasi	1 Orga nisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	DAK Non Fi sik-BO KKB- B OKB
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB (PKBdanPLKB)	25 org	25 org			
402	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1 Orang	1 Orang	1.241.520.000,00	1.241.520.000,00	DAK Non Fi sik-BO KKB- B OKB Dana Alokasi Umum (DAU)
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
403	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	1 Lapo ran	1 Lapo ran	31.500.000,00	31.500.000,00	DAK Non Fi sik-BO KB- KB
404	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1 Orang	1 Orang	392.741.998,00	392.741.998,00	DAK Non Fi sik-BO KB- KB Dana Alokasi Umum (DAU)
405	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	-
407	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Lapo ran	1 Lapo ran	77.877.620,00	40.528.320,00	DAU yang D itentuk an Pen gguna anny a Bidang Keseh atan
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholder, pemangku kepentingan perangkat daerah dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program	5 stakh older	5 stakh older			
409	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung	40 Unit	40 Unit	225.500.000,00	225.500.000,00	DAK Non Fi sik-BO KKB- B OKB

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
410	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	1 Kampung	1 Kampung	117.600.000,00	117.600.000,00	DAK Non Fi sik-BO KB- KB
	PROGRAM PEM BERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pelayanan KIE kemitraan/lemb	0.51	0.51			
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan Kethanan dan Kesejahteraan kelaurga	20 kali	20 kali			
413	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	1 Unit	1 Unit	91.000.000,00	91.000.000,00	DAK Non Fi sik-BO KB- KB
414	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	1 Laporan	1 Laporan	75.512.540,00	39.288.500,00	DAK Non Fi sik-BO KKB- B OKB
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan Kethanan dan Kesejahteraan kelaurga	5 organisasi	5 organisasi			
415	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	10 laporan	747.000.000,00	747.000.000,00	DAK Non Fi sik-BO KB- KB
416	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang	10 laporan	10 laporan	896.400.000,00	896.400.000,00	DAK Non Fi sik-BO KB- KB
	RSUD NUNUKAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	1	1			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mengelola BLUD	1 Unit kerja internal	1 Unit kerja internal			
417	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.670.000.000,00	0,00	Penda patan dari BLUD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			
418	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1 Laporan	1 Laporan	3.960.000.000,00	3.960.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
419	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	9.239.950.505,00	9.239.950.505,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
420	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	44.010.000.000,00	0,00	Penda patan dari BLUD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
421	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
422	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	15.320.000.000,00	68.000.000.000,00	Penda patan dari BLUD
	UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Rujukan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
423	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Doku men	1 Doku men	800.000.000,00	651.551.250,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	Puskesmas Nunukan						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
424	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	3.233.866.336,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
425	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	2 Unit Kerja	0,00	3.233.866.336,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
426	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	354 Orang	354 Orang	130.320.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
427	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	354 Orang	354 Orang	0,00	130.320.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
428	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7388 Orang	7388 Orang	79.800.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
429	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7388 Orang	7388 Orang	0,00	79.800.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
430	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	63 Orang	63 Orang	63.600.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
431	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	63 Orang	63 Orang	0,00	63.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
432	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	199 Orang	199 Orang	17.700.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
433	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	199 Orang	199 Orang	0,00	17.700.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
434	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	273.892.700,00	0,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
435	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	273.892.700,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
436	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.050.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
437	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	22.050.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
438	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.100.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
439	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	50.100.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
440	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	48.600.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
441	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	48.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
442	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang	7.200.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
443	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang	0,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
444	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	1 Dokumen	1 Dokumen	102.580.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
445	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	102.580.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
446	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	164.862.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
447	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	164.862.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
448	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	7.443.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
449	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.443.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
450	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	21.185.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
451	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	21.185.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
452	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1.350.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
453	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.350.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
454	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	29.700.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
455	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	29.700.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
456	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	10.222.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
457	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.222.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	Puskesmas Sedadap						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
458	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Bulan Unit Kerja	12 Bulan Unit Kerja	1.419.237.856,00	1.419.237.856,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
459	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	479 Orang	479 Orang	130.284.000,00	130.284.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
460	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4732 Orang	4732 Orang	108.000.000,00	108.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
461	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	1340 Orang	1340 Orang	14.400.000,00	14.400.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
462	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6 Orang	6 Orang	14.400.000,00	14.400.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
463	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	225 Orang	225 Orang	9.900.000,00	9.900.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
464	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	256.696.000,00	256.696.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
465	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
466	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.700.000,00	35.700.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
467	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.600.000,00	40.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
468	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25547 Orang	25547 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
469	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	1 Dokumen	1 Dokumen	76.627.000,00	76.627.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
470	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	144.010.000,00	144.010.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
471	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3 Orang	3 Orang	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
472	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	15.744.000,00	15.744.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
473	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1919 Dokumen	1919 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
474	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	39.900.000,00	39.900.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
475	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	16.803.000,00	16.803.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	Puskesmas Setabu						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
476	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	926.216.000,00	926.216.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
477	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	220 Orang	220 Orang	91.454.000,00	91.454.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
478	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1600 Orang	1600 Orang	59.400.000,00	59.400.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
479	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8 Orang	8 Orang	9.600.000,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
480	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16 Orang	16 Orang	10.800.000,00	10.800.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
481	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	244.605.920,00	244.605.920,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
482	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.400.000,00	20.400.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
483	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0 Dokumen	14.700.000,00	14.700.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
484	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.600.000,00	12.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
485	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8 Orang	8 Orang	1.800.000,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
486	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	1 Dokumen	1 Dokumen	112.088.480,00	112.088.480,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
487	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	118.983.000,00	118.983.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
488	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	220 Orang	220 Orang	695.520,00	695.520,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
489	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	14.185.080,00	14.185.080,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
490	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
491	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	0 Dokumen	0 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	PUSKESMAS Sei. Taiwan						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
493	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	485.735.368,00	485.735.368,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
494	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	117 Orang	117 Orang	53.599.200,00	53.599.200,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
495	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1318 Orang	1318 Orang	66.000.000,00	66.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
496	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	11 Orang	14.400.000,00	14.400.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
497	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	150 Orang	150 Orang	11.550.000,00	11.550.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
498	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	197.619.600,00	197.619.600,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
499	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	9.600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	19.500.000,00	19.500.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
501	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.256.000,00	14.256.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
502	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	11 Orang	11 Orang	5.700.000,00	5.700.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
503	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	1 Dokumen	1 Dokumen	86.649.000,00	86.649.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
504	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	91.032.440,00	91.032.440,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
505	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang	2 Orang	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
506	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	15.787.800,00	15.787.800,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
507	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
508	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	1 Dokumen	39.000.000,00	39.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
509	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	13.497.560,00	13.497.560,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	Puskesmas Sungai Nyamuk						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
510	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.288.870.465,00	1.288.870.465,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
511	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	298 Orang	298 Orang	115.760.000,00	115.760.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
512	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2988 Orang	2988 Orang	72.000.000,00	72.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
513	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2 Orang	2 Orang	23.400.000,00	23.400.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
514	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	141 Orang	141 Orang	7.350.000,00	7.350.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
515	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	224.420.000,00	224.420.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
516	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.900.000,00	12.900.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
517	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	46.500.000,00	46.500.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
518	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.750.000,00	24.750.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
519	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	2 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
520	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	4 Dokumen	4 Dokumen	92.690.000,00	92.690.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
521	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	122.335.200,00	122.335.200,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
522	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	43 Orang	43 Orang	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
523	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	16.800.000,00	16.800.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
524	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
525	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
526	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Doku men	1 Doku men	18.013.800,00	18.013.800,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	Puskesmas Sanur						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
527	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	873.979.286,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
528	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	210.024.500,00	210.024.500,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
529	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	81.000.000,00	81.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
530	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
531	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	20.400.000,00	20.400.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
532	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	292.533.450,00	292.533.450,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
533	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	0 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
534	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0 Dokumen	28.200.000,00	28.200.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
535	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
536	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0 Orang	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
537	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	0 Dokumen	0 Dokumen	152.996.000,00	152.996.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
538	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	0 Dokumen	0 Dokumen	151.639.700,00	151.639.700,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
539	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0 Dokumen	18.125.000,00	18.125.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
540	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	0 Dokumen	3.210.000,00	3.210.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
541	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	0 Dokumen	0 Dokumen	36.000.000,00	36.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
542	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Doku men	0 Doku men	23.893.300,00	23.893.300,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
543	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	873.979.286,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Puskesmas Binter						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
544	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136 Orang	136 Orang	0,00	197.508.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	Puskesmas Long Bawan						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
545	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	450.760.000,00	450.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
546	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	161 Orang	161 Orang	127.008.000,00	127.008.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
547	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1558 Orang	1558 Orang	44.880.000,00	44.880.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
548	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	10 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
549	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	137 Orang	137 Orang	25.800.000,00	25.800.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
550	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	214.852.000,00	214.852.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
551	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.100.000,00	35.100.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
552	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.720.000,00	22.720.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
553	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
554	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	10 Orang	24.000.000,00	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
555	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	1 Dokumen	1 Dokumen	102.665.000,00	102.665.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
556	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	151.674.200,00	151.674.200,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
557	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang	5 Orang	1.800.000,00	1.800.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
558	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	17.970.000,00	17.970.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
559	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	2.027.000,00	2.027.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
560	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	64.800.000,00	64.800.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
561	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	45.960.000,00	45.960.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
562	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	10.887.800,00	10.887.800,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	RUMAH SAKIT PRATAMA SEBATIK						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
563	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.950.000.000,00	3.254.756.410,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
564	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	0 Dokumen	0 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	UPT Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
565	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas	700000000 Paket	700000000 Paket	823.108.000,00	614.490.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
566	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	250000000 Dokumen	250000000 Dokumen	250.000.000,00	218.451.225,71	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Puskesmas Long Layu						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-			
567	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	385.555.072,00	385.555.072,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
568	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	130.555.200,00	130.555.200,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
569	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	97.380.000,00	97.380.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
570	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	19.820.000,00	19.820.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
571	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	1 Orang	34.380.000,00	34.380.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
572	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	270.081.500,00	270.081.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
573	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	3.300.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
574	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	23.560.000,00	23.560.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
575	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.152.295,00	9.152.295,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
576	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	1 Orang	14.260.000,00	14.260.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
577	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	1 Dokumen	1 Dokumen	60.747.705,00	60.747.705,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
578	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	135.208.400,00	135.208.400,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
579	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0 Dokumen	22.834.800,00	22.834.800,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
580	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	2.260.000,00	2.260.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
581	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.920.000,00	24.920.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
582	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	66.960.000,00	66.960.000,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
583	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	19.307.600,00	19.307.600,00	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	3 dokumen	3 dokumen			
584	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Doku men	2 Doku men	107.510.000,00	53.375.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
585	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 Lapo ran	2 Lapo ran	59.660.000,00	29.390.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
586	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lapo ran	4 Lapo ran	143.266.000,00	70.678.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50/14 Orang/Bulan	50/14 Orang/Bulan			
587	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	8.136.277.525,00	8.136.277.429,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Paket	4 Paket			
588	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	396.460.000,00	396.460.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
589	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	173.606.650,00	96.775.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
590	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	52.728.800,00	52.728.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
591	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	352.284.000,00	176.117.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	2 Unit	2 Unit			
592	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	86.000.000,00	86.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
593	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	4.345.000,00	4.345.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan			
594	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	2 Laporan	2 Laporan	186.996.000,00	186.996.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
595	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	4.438.782.272,00	4.046.247.680,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit	2 Unit			
596	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5 Unit	5 Unit	115.146.710,00	91.035.720,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
597	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	43.800.000,00	30.440.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
598	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi	1 Unit	1 Unit	155.000.000,00	115.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh	55,91 Persen 66,67%	55,91 Persen 66,67%			
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peserntase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan	55,91 %	55,91 %			
599	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,10 KM	0,10 KM	1.208.840.000,00	1.208.840.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
600	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	7 Unit	7 Unit	9.405.818.800,00	9.355.818.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
601	Normalisasi/Rest orasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisa si/Direstorasi	4,0 KM	4,0 KM	5.985.230.480,00	5.985.230.480,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
602	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0,1 KM	0,1 KM	802.000.000,00	802.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
603	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,65 KM	0,65 KM	2.284.944.900,00	2.034.944.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
604	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0,15 KM	0,15 KM	2.874.988.000,00	2.874.988.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
605	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,10 KM	0,10 KM	1.274.908.000,00	1.274.908.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
606	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,75 KM	0,75 KM	3.835.857.070,00	3.766.285.250,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
608	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah	1 Jaringan	1 Jaringan			
609	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,15 KM	0,15 KM	2.438.318.200,00	2.388.318.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
610	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang	0,03 KM	0,03 KM	410.000.000,00	410.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
611	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,05 KM	0,05 KM	350.050.100,00	350.050.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
612	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Doku men	2 Doku men	200.000.000,00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	74,19 Persen	74,19 Persen			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk berakses air minum	74,19 %	74,19 %			
613	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	20 Liter/Detik	20 Liter/Detik	500.000.000,00	500.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
614	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	20 Liter/Detik	20 Liter/Detik	5.624.040.520,00	5.570.477.060,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
616	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang	2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	PROGRAM PEN GEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	-			
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	-			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
618	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang	5 M³/Hari	5 M³/Hari	60.000.000,00	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	30,00 Persen	30,00 Persen			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	0.3	0.3			
619	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	700 M	700 M	5.340.000.000,00	5.305.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
620	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	500 Meter	500 Meter	1.585.000.000,00	1.585.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
622	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	810.000.000,00	810.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	PROGRAM PEN GEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-	-			
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
624	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang	3 Unit	3 Unit	515.000.000,00	515.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan publik yang terbangun	0.2	0.2			
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	0.2	0.2			
625	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	23 Dokumen	23 Dokumen	54.437.188.250,00	54.231.688.250,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
626	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui	30 Dokumen	30 Dokumen	415.102.040,00	372.685.390,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNG ANNYA	-	-	-			
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
627	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kaw asan	1 Kaw asan	5.630.000.000,00	5.630.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	PROGRAM PEN YELENGGARAAN JALAN	Indeks aksesibilitas Tingkat kemantapan jalan kabupaten	1.75 Indeks 58.23 Persen	1.75 Indeks 58.23 Persen			
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	58,23 %	58,23 %			
628	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	0 Dokumen	0 Dokumen	376.071.710,00	312.139.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
629	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	5 KM	5 KM	8.180.000.000,00	8.180.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
630	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	17 KM	17 KM	163.849.844.600,00	163.435.934.600,00	DAK Fisik-Bid ng Jalan-Penugasan-Jalan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
633	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	15 Jembatan	15 Jembatan	17.780.000.000,00	17.776.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
634	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	5 Jembatan	5 Jembatan	105.974.191,00	105.974.191,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
635	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	0 KM	0 KM	500.000.000,00	500.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
636	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	14 KM	14 KM	53.212.720.400,00	53.212.720.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
637	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4 KM	4 KM	3.255.000.000,00	3.255.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	PROGRAM PEN YELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen RTRW	0,8	0,8			
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan rinci tata ruang yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen			
638	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	749.991.950,00	632.476.760,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
639	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1.399.995.840,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
640	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang	1 Dokumen Layanan	1 Dokumen Layanan	449.996.030,00	56.858.240,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
641	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen Layanan	1 Dokumen Layanan	199.968.380,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
642	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	99.974.420,00	46.654.290,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	1	1			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen			
643	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4 Dokumen	4 Dokumen	110.206.475,00	52.171.855,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
644	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	21.398.300,00	14.303.880,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
645	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	101.244.000,00	30.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bln	12 bln			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
646	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	420 Orang/bulan	420 Orang/bulan	4.395.740.406,00	4.161.696.358,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Paket	4 Paket			
647	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	304.114.000,00	300.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
648	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	53.329.230,00	31.598.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
650	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	57.662.000,00	57.662.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan			
651	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	2 Laporan	2 Laporan	17.110.000,00	17.110.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
652	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	984.260.000,00	984.260.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit	2 Unit			
653	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	2 Unit	2 Unit	57.600.000,00	57.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
654	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	17.200.000,00	17.117.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
655	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	170.000.000,00	170.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0.7	0.7			
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah rumah korban Bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang terdata untuk mendapatkan bantuan	4 Dokumen	4 Dokumen			
656	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun,	4 Dokumen	4 Dokumen	56.121.290,00	27.905.730,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
657	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	49 Dokumen	49 Dokumen	71.593.680,00	38.963.810,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah rumah yang dibangun/rehab bagi korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	49 unit	49 unit			
658	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	22 Unit Rumah	22 Unit Rumah	572.047.280,00	542.377.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
659	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	27 Unit Rumah	27 Unit Rumah	0,00	70.011.120,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
660	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	27 Unit Rumah	27 Unit Rumah	89.131.120,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	jumlah koordinasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Laporan	1 Laporan			
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase berkurangnya jumlah rumah tidak layak	6.77 Persen	6.77 Persen			
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen infrastruktur kawasan permukiman	1 Kawasan	1 Kawasan			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
662	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	22.657.542,00	9.433.224,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah bangunan rumah dan kualitas infrastruktur kawasan permukiman yang	1 Kawasan	1 Kawasan			
663	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	40 Unit Rumah	40 Unit Rumah	883.795.850,00	872.742.232,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
664	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere majaan	10 Laporan	10 Laporan	61.862.400,00	25.570.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
665	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10 Ha	10 Ha	6.544.012.170,00	6.468.466.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-	-			
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	-			
666	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	3 Lokasi	0,00	14.731.419.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
667	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	3 Lokasi	14.929.478.360,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
668	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	12 Lokasi	12 Lokasi	3.569.498.240,00	3.564.903.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase penyelesaian konflik pertanahan	39.91 %	39.91 %			
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian konflik pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen			
669	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	816.347.310,00	699.102.770,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	-			
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
670	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	48.036.000,00	24.018.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
671	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	49.550.000,00	25.820.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
672	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	2.612.500,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase pelayanan izin terbit	0.7	0.7			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Izin mem- buka/Memanfatka n Tanah Yang Terbitkan dalam 1(satu) tahun	2 persen	2 persen			
673	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	0 Dokumen	0 Dokumen	196.730.245,00	106.148.235,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEN ATAGUNAAN TANAH	Persentase realisasi TORA	0.7	0.7			
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penatagunaan Tanah yang terlaksana dalam 1(satu) Tahun	100 Laporan	100 Laporan			
674	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu)	1 Laporan	1 Laporan	200.849.440,00	138.462.880,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pen ganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas yang disusun	31 Dokumen	31 Dokumen			
675	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	7 Dokumen	7 Dokumen	36.055.230,00	2.129.380,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
676	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	22 Laporan	22 Laporan	21.054.955,00	12.553.105,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
677	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	24.360.000,00	12.550.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	4 unit	4 unit			
678	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	14 Bulan Orang/ bulan	14 Bulan Orang/ bulan	15.133.080.776,00	14.450.353.355,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	4 unit	4 unit			
679	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	24.400.000,00	24.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	4 Unit	4 Unit			
680	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	61.934.000,00	61.934.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	4 unit	4 unit			
681	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	6.080.800,00	6.080.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
682	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.610.000,00	1.745.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
683	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Paket	28 Paket	89.146.270,00	64.192.660,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
684	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	24.613.605,00	24.613.605,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
685	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	170.446.000,00	84.874.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	4 unit	4 unit			
686	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	14.700.000,00	14.700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	4 unit	4 unit			
687	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	5 Lapo ran	5 Lapo ran	232.798.000,00	232.798.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
688	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap oran	12 Lap oran	8.913.657.464,00	8.896.207.464,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	4 unit	4 unit			
689	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	6 Unit	6 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
690	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	940.342.794,00	806.287.944,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
691	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	13.600.000,00	9.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
692	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi	3 Unit	3 Unit	249.896.050,00	248.002.070,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
693	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi	3 Unit	3 Unit	567.676.040,00	557.822.820,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
694	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan pemadaman, pencegahan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	88.46 Persen	88.46 Persen			
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian pencegahan, pemadaman dan penyelamatan yang dilaksanakan	141 kejadian	141 kejadian			
695	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah	50 Laporan	50 Laporan	35.639.565,00	17.647.610,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
696	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	7 Orang	7 Orang	107.682.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
697	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	20 Desa / Kelurahan	20 Desa / Kelurahan	22.144.600,00	19.594.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
698	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit	4 Unit	382.619.370,00	381.049.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah tempat dilakukan pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran	15 tempat	15 tempat			
699	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	15 Dokumen	15 Dokumen	33.505.570,00	18.194.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
700	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	5 Dokumen	5 Dokumen	5.745.590,00	3.369.440,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Investigasi Kejadian Kebakaran	jumlah investigasi kejadian kebakaran	50 kejadian	50 kejadian			
701	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	50 Dokumen	50 Dokumen	49.129.415,00	28.286.010,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan/sosialisasi dan edukasi masyarakat	8 lokasi	8 lokasi			
702	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						
		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4000Orang	4000Orang	38.515.130,00	27.768.770,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
703	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	7 Desa / Kelurahan	7 Desa / Kelurahan	90.974.150,00	66.622.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
704	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarpras Damkar	4 Dokumen	4 Dokumen	87.050.000,00	75.723.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang dilaksanakan	91 kali	91 kali			
705	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	91 Laporan	91 Laporan	92.889.250,00	52.078.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
706	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan	3 Laporan	3 Laporan	35.963.920,00	19.602.060,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
707	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan	7 Unit	7 Unit	578.773.000,00	557.417.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang	10 Dokumen	10 Dokumen			
708	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Dokumen	1 Dokumen	49.530.500,00	49.530.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
709	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	9 Laporan	9 Laporan	127.627.010,00	60.492.340,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	14 Bulan	14 Bulan			
710	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	79 Orang/bulan	79 Orang/bulan	10.269.993.602,00	9.406.799.521,29	Dana Alokasi Umum (DAU)
711	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	150 Dokumen	37.018.940,00	32.407.430,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
712	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	48.354.000,00	24.330.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
713	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	3 Laporan	3 Laporan	23.228.000,00	11.744.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian	5 Unit	5 Unit			
714	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
715	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	30.364.000,00	16.816.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
716	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	20 Orang	20 Orang	13.126.330,00	6.737.710,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5 Unit	5 Unit			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
717	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.290.680,00	6.290.680,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
718	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	35.285.670,00	27.057.670,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
719	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	37.908.410,00	24.635.480,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
720	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	151.518.000,00	80.442.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	20	20			
721	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	99.900.000,00	99.900.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan			
722	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	81.900.000,00	81.900.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
723	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.966.674.884,00	3.966.674.884,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan	16 Unit	16 Unit			
724	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	118.134.860,00	89.048.360,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
725	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	8.950.000,00	8.950.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
726	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	62.703.020,00	43.892.114,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 Persen	100 Persen			
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	500 Kasus	500 Kasus			
727	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	288.653.500,00	84.069.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
728	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	240 Dokumen	240 Dokumen	126.080.250,00	87.415.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
729	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Orang	25 Orang	239.308.200,00	172.381.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
730	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan	18 Dokumen	18 Dokumen	77.039.750,00	14.489.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
731	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	500 laporan	500 laporan	1.040.172.180,00	1.006.446.155,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
732	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	3 Laporan	3 Laporan	47.246.250,00	25.556.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
733	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang	4 Laporan	4 Laporan	45.133.500,00	29.567.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	8 Perda / Perkada	8 Perda / Perkada			
734	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	5 Laporan	5 Laporan	66.215.300,00	35.724.380,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
735	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	50 Laporan	50 Laporan	233.166.400,00	72.462.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
736	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	60 Laporan	60 Laporan	148.644.580,00	71.624.350,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2 Orang	2 Orang			
737	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak	2 Laporan	2 Laporan	130.374.000,00	85.104.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah berkualitas	4 Dokumen	4 Dokumen			
738	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Dokumen	1 Dokumen	82.462.070,00	62.608.860,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
739	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14.989.750,00	12.325.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
740	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	-
741	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.030.950,00	11.014.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
742	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	-
743	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	26.764.000,00	17.122.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
744	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	25.380.000,00	20.570.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	4 Unit	4 Unit			
745	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	5.276.554.694,00	5.051.689.454,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
746	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	8.700.300,00	6.830.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	4 Unit	4 Unit			
747	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	419.820.496,68	350.112.496,68	Dana Alokasi Umum (DAU)
748	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	165.435.667,10	104.505.086,40	Dana Alokasi Umum (DAU)
749	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	49.549.500,00	29.729.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
750	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan Laporan	25 laporan Laporan	200.100.000,00	60.734.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	4 unit	4 unit			
751	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	199.744.500,00	199.744.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
752	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	139.274.530,60	139.274.530,60	Dana Alokasi Umum (DAU)
753	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1 Unit	224.000.000,00	224.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	1	1			
754	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	127.754.736,00	127.754.736,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
755	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	1.300.302.320,00	1.208.082.320,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	4 Unit	4 Unit			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	18 Unit	18 Unit	351.143.400,00	245.725.490,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
757	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	39.530.000,00	27.640.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
758	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	-
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Upaya Penanggulangan Bencana Melalui Pelaksanaan Kegiatan Persentase upaya penanggulangan bencana melalui pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen			
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase upaya pelayanan informasi rawan bencana	1	1			
759	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	60 Orang	60 Orang	75.042.437,20	46.223.653,20	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase upaya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	1	1			
761	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	159.780.980,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
762	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	178.951.805,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
763	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	100 Unit	100 Unit	0,00	3.559.975.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
764	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	100 Unit	100 Unit	3.713.135.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
765	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana	50 Orang	50 Orang	0,00	16.219.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
766	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana	50 Orang	50 Orang	28.990.500,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
768	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	30 Keluarga	73.818.370,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
769	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi	1 Kawasan	1 Kawasan	0,00	18.661.370,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
770	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi	1 Kawasan	1 Kawasan	53.322.750,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
771	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal	10 Orang	10 Orang	0,00	31.625.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
772	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal	10 Orang	10 Orang	52.990.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
773	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	350.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
774	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
775	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	-
776	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	-
777	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat	1 laporan	1 laporan	0,00	229.452.730,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
778	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat	1 laporan	1 laporan	505.422.330,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
781	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	40 Ka wasan	40 Ka wasan	0,00	53.480.920,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
782	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	40 Ka wasan	40 Ka wasan	81.712.160,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) upaya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	1			
784	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	106.362.000,00	49.168.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
785	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	10 Orang	195.460.000,00	124.740.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
786	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	73.676.160,00	60.414.160,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
787	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	60 Orang	60 Orang	102.703.810,00	79.413.810,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
788	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	8 Orang	8 Orang	293.080.600,00	216.086.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
790	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	52.640.160,00	38.796.760,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase (%) upaya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1	1			
791	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	40.330.000,00	9.162.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
792	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	17.380.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
795	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	30 Orang	30 Orang	170.558.270,00	68.357.270,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
796	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	15 Orang	15 Orang	54.167.310,00	38.231.310,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
797	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	42.801.000,00	42.801.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
798	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1 Lembaga	1 Lembaga	94.767.697,00	94.767.697,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
799	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	1 Laporan	78.942.630,00	64.827.103,60	Dana Alokasi Umum (DAU)
800	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	129.754.710,00	89.079.530,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
801	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1	1 Dokumen	1 Dokumen	83.798.220,00	83.798.220,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
802	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu)	1 Dokumen	1 Dokumen	4.105.150,00	4.105.150,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
	PROGRAM PEM BERDAYAAN SOSIAL	Cakupan pelayanan pemberdayaan sosial	0.5	0.5			
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KAT yang diberdayakan	1 KAT	1 KAT			
803	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	10 Keluarga	10 Keluarga	282.974.720,00	215.173.740,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi			
804	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	1 Dokumen	6.333.800,00	3.869.030,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	21 Orang	21 Orang			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
805	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	11 Orang	11 Orang	260.228.000,00	252.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
806	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang	10 Orang	14.929.785,00	12.062.690,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
807	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	10 Keluarga	2.243.310,00	1.388.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
808	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan	5 Lem baga	5 Lem baga	7.106.150,00	4.056.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	-	-			
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke	12 Orang	12 Orang			
809	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	12 Orang	12 Orang	68.508.000,00	50.754.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	-			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	232 Orang	232 Orang			
810	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	60 Orang	60 Orang	93.907.792,00	84.996.792,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
811	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	19 Orang	85.322.000,00	62.552.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
812	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	4 Orang	4 Orang	67.342.266,00	46.316.266,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
813	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	20 Orang	20 Orang	70.180.000,00	40.090.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
814	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	12 Orang	12 Orang	37.140.000,00	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
815	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	55 Orang	16.091.470,00	5.232.670,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
816	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	84.450.000,00	31.790.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
817	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	2 Orang	2 Orang	109.739.000,00	77.649.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	16 Orang undefinedun defined	16 Orang undefinedun defined			
819	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	3 Orang	3 Orang	82.018.000,00	49.528.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang	0.94	0.94			
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	undefined	undefinedun defined	undefinedun defined			
820	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	23.200.000,00	11.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
821	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan	5 Orang	5 Orang	43.922.000,00	22.001.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang valid Jumlah data fakir miskin yang valid undefined	20,000 Orang 20000 Orang undefinedun defined	20,000 Orang 20000 Orang undefinedun defined			
822	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	27626 Orang	27626 Orang	569.741.450,00	216.719.830,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
823	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	5714 Keluarga	5714 Keluarga	71.378.500,00	24.482.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
824	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	6091 Keluarga	6091 Keluarga	16.735.300,00	14.015.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
825	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan	30 Orang	30 Orang	72.460.000,00	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan tanggap darurat bencana undefined	100 % undefinedun defined	100 % undefinedun defined			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan Sosial yang ditangani undefined	1560 Orang undefined undefined	1560 Orang undefined undefined			
826	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan	5987 Orang	5987 Orang	67.013.650,00	40.413.650,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
827	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	5987 Orang	5987 Orang	82.560.000,00	64.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
828	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan	5 Unit	5 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
829	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	65 Orang	65 Orang	10.294.000,00	10.294.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
830	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan	495 Orang	495 Orang	59.869.400,00	30.773.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	0.9	0.9			
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara undefined	1 Kawasan undefined undefined	1 Kawasan undefined undefined			
832	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	61.072.400,00	53.976.080,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-			
833	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	5 Dokumen	4.850.450,00	2.889.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
834	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Laporan	6 Laporan	102.724.000,00	69.570.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan			
835	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	27/12 Orang/bulan	27/12 Orang/bulan	4.962.308.236,00	4.851.954.336,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-			
836	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	7.733.000,00	4.620.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
837	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	36.379.860,00	25.552.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
838	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.883.000,00	8.929.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
839	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	118.182.000,00	23.695.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
840	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
841	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	4 Laporan	4 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
842	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	13.250.000,00	9.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
843	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	795.391.488,00	724.044.960,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	12 Unit	12 Unit			
844	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	10 Unit	10 Unit	66.000.000,00	53.352.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
845	Pemeliharaan/Re rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi	1 Unit	1 Unit	340.000.000,00	255.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PEN GARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap APBD	1.05 Persen	1.05 Persen			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelembagaan Pe ngarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	20 Perangkat daerah	20 Perangkat daerah			
846	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan	1 Dokumen	1 Dokumen	52.049.530,00	47.118.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
847	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan	50 Orang	50 Orang	44.579.150,00	31.481.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat penguatan dan pengembangan	7 Lembaga	7 Lembaga			
848	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	25 Orang	25 Orang	38.608.000,00	34.530.000,00	Pajak Daerah
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Per 10.000 penduduk perempuan	2 Rasio	2 Rasio			
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	4 Orang	4 Orang			
849	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.896.350,00	13.094.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	2 Orang	2 Orang			
850	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	4 Orang	4 Orang	46.340.000,00	24.668.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	0.48	0.48			
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas keluarganya	50 Keluarga	50 Keluarga			
851	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	50 Dokumen	50 Dokumen	77.219.860,00	74.167.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	70 % undefined	70 % undefined			
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	20 SKPD	20 SKPD			
852	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang	15 Dokumen	15 Dokumen	99.207.200,00	88.894.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kecamatan Layak Anak	19.05%	19.05%			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PHA	2 Lembaga	2 Lembaga			
853	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi	2 Organisasi	46.837.350,00	36.862.760,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-			
854	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	40.968.100,00	25.958.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan terhadap Anak Per 10.000 anak	3 Rasio	3 Rasio			
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan kekerasan	8 Anak	8 Anak			
855	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	8 Orang	8 Orang	34.818.750,00	19.835.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
856	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	1 Dokumen	26.476.300,00	17.833.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja (LKPJ, LKJIP, SPIP dan LPPD)	4 Dokumen	4 Dokumen			
857	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	29.872.000,00	14.936.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan pangan)	87.52 Persen	87.52 Persen			
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan			
859	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	8.450.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
860	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah	2 Laporan	2 Laporan	9.162.000,00	9.162.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
861	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	146.468.500,00	115.797.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	14,0 ton	14,0 ton			
862	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	14 Ton	14 Ton	245.592.400,00	209.198.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganek aragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan			
863	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganek aragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganek aragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	100.362.240,00	54.641.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan yang	45,04 persen	45,04 persen			
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	cakupan daerah rentan rawan pangan yang ditangani Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/KOTA	5 kecamatan 1 Dokumen	5 kecamatan 1 Dokumen			
864	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.218.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan keamanan pangan segar	20 Persen	20 Persen			
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	5 lokasi	5 lokasi			
865	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	20.993.000,00	16.523.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
866	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	0 Dokumen	0 Dokumen	60.746.250,00	40.485.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja (LKPJ, LKJIP, SPIP dan LPPD)	4 Dokumen	4 Dokumen			
867	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	161.752.000,00	57.227.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
868	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	53.006.000,00	26.508.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-			
869	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	196 Orang / bulan	196 Orang / bulan	18.853.027.101,20	17.573.255.521,70	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket			
870	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	193.102.340,00	177.482.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
871	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	103.652.610,00	64.630.715,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
873	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	13 Laporan	120.820.000,00	66.597.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
874	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	195.000.000,00	195.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
875	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	27.720.000,00	19.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
876	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.682.013.920,00	2.608.791.840,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	6 unit	6 unit			
877	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	6 Unit	6 Unit	73.712.000,00	58.768.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	-			
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	-			
881	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	2.176.005.500,00	2.119.261.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-			
882	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0	0 0	0 0	161.379.000,00	65.875.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
883	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 laporan	1 laporan	126.538.780,00	126.538.780,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	-			
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	-			
	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-			
885	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B yang dikelola	0 Doku men	0 Doku men	162.948.000,00	134.864.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Dam Parit (Jaringan Irigasi) yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara Jumlah prasarana pertanian yang dibangun	undefined undefined 24 unit	undefined undefined 24 unit			
887	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	7 Unit	16.731.536.000,00	16.641.406.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
888	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	7 Unit	122.050.000,00	122.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
890	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1.455.006.000,00	1.418.529.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	-			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
891	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah	1 Lapo ran	1 Lapo ran	210.889.700,00	148.274.020,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
892	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Lapo ran	1 Lapo ran	146.072.000,00	74.664.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-			
893	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	166.285.140,00	118.417.670,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGG ULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Wilayah Yang Terkendali Bencana Pertaniannya	0.9	0.9			
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian di Kabupaten Nunukan	11000 ha	11000 ha			
894	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang	11000 Ha	11000 Ha	305.655.650,00	262.194.980,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Bidang Pertanian Yang	17,86 %	17,86 %			
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbina dan Terawasinya Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	18 laporan	18 laporan			
897	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	18 Laporan	18 Laporan	75.095.000,00	37.385.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penangkar yang Diawasi	6 Penangkar	6 Penangkar			
898	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	0	0 0	0 0	59.238.000,00	29.616.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-	-			
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	-			
899	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	10 Unit	199.999.980,00	126.210.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
900	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	23 Unit	23 Unit	789.999.500,00	337.263.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
902	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 Unit	3 Unit	99.999.400,00	54.085.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Terwujudnya pelayanan admisitrasi perkantoran yang berkualitas	80 persen	80 persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7 dokumen	7 dokumen			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
904	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	138.906.490,00	71.112.915,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
905	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 Laporan	5 Laporan	22.452.870,00	10.675.620,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal	7 unit	7 unit			
906	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	5.811.379.436,00	5.656.625.211,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal	7 unit	7 unit			
907	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	204.195.300,00	204.195.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
908	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	36.311.820,00	25.248.740,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
909	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.999.655,00	3.999.655,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
910	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan	147.967.000,00	114.927.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
912	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	74.350.000,00	74.350.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal	7 unit	7 unit			
913	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3 Laporan	3 Laporan	132.173.000,00	132.173.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
914	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	30 Laporan	935.038.240,00	920.861.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal	7 unit	7 unit			
915	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	1.468.123.800,00	1.458.643.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
916	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	27.800.240,00	20.409.040,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang disusun dan dilaksanakan	67 Persentase	67 Persentase			
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian muatan RPPLH Tersedianya dokumen pendukung RPPLH (Dokumen D3TLH)	10 Persentase 1 Dokumen	10 Persentase 1 Dokumen			
917	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	778.946.156,00	634.174.396,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Terhadap Baku Mutu Lingkungan (air dan Udara)	68 persen	68 persen			
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan	5 kawasan	5 kawasan			
918	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	345.641.869,00	316.879.374,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
919	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.429.999.680,00	1.105.867.580,00	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
920	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	306.614.000,00	268.708.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah areal	70 areal	70 areal			
921	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	21.310.200,00	10.916.000,00	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
922	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	1 Lokasi	1 Lokasi	19.612.500,00	10.067.500,00	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah areal	50 areal	50 areal			
923	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.026.250,00	18.737.750,00	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Penanganan RTH	100 persentase	100 persentase			
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan	2 kawasan	2 kawasan			
924	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Ha	105 Ha	8.149.073.621,94	8.135.345.582,00	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
926	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	28 Unit	28 Unit	1.940.522.736,00	1.939.836.616,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
927	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan	3 Unit	3 Unit	205.000.000,00	194.539.930,00	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pengendalian B-3 dan Limbah B-3	24 persentase	24 persentase			
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah limbah B-3	75 ton	75 ton			
928	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	9.598.000,00	4.196.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	13,33 persentase	13,33 persentase			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi perizinan	31 kegiatan	31 kegiatan			
929	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dok umen	12 Dok umen	45.132.000,00	25.416.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
930	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang Orang	4 Orang Orang	7.000.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
931	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	19 Badan Usaha	19 Badan Usaha	301.472.100,00	221.569.240,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase penetapan Hak MHA terkait PPLH	20 persen	20 persen			
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase pendampingan	20 persen	20 persen			
932	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan	2 Dokumen	2 Dokumen	53.119.990,00	26.281.640,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase SDM yang mengikuti pengembangan pelatihan/penyuluhan	100 persen	100 persen			
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan	100 persen	100 persen			
933	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	5 Dokumen	28.952.000,00	28.952.000,00	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
934	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku	25 Orang	25 Orang	49.984.270,00	24.360.020,00	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
935	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait lingkungan hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait lingkungan hidup	1 Lembaga	1 Lembaga	25.150.800,00	13.009.950,00	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan yang diterima oleh masyarakat	67 persen	67 persen			
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan	50 persen	50 persen			
936	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6 Entitas	6 Entitas	37.759.000,00	36.016.600,00	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan	100 persentase	100 persentase			
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan	100 persen	100 persen			
937	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang	3 Pengaduan	3 Pengaduan	24.605.230,00	16.098.320,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Terkelola	81 persenta e	81 persenta e			
	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Terkelola	81persen	81persen			
939	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah	4 Kelompok	4 Kelompok	8.115.360,00	4.917.495,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
940	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	1 Unit	119.229.880,00	119.229.880,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
941	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 Doku men	2 Doku men	8.519.160,00	1.871.375,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
942	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	18 Ton	18 Ton	68.528.380,00	48.130.720,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
943	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/T PSTkabupaten/ko ta atau TPA/TPST Regional	6811 Ton	6811 Ton	7.807.427.458,00	7.660.704.456,70	Dana Bagi Hasil (DBH)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	69,00 Persen	69,00 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang	5 dokumen	5 dokumen			
944	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	3 Dokumen	3 Dokumen	13.357.300,00	9.094.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
946	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	34.399.230,00	13.610.630,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	1 unit	1 unit			
947	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	5.238.845.439,00	5.408.157.164,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian	0 0	0 0			
948	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	65.186.000,00	25.447.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	1 unit	1 unit			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
949	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.720.320,00	4.720.320,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
950	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	587.452.442,00	267.970.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
951	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	94.381.210,00	54.591.960,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
952	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	8.506.300,00	8.506.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
953	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	250.016.000,00	130.317.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	1 unit	1 unit			
954	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
955	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	408.948.000,00	408.948.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
956	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	678.277.800,00	636.493.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	7 unit	7 unit			
957	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	91.073.050,00	82.904.340,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
958	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	18.250.000,00	8.250.000,00	Retribusi Jasa Umum
959	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	198.000.000,00	198.000.000,00	Insentif Fiskal Untuk Peningkatan Kinerja Tahun Sebelumnya
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP el Persentase kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Nunukan Persentase Anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 hari yg Memiliki KIA Persentase anak usia 0-17 tahun	100 Persen 100 75 Persen 75 Persen	100 Persen 100 75 Persen 75 Persen			
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang	4 Jenis	4 Jenis			
960	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen	19.385.000,00	10.685.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
961	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	3 Laporan	469.780.810,00	418.336.210,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan			
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase anak yang memiliki Akta Kelahiran	98.00 Persen	98.00 Persen			
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan	4 Jenis	4 Jenis			
963	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	21 Layanan	21 Layanan	133.209.640,00	74.435.480,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan			
964	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	46.053.750,00	43.862.550,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang memanfaatkan data administrasi kependudukan melalui PKS	5 OPD	5 OPD			
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan Data Kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian data base kependudukan yang akurat	1 Laporan	1 Laporan			
966	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.011.130,00	15.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
967	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	5 Dokumen	110.079.170,00	53.841.550,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang	21 Laporan	21 Laporan			
968	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi	1 Laporan	1 Laporan	78.049.700,00	47.404.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data penduduk tingkat kabupaten	1	1			
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Profil kependudukan	1 dokumen	1 dokumen			
969	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	15.125.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
970	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	15.125.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang	10 dokumen	10 dokumen			
971	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	61.322.000,00	26.434.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
972	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Laporan	4 Laporan	29.994.400,00	19.988.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
973	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4.840.000,00	4.840.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja			
974	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.412.613.494,00	4.483.767.517,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja			
975	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	2.998.160,00	2.998.160,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
976	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	16.785.450,00	14.961.760,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
977	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4.999.720,00	3.239.170,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
978	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	109.895.000,00	58.578.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
979	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.686.500,00	14.495.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja			
980	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	36.000.000,00	36.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja			
981	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1 Laporan	1 Laporan	29.724.000,00	29.724.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
982	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.570.000,00	4.570.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
983	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	603.211.632,00	582.211.632,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja			
984	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5 Unit	5 Unit	57.818.080,00	44.078.080,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase pengentasan desa Sangat tertinggal dan Desa Tertinggal	75,40 persen	75,40 persen			
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Yang Meningkatkan Statusnya Jumlah Desa Yang terfasilitasi Penataan, Kewenangan, kode , Sarana dan Prasarana	9 Desa 4 Desa	9 Desa 4 Desa			
985	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	9 Desa	9 Desa	40.067.600,00	22.343.950,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
986	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan	1 Desa	1 Desa	148.949.350,00	74.339.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
987	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan	2 Desa	2 Desa	69.039.750,00	21.712.050,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
988	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	3 Unit	3 Unit	21.262.000,00	10.660.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa	43,00 persen	43,00 persen			
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antara desa	Desa	Desa			
989	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	49.997.500,00	28.617.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
990	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam	2 Dokumen	2 Dokumen	30.102.000,00	15.050.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
991	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	2 Dokumen	74.392.400,00	51.017.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase administrasi pemerintahan desa yang	71,12 persen	71,12 persen			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	5 Desa	5 Desa			
992	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.447.000,00	11.447.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
993	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	13.480.000,00	5.665.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
994	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	69.132.250,00	34.132.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
995	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	40 Orang	200.557.140,00	99.489.140,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
996	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	8.932.000,00	8.932.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
997	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama	2 Dokumen	2 Dokumen	24.677.000,00	10.448.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
998	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	34.672.550,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
999	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	26.230.000,00	26.230.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	18.974.000,00	6.534.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1001	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	16.675.700,00	11.230.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1002	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	232 Orang	232 Orang	68.117.600,00	37.125.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1003	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	2 Laporan	2 Laporan	39.941.100,00	33.818.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1004	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	50.384.000,00	15.360.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEM BERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	48,63 persen	48,63 persen			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	50 LK D/LAD	50 LK D/LAD			
1005	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	2 Dokumen	2 Dokumen	1.120.134.000,00	1.096.480.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1006	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Lembaga	3 Lembaga	44.400.000,00	23.560.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1007	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	144.302.000,00	103.901.160,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1008	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	1.019.320.000,00	1.019.320.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	DINAS PERHUBUNGAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang	100 Persen	100 Persen			
1009	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	22.560.500,00	16.382.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1010	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Laporan	3 Laporan	21.496.000,00	5.474.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1011	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	13.648.000,00	7.775.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1012	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	7.463.721.960,00	7.917.528.454,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen			
1014	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	25.302.000,00	12.643.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen			
1015	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	14.997.950,00	14.997.950,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1016	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	465.016.160,00	465.016.160,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1017	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	440.175.730,00	300.720.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1018	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	90.923.000,00	45.304.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen			
1019	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	1.517.860.000,00	1.517.860.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1020	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.444.972.244,00	5.390.972.244,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen			
1021	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	6 Unit	6 Unit	240.124.510,00	178.190.030,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1022	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	99.959.000,00	64.695.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1023	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	611.703.020,00	461.703.020,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio ijin trayek angkutan darat	0.0005 16 Rasio	0.0005 16 Rasio			
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	100 persen	100 persen			
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan	7 Jenis	7 Jenis			
1025	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	89.030.000,00	83.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1026	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	251.248.000,00	149.012.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1027	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan	1 Unit	1 Unit	41.306.000,00	36.826.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1028	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	200 Unit	200 Unit	503.558.500,00	454.429.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang aktif	2 Unit	2 Unit			
1030	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit	109.604.000,00	78.460.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yg diuji KIR	639 Unit	639 Unit			
1031	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	1 Orang	46.180.000,00	44.286.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1032	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	550 Unit	550 Unit	22.900.000,00	10.270.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1033	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	550 Dokumen	550 Dokumen	24.976.000,00	24.976.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1034	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	9.988.173,00	6.172.609,08	Dana Bagi Hasil (DBH)
1035	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	1 Laporan	17.300.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1036	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	7 Unit	7 Unit	193.392.020,00	80.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1037	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	2 Laporan	75.673.000,00	30.620.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1038	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	8.310.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	100 Persen	100 Persen			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1040	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	163.019.000,00	39.949.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	15373 Orang	15373 Orang			
1041	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	10.180.000,00	4.890.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1042	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	253.728.000,00	235.710.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1043	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	3 Laporan	3 Laporan	52.452.150,00	28.659.690,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase layanan angkutan perairan	0.0011	0.0011			
	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Produktifitas Penumpang Angkutan Perairan	316433 Orang	316433 Orang			
1044	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	1.078.824.500,00	1.056.928.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Trayek Angkutan Perairan yang dikeluarkan	227 Ijin	227 Ijin			
1045	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	55.343.600,00	28.114.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kebutuhan Prasarana Perhubungan Perairan yang direhab atau dipelihara Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan yang	100 Persen 29 Unit	100 Persen 29 Unit			
1046	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang	1 Dokumen	1 Dokumen	69.107.310,00	36.390.130,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1047	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	7 Unit	7 Unit	316.186.640,00	230.689.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1048	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1 Laporan	1 Laporan	49.998.130,00	3.262.930,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang	10 Dokumen	10 Dokumen			
1049	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	10 Dokumen	10 Dokumen	19.958.130,00	18.772.440,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1050	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.304.220,00	3.011.770,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1051	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.975.530,00	2.727.910,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1052	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.997.310,00	2.701.030,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1053	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.985.430,00	2.681.560,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Ot onomi Khusus Aceh
1054	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Laporan	6 Laporan	35.671.040,00	19.862.880,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Penghasilan Aparatur	14 Bulan	14 Bulan			
1055	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	364 Orang / bulan	364 Orang / bulan	4.038.614.098,00	4.048.418.062,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan penyediaan kebutuhan barang/ jasa administrasi umum perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
1056	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	42.150.790,00	37.785.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1057	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	46.012.140,00	28.972.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1058	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	150.031.000,00	62.655.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan Oprasional penunjang perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			
1059	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	12.240.000,00	12.240.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1060	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	516.262.872,00	516.262.872,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Perkantoran	25 Unit	25 Unit			
1061	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	91.414.000,00	75.904.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi Khusus Aceh
1062	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	28.400.000,00	19.880.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 Persen	100 Persen			
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo Jumlah Konten Informasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	2 Laporan 3 Orang 5 Komunitas 5 Konten 4 Media 5 pemohon 2 Dokumen 50 Persentase 72 Persentase	2 Laporan 3 Orang 5 Komunitas 5 Konten 4 Media 5 pemohon 2 Dokumen 50 Persentase 72 Persentase			
		informasi dan komunikasi publik Persentase khalayak yang terpapar informasi					
1063	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam	2 Laporan	2 Laporan	11.330.000,00	6.710.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1064	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Komunitas	5 Komunitas	41.436.000,00	19.331.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1065	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan	5 Permohonan	5 Permohonan	181.931.000,00	131.035.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1066	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi	50 Persentase	50 Persentase	25.070.000,00	20.330.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1067	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai	4 Media	4 Media	306.800.000,00	212.580.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1068	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	5 Konten	5 Konten	145.745.000,00	130.871.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1069	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	3 Orang	3 Orang	55.256.000,00	32.628.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-	-			
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang memiliki situs web yang sesuai dengan standar	0.6	0.6			
1070	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain	1 Dokumen	1 Dokumen	182.941.750,00	150.749.850,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Publik dan Layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan	0.6	0.6			
1071	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	10 Aplikasi	10 Aplikasi	45.064.500,00	17.105.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
1072	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	1 Laporan	84.318.000,00	36.658.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1073	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	265.936.000,00	265.936.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1074	Koordinasi penyusunan dan/atau revisi arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	2 Dokumen	344.864.500,00	323.738.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1075	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	10 Aplikasi	10 Aplikasi	708.379.875,00	590.939.925,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1076	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	10 Aplikasi	10 Aplikasi	117.664.500,00	95.393.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1077	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	50 unit	50 unit	45.862.500,00	24.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1078	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	386.658.500,00	307.555.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1079	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Pelayanan Masyarakat	10 Layanan	10 Layanan	104.213.000,00	66.109.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1080	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	3 Program	3 Program	100.733,00	100.733,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1081	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 Aplikasi	4 Aplikasi	23.304.875,00	12.323.325,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1082	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	5.622.686.400,00	5.573.884.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	0.7	0.7			
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Statistik yang telah dilengkapi	29 dokumen	29 dokumen			
1083	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	29 Dokumen	29 Dokumen	272.299.815,00	164.809.396,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
	PROGRAM PEN YELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase keamanan informasi pemerintah	0.7	0.7			
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang Meng Implementasikan Keamanan Informasi	25 Jumlah	25 Jumlah			
1084	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	25 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	125.963.500,00	59.270.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
1085	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	115.822.185,00	49.338.350,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1086	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Laporan	6 Laporan	8.405.100,00	4.988.060,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja			
1087	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	24/12 Orang/bulan	24/12 Orang/bulan	4.626.503.915,80	4.626.503.915,80	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja			
1088	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	109.419.000,00	93.205.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1089	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	75.445.040,00	45.297.120,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1090	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	28.171.000,00	16.896.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1091	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	161.709.000,00	89.034.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan penyediaan Jasa Penunjang	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja			
1092	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1093	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1094	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	559.569.472,00	547.069.472,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan BMD	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja			
1095	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	26 Unit	26 Unit	124.278.950,00	112.419.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1096	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	13.000.000,00	9.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1097	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	120.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	17.37 Persen	17.37 Persen			
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Yang Diperiksa dan Diawasi Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Koperasi	25 Koperasi			
1098	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	81.612.780,00	46.818.520,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	13.66 Persen	13.66 Persen			
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Pemahaman Perkoperasian	30 Koperasi	30 Koperasi			
1099	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	30 Orang	66.406.300,00	35.788.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya	13.65 Persen	13.65 Persen			
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi Yang Diberdayakan dan Dilindungi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	55 Koperasi	55 Koperasi			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	13.41 Persen	13.41 Persen			
1101	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	91.634.665,00	60.486.650,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	5.79 Persen	5.79 Persen			
1103	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	102.336.520,00	59.011.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase fasilitasi (non) perizinan yang diterbitkan tepat waktu	1	1			
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Yang	2 Dokumen	2 Dokumen			
1104	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	29.720.000,00	13.840.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah SKA Yang Diterbitkan	100 Dokumen	100 Dokumen			
1105	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	100 Dokumen	100 Dokumen	40.219.855,00	25.310.050,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi layak/sehat	23.26 Persen	23.26 Persen			
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	1 Unit	1 Unit			
1106	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	47.976.000,00	22.976.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1108	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi	9 Dokumen	9 Dokumen	280.169.800,00	280.169.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Barang Beredar Yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan	2.21 Persen	2.21 Persen			
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Diawasi	23 Jenis Barang	23 Jenis Barang			
1109	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8 Laporan	8 Laporan	36.079.600,00	35.160.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1110	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	8 Laporan	8 Laporan	1.190.713.400,00	1.176.061.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian harga dan Stok barang kebutuhan pokok yang dilaksanakan	15 Kegiatan	15 Kegiatan			
1111	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)	10 Laporan	10 Laporan	46.209.200,00	29.480.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1112	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)	5 Laporan	5 Laporan	230.159.400,00	145.699.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk Bersubsidi yang disalurkan yang diawasi	3000 Ton	3000 Ton			
1113	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi	3 Laporan	3 Laporan	38.240.000,00	17.840.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEN GEMBANGAN EKSPOR	Ekspor bersih perdagangan	439.40 Miliar Rupiah	439.40 Miliar Rupiah			
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Dagang dan Misi Dagang Yang Diikuti Jumlah Pameran Dagang dan Misi Dagang Yang Diikuti	3 Jumlah Pameran/misi dagang 3 Jumlah Pameran/Misi Dagang	3 Jumlah Pameran/misi dagang 3 Jumlah Pameran/Misi Dagang			
1114	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	166.302.460,00	76.981.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1115	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	1Pelaku Usaha	1Pelaku Usaha	119.396.705,00	69.607.105,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1117	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	5 Produk	5 Produk	41.918.000,00	22.215.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTPP bertanda tera sah yang berlaku	65.00 Persen	65.00 Persen			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Ditera/Tera Ulang Dalam Tahun Berjalan Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	56,68 % 56,68 Persen	56,68 % 56,68 Persen			
1118	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	475 Unit	475 Unit	102.557.100,00	34.016.640,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1119	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang	13 Orang	13 Orang	52.037.600,00	18.649.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk unggulan daerah yang meningkat penjualannya	62.50 Persen	62.50 Persen			
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3 Jumlah Promosi/ Pemasaran	3 Jumlah Promosi/ Pemasaran			
1120	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1 UMKM	1 UMKM	49.999.960,00	23.088.475,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan Jumlah Sentra IKM	4.29 Persen	4.29 Persen			
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen			
1123	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8 Dokumen	8 Dokumen	37.960.000,00	9.470.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1125	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20 Dokumen	20 Dokumen	415.755.750,00	165.814.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan oleh instansi terkait	100 Persen	100 Persen			
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Verifikasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	11 Pelaku IKM	11 Pelaku IKM			
1126	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	7 Dokumen	7 Dokumen	37.655.380,00	18.891.520,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1127	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	7 Dokumen	7 Dokumen	40.475.380,00	20.161.520,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data IKM Produktif di Kabupaten	2.4 Persen	2.4 Persen			
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Informasi Lengkap dan Terkini	1 Dokumen	1 Dokumen			
1128	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	44.459.280,00	22.221.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen			
1129	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	5 Dokumen	20.088.800,00	773.520,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1130	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Laporan	4 Laporan	3.943.610,00	1.504.470,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	1 Unit	1 Unit			
1131	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.134.115.923,00	4.310.137.010,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Unit	1 Unit			
1132	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.672.990,00	1.672.990,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	4 Unit Kerja	4 Unit Kerja			
1134	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1.600.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			
1135	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	186.813.200,00	88.767.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1136	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	85.317.640,00	55.413.730,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1137	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lapo ran	1 Lapo ran	163.460.000,00	128.207.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1138	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Doku men	1 Doku men	213.670.000,00	213.670.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1139	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	145.800.000,00	145.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1140	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	30.180.000,00	18.550.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1141	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	508.417.440,00	555.220.320,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			
1142	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	9 Unit	9 Unit	79.453.800,00	67.232.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1143	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi	1 Unit	1 Unit	37.000.000,00	37.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEN GEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Penanam Modal / Pelaku Usaha	30 Persen	30 Persen			
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Terlaksananya Kajian Pengembangan Investasi	30 Dokumen	30 Dokumen			
1145	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	30 Dokumen	30 Dokumen	71.778.500,00	34.191.060,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten	2 Dokumen	2 Dokumen			
1147	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2 Daerah	2 Daerah	33.197.280,00	15.652.610,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal (PMDN dan PMA) Berskala	30 Investor	30 Investor			
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi dan Potensi Daerah yang Diikuti	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
1149	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	101.912.925,00	32.382.820,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Sangat Baik Indeks	Sangat Baik Indeks			
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha dan Non Usaha	200 Jumlah Izin	200 Jumlah Izin			
1151	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	169.453.705,00	37.360.260,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1152	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	48.726.610,00	25.479.080,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1153	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku	185 Kegiatan Usaha	185 Kegiatan Usaha	169.193.740,00	85.767.790,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepatuhan Penanam Modal terhadap Ketentuan Perizinan Berusaha	Sangat Baik Nilai	Sangat Baik Nilai			
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	14 Agenda	14 Agenda			
1156	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	133.613.400,00	111.517.540,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi Penanam Modal/Pelaku Usaha yang dapat diolah, dikaji dan dimanfaatkan	100 Persen	100 Persen			
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi	65 Dokumen	65 Dokumen			
1157	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	26 Dokumen	26 Dokumen	49.999.800,00	25.253.830,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang	8 Dokumen	8 Dokumen			
1158	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	41.639.240,00	28.510.260,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1159	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Laporan	6 Laporan	24.207.830,00	13.029.790,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi keuangan	1 Unit	1 Unit			
1160	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	27/14 Orang/ bulan	27/14 Orang/ bulan	4.137.708.911,40	4.230.748.124,40	Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi umum	1 Unit	1 Unit			
1161	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	174.449.630,00	174.449.630,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1162	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	79.947.475,00	75.117.475,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1163	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	15.247.925,00	15.247.925,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1164	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	22 Laporan	86.837.000,00	86.837.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	8 Laporan	8 Laporan			
1165	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	4 Laporan	4 Laporan	244.181.000,00	244.181.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1166	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	985.866.912,00	962.683.776,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	11 Unit	11 Unit			
1167	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	34.990.700,00	32.772.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1168	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	7.960.000,00	5.480.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1169	Pemeliharaan/Re rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi	1 Unit	1 Unit	320.000.000,00	258.554.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEN GEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	1	1			
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan pengembangan pemuda	2895 Orang	2895 Orang			
1170	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1171	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	50 Orang	50 Orang	36.174.000,00	36.174.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1172	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	5 Orang	73.783.000,00	73.783.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina	1 Organisasi	1 Organisasi			
1173	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2 LAPORAN Organisasi	2 LAPORAN Organisasi	400.000.000,00	400.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PEN GEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KE OLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	9 Cabor	9 Cabor			
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	3 Event	3 Event			
1175	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	6 Kegiatan	2.058.479.870,00	1.895.508.434,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	-			
1176	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	4 Dokumen Dokumen	4 Dokumen Dokumen	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
1177	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	1 Lembaga	699.689.730,00	699.689.730,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	PROGRAM PEN GEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan organisasi pramuka	1	1			
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi kepramukaan (kwarcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi			
1178	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	4275 Orang	4275 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
	PROGRAM PEN GEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase 10 pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	0.4	0.4			
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	1 Objek	1 Objek			
1179	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,	1 Objek	1 Objek	1.499.999.745,00	1.088.109.800,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1180	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	50 Orang	64.996.800,00	49.960.800,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			
1181	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembinaan kesenian yang dilakukan	1 Pembinaan	1 Pembinaan			
1182	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	5 Orang	5 Orang	14.986.800,00	14.973.300,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1183	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	25 Sertifikat	25 Sertifikat	24.995.000,00	24.995.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1184	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5 Lembaga	49.963.210,00	49.963.210,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah lokal	1	1			
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggalian dan pembinaan sejarah lokal	1 Sejarah	1 Sejarah			
1185	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	2 Orang	2 Orang	37.578.650,00	37.578.650,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1186	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit	1 Unit	15.135.800,00	15.116.600,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1187	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Doku men	1 Doku men	14.999.940,00	14.581.940,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	0.76	0.76			
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar Budaya yang sudah terkaji	5 Objek	5 Objek			
1188	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	6 Objek	6 Objek	26.449.510,00	26.449.510,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1189	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	5 Objek	36.877.350,00	25.496.500,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dikelola	5 Objek	5 Objek			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarannya	48,13 %	48,13 %			
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah	1 DTW	1 DTW			
1192	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	40 Orang	40 Orang	0,00	88.748.325,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1193	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	45 Orang	45 Orang	147.293.125,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1194	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	202.968.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1195	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	226.361.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	1 Destinasi	1 Destinasi			
1196	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan,	1 Lokasi	1 Lokasi	360.000.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1197	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan,	2 Lokasi	2 Lokasi	0,00	331.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1198	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan	5 Unit	5 Unit	383.307.570,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1199	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan	5 Unit	5 Unit	0,00	383.010.636,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1200	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	0,00	56.757.610,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1201	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	56.757.610,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan/pembinaan TDUP	1 Laporan	1 Laporan			
1202	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	50 Usaha	50 Usaha	0,00	35.430.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1203	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	84 Usaha	84 Usaha	56.413.100,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pelaksanaan pemasaran pariwisata	80 Persen	80 Persen			
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi/pemasaran pariwisata	2 Promosi	2 Promosi			
1204	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Kegiatan	12 Kegiatan	2.943.549.037,00	2.589.947.537,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1205	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	2 Promosi	105.999.910,00	94.071.125,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	41,74 %	41,74 %			
	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi insan kreatif yang tersedia	1 Ruang Kreatif	1 Ruang Kreatif			
1206	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	1 Unit	51.909.540,00	51.909.540,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina	15.72 Persen	15.72 Persen			
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	17 Sektor	17 Sektor			
1207	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	50 Orang	24.614.570,00	24.614.570,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi	1 Pelatihan	1 Pelatihan			
1209	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi	50 Orang	50 Orang	44.191.750,00	41.287.250,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang	9 Laporan	9 Laporan			
1210	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	9 Laporan	9 Laporan	35,311,700.00	22,915,020.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1211	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	17,723,530.00	10,555,710.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100 Persen	100 Persen			
1212	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	30 Orang / bulan	30 Orang / bulan	4,399,967,042.00	4,311,255,162.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek	53 Orang	53 Orang			
1214	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	4 Unit kerja	4 Unit kerja			
1215	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	54.943.140,00	54.943.140,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1216	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	86.339.170,00	86.339.170,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1217	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	98.530.670,00	72.050.730,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1218	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.662.800,00	3.351.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1219	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	252.634.000,00	126.295.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 unit kerja	4 unit kerja			
1220	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	153.228.000,00	153.228.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1221	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	46.400.000,00	38.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1222	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	304.418.336,00	342.458.336,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit kerja internal yang mendapatkan layanan Pemeliharaan BMD	4 unit kerja	4 unit kerja			
1223	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	62.590.200,00	45.577.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1224	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Tingkat pembinaan perpustakaan	24.55 Persen	24.55 Persen			
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan pelayanan perpustakaan	100 Persen	100 Persen			
1226	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar	30 Perpustakaan	30 Perpustakaan	54.259.405,00	27.579.950,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten	5 Kegiatan	5 Kegiatan			
1231	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	50.567.080,00	25.364.380,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1232	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	20 Orang	20 Orang	121.549.970,00	92.395.410,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1233	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	30 Lokus	30 Lokus	72.598.800,00	37.726.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah	0.50 Persen 0,5 persen	0.50 Persen 0,5 persen			
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah kegiatan pelestarian naskah kuno	100 Persen	100 Persen			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang dikelola sesuai dengan Standar Kearsipan	82.76 Persen	82.76 Persen			
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip OPD yang dikelola	21600 Arsip	21600 Arsip			
1235	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	21600 Berkas	21600 Berkas	89.394.460,00	49.509.570,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1237	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan	6 Laporan	6 Laporan	99.893.490,00	50.203.490,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten dan pemberdayaan kapasitas unit	1	1			
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip OPD yang dilindungi dan diselamatkan	100 Persen	100 Persen			
1240	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)	100 Arsip	100 Arsip	167.227.900,00	126.133.820,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat	10 Arsip	10 Arsip			
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase OPD yang melaksanakan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai dengan NSPK Persentase OPD yang melaksanakan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai dengan NSPK	8 persen 8 Persen	8 persen 8 Persen			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	4 OPD	4 OPD			
	DINAS PERIKANAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan perangkat daerah	1	1			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	1	1			
1243	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	5 Dokumen	80.267.250,00	19.937.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1244	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7 Laporan	7 Laporan	13.710.955,00	6.252.175,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1245	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	43.539.975,00	20.755.950,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-			
1246	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	28 Orang / bulan	28 Orang / bulan	4.038.005.495,00	3.522.181.307,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-			
1247	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	9.796.930,00	9.796.930,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1248	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	21.191.450,00	15.616.970,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1249	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	39.836.390,00	24.522.520,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1250	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	33.184.250,00	19.910.550,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1251	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	154.935.000,00	118.264.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			
1252	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3 Lapo ran	3 Lapo ran	32.700.000,00	32.700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1253	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap oran	12 Lap oran	782.673.488,00	683.311.360,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			
1254	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	83.681.570,00	71.146.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1255	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	19.500.000,00	13.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1256	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	60.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap	0.1	0.1			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan	1515 Unit	1515 Unit			
1257	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang	1 Dokumen	1 Dokumen	21.002.000,00	7.100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1258	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1509 Unit	1509 Unit	317.650.000,00	300.750.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1259	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	6 Unit	6 Unit	682.664.000,00	637.124.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan binaan kelompok nelayan	0.06	0.06			
1260	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Orang	10 Orang	79.431.710,00	47.476.260,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1261	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	10 Kelompok	21.540.000,00	19.050.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah data laporan pendaratan ikan	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan usaha perikanan yang diterbitkan	33,22 %	33,22 %			
1264	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	1923 Rekomendasi	1923 Rekomendasi	17.981.750,00	7.390.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan binaan kelompok pembudidaya	9,55 %	9,55 %			
1265	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan	10 Kelompok	10 Kelompok	131.871.050,00	91.285.180,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1266	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan	10 Kelompok	10 Kelompok	34.769.765,00	18.780.550,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1267	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	5 Kelompok	5 Kelompok	10.199.940,00	5.380.085,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1268	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	10 Kelompok	149.040.870,00	80.484.820,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendataan usaha perikanan budidaya yang diterbitkan	50 Rekomendasi	50 Rekomendasi			
1269	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	21.490.925,00	7.207.940,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah bantuan sarana dan prasarana budidaya	28 Unit	28 Unit			
1270	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	30.459.000,00	10.180.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1271	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	4 Unit	4 Unit	2.024.064.000,00	1.943.304.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1272	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan	10 Dokumen	10 Dokumen	30.388.000,00	30.388.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1273	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	24 Unit	24 Unit	880.260.000,00	839.940.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan kelompok nelayan dan pembudidaya	0.05	0.05			
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan perikanan yang di laksanakan	1 tahun	1 tahun			
1274	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	22.449.425,00	9.758.855,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1275	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	28.544.175,00	24.028.905,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Laju pertumbuhan konsumsi ikan	17,04 %	17,04 %			
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	-			
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan sistem pemasaran dan mutu hasil perikanan	5 kali	5 kali			
1277	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	69.683.600,00	42.800.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi gerakan memasy arakatkan makan ikan (GEMARIKAN)	5 kali	5 kali			
1278	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,066 Ton	0,066 Ton	121.910.275,00	101.618.115,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah Persentase dokumen rencana tenaga kerja daerah yang disusun	100 Persen persen	100 Persen persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang	1	1			
1280	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	65.921.690,00	10.523.380,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1281	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Laporan	6 Laporan	176.090.665,00	72.217.790,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
1282	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	12 Orang / bulan	12 Orang / bulan	5.429.114.282,00	5.635.641.988,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	1	1			
1283	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.555.210,00	15.555.210,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1284	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	115.773.725,00	83.598.090,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1286	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	80.148.000,00	67.811.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	1	1			
1287	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.530.000,00	3.530.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1288	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	102.360.000,00	102.360.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1289	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	728.489.632,00	720.160.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	1	1			
1290	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	10 Unit	10 Unit	69.984.000,00	59.837.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1291	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	22.010.000,00	15.710.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1292	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen rencana tenaga kerja daerah yang disusun	0	0			
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rencana tenaga kerja daerah 2022- 2027	0 Dokumen	0 Dokumen			
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100 % 44,67%	100 % 44,67%			
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	590 Orang	590 Orang			
1294	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	590 Orang	590 Orang	456.435.710,00	350.098.610,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	31,53 Persen	31,53 Persen			
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	130 Orang	130 Orang			
1295	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	130 Orang	130 Orang	26.310.285,00	17.317.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair / Bursa Kerja	50 Orang	50 Orang			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1296	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	50 Orang	54.023.590,00	37.190.080,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1297	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang	200 Orang	52.935.120,00	26.604.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB, LKS Biparti, Struktur skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	9,41 %	9,41 %			
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	2 Perusahaan	2 Perusahaan			
1298	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	2 Perusahaan	2 Perusahaan	62.326.940,00	48.260.440,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	5 Perk ara	5 Perk ara			
1299	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perk ara	5 Perk ara	154.866.590,00	88.827.870,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan PTB (Pembangunan Transmigrasi Baru)	14.29 %	14.29 %			
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan	1 Kawasan			
1300	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak	1 Dokumen	1 Dokumen	31.338.000,00	18.794.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEN GEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pengembangan kawasan transmigrasi	33.33 %	33.33 %			
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan permukiman Transmigrasi	1 Pemukiman	1 Pemukiman			
1301	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	175 Kepala Keluarga	175 Kepala Keluarga	61.976.925,00	54.114.935,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	SEKRETARIAT DAERAH						
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	1	1			
1303	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	120 Orang / bulan	120 Orang / bulan	19.149.957.338,00	19.149.957.338,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0.95	0.95			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1304	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	515.227.179,00	515.227.179,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	BAGIAN HUKUM						
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	100Persen	100Persen			
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas	0.9	0.9			
1305	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	500 Dokumen	367.989.640,00	156.334.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1306	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6 Kasus	6 Kasus	578.767.600,00	375.332.350,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1307	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	506 Dokumen	506 Dokumen	120.763.865,00	3.285.865,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN						
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	1	1			
	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten	Sangat Tinggi (4,21-Nilai	Sangat Tinggi (4,21-Nilai			
1308	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7 Dokumen	7 Dokumen	934.815.550,00	438.334.980,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1309	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	789.256.460,00	364.832.660,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah	0.9	0.9			
1310	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	4 Dokumen	65.179.670,00	59.067.670,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1311	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	4 Dokumen	4 Dokumen	49.536.000,00	45.558.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1312	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja	12 Laporan	12 Laporan	28.743.120,00	25.912.120,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	100 Persen	100 Persen			
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang terlaksana	0.9	0.9			
1313	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	43 Dokumen	43 Dokumen	13.507.807.500,00	12.979.517.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1314	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	3 Dokumen	599.026.000,00	556.931.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1315	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	2 Dokumen	4.049.470.000,00	3.966.812.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM						
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-			
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	-			
1316	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	164.695.500,00	72.713.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1317	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	10.641.418.865,00	10.330.782.115,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1318	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	14 Dokumen	14 Dokumen	209.134.000,00	110.538.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	-			
1321	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen	3 Dokumen	129.991.780,00	64.933.270,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1322	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	135.015.855,00	67.468.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1323	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	139.937.570,00	86.358.265,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Kebijakan Perekonomian dan SDA Serta Administrasi Pembangunan Yang	90 % undefined undefined	90 % undefined undefined			
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan undefined	95 % undefined undefined	95 % undefined undefined			
1324	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 laporan Dokumen	1 laporan Dokumen	59.569.550,00	51.627.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1325	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 laporan Laporan	1 laporan Laporan	66.534.000,00	41.788.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1326	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan Laporan	2 Laporan Laporan	554.712.560,00	404.858.060,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA						
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (Sistem informasi, SDM, kematangan UKPBJ) undefined	86 Indeks undefined undefined	86 Indeks undefined undefined			
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai SOP	1	1			
1327	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	70 Dokumen	70 Dokumen	247.256.520,00	123.345.120,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1328	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	20 Dokumen	20 Dokumen	517.488.000,00	407.687.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1329	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang	100 Orang	100 Orang	283.672.400,00	149.499.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	BAGIAN ORGANISASI						
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Penataan Organisasi	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman	1	1			
1330	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50 Dokumen	50 Dokumen	831.152.000,00	685.449.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1331	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	48 Laporan	48 Laporan	209.685.500,00	107.727.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1332	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan	12 Dokumen	12 Dokumen	349.977.000,00	283.064.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1333	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	29 Dok umen	29 Dok umen	399.974.250,00	170.367.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	BAGIAN UMUM						
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat	100 Persen 89/100Persen	100 Persen 89/100Persen			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	1	1			
1334	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	19.999.505,00	19.999.505,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1335	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	99.999.755,00	99.999.755,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.9	0.9			
1336	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	120 Do kumen	120 Do kumen	31.512.465,00	31.512.465,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	0.92	0.92			
1337	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	105.371.400,00	105.371.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1338	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	1.694.198.480,00	1.692.809.080,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1339	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	8 Paket	8 Paket	410.820.083,00	410.820.083,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1340	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	36 Paket	354.565.800,00	347.771.980,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1341	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	72.050.055,00	72.050.055,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1342	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	58 Laporan	58 Laporan	2.574.422.320,00	2.574.422.320,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1343	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8000 Dokumen	8000 Dokumen	87.791.000,00	87.791.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-			
1344	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	2.881.460.000,00	2.881.460.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0.95	0.95			
1345	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 La poran	800 La poran	51.250.000,00	51.250.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1346	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	50 Lap oran	50 Lap oran	2.960.454.000,00	2.960.454.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1347	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	45 Lap oran	45 Lap oran	8.023.174.040,00	7.728.474.040,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			
1348	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	12 Unit	12 Unit	535.628.146,00	535.628.146,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1349	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84 Unit	84 Unit	1.394.598.370,00	1.394.598.370,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1350	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 Unit	220 Unit	1.871.402.500,00	1.871.402.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1351	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi	5 Unit	5 Unit	1.747.429.125,00	1.747.429.125,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Fasilitasi Keruma htanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Keruma htanggaan Sekretariat	0.95	0.95			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1352	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	1.380.305.660,00	1.380.305.660,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1353	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	950.503.740,00	950.503.740,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1354	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket	28 Paket	237.672.800,00	237.672.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	1	1			
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	0.95	0.95			
1355	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	450 La poran	450 La poran	7.254.585.250,00	3.749.366.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1356	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi	210 La poran	210 La poran	2.885.734.230,00	2.885.734.230,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1357	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	210 La poran	210 La poran	749.883.500,00	686.613.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	1	1			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai	1	1			
1358	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	131.172.550,00	37.444.890,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1359	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	22.219.400,00	3.726.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1360	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	23.137.000,00	13.079.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1361	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.735,00	13.847.925,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1362	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	24.998.400,00	15.245.440,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1363	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	28.110.370,00	18.131.980,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	1	1			
1364	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	760 Do kumen	760 Do kumen	704.764.400,00	663.534.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1365	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	72.696.600,00	38.950.550,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	95 Persen	95 Persen			
1366	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	613.900.000,00	613.900.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1367	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	260.000.000,00	260.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1368	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	SEKRETARIAT DPRD						
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DPRD						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang	7 Dokumen	7 Dokumen			
1369	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Dokumen	1 Dokumen	255.214.325,00	193.501.640,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1370	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Laporan	6 Laporan	147.337.490,00	78.909.780,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang	12 Bulan	12 Bulan			
1371	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	31 Orang / bulan	31 Orang / bulan	4.496.012.891,00	4.516.577.666,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			
1372	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	32 Paket	108.000.000,00	108.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1373	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	31 Orang	160.024.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Umum	5 Dokumen	5 Dokumen			
1374	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	156.275.000,00	156.275.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1375	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	147.250.000,00	56.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1376	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Paket	120 Paket	1.613.594.934,00	1.557.016.114,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1377	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	214.222.000,00	107.242.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	31 Dokumen	31 Dokumen			
1378	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 Unit	27 Unit	833.204.000,00	467.554.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Layanan	4 Layanan			
1379	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	1.040.400.000,00	1.040.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1380	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.667.413.360,00	2.667.413.360,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Lapo ran	3 Lapo ran			
1381	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	27 Unit	27 Unit	497.082.000,00	497.082.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1382	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi	5 Unit	5 Unit	1.460.023.843,00	660.023.843,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1383	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi	5 Unit	5 Unit	1.066.364.800,00	1.066.364.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah dewan yang mendapatkan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	25 Orang	25 Orang			
1384	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang / Bulan	30 Orang / Bulan	16.825.040.775,00	16.825.040.775,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1385	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	150 Paket	725.540.000,00	725.540.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1386	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	30 Orang	30 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	2 Layanan	2 Layanan			
1387	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	90 Laporan	90 Laporan	342.241.000,00	342.241.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1388	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.027.907.000,00	1.027.907.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	0.93	0.93			
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan yang disahkan	2 Peraturan	2 Peraturan			
1389	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan	5 Dokumen	5 Dokumen	32.657.500,00	32.657.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1390	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	1.703.870.000,00	1.703.870.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1391	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang -Undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.535.430.100,00	1.533.372.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1392	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	25 Dokumen	25 Dokumen	269.125.000,00	269.125.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1393	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	63.725.000,00	63.725.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terlaksana	7 Dokumen	7 Dokumen			
1394	Pembahasan KUA dan PPAS	0	0 0	0 0	2.254.620.830,00	1.140.777.230,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1395	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	68.436.705,00	68.436.705,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1396	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	58.140.155,00	58.140.155,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1397	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	58.139.605,00	58.139.605,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1398	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	2 Dokumen	8.318.560,00	8.318.560,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1399	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	23.292.480,00	23.292.480,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pemerintahan yang dijalankan	60 Laporan	60 Laporan			
1400	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	10 Laporan	10 Laporan	56.567.165,00	56.567.165,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1401	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10 Laporan	10 Laporan	56.567.165,00	56.567.165,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1402	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10 Laporan	10 Laporan	56.567.165,00	56.567.165,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1403	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala	10 Dokumen	10 Dokumen	473.214.965,00	473.214.965,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas DPRD	25 Orang	25 Orang			
1405	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.993.572.000,00	993.096.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1406	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	5 Orang	316.678.920,00	316.678.920,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1407	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	42 Dokumen	42 Dokumen	23.512.500,00	23.512.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1408	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	23.512.500,00	23.512.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1409	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	779.195.000,00	779.195.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	75 Dokumen	75 Dokumen			
1410	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	52 Laporan	52 Laporan	1.660.274.840,00	839.360.840,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1411	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang	1 Dokumen	1 Dokumen	25.745.820,00	25.745.820,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1412	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	75 Dokumen	3.475.133.310,00	2.475.133.260,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan	1 Dokumen	1 Dokumen			
1413	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	93.091.820,00	93.091.820,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Rapat Fasilitasi Tugas DPRD	104 Rapat	104 Rapat			
1414	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	47 Dokumen	47 Dokumen	4.523.450.000,00	1.148.575.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1415	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	20.105.000,00	20.105.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1416	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.460.312.500,00	26.512.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1417	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	52 Dokumen	52 Dokumen	1.361.640.000,00	977.700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	PERENCANAAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	1	1			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	13 Dokumen	13 Dokumen			
1418	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	13 Dokumen	13 Dokumen	77.258.680,00	19.687.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1419	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Laporan	4 Laporan	67.338.480,00	14.823.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1420	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	130.682.800,00	37.383.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-			
1421	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	26 Orang / bulan	26 Orang / bulan	6.712.950.779,80	6.712.950.779,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-			
1422	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50 Paket	46.800.000,00	46.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1423	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	109.915.000,00	9.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-			
1424	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	101.000.000,00	101.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1425	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	524.314.500,00	524.314.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1426	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	154.966.210,00	117.582.820,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1427	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	64.716.575,00	54.829.775,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1428	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	364.812.000,00	260.594.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-			
1429	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	456.460.000,00	456.460.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1430	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	366.379.280,00	366.379.280,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			
1431	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	234.030.000,00	234.030.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1432	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	545.183.424,00	534.635.856,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			
1433	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	10 Unit	10 Unit	247.927.670,00	188.172.670,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1434	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	51.000.000,00	35.700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1435	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	495.000.000,00	435.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan	1	1			
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan Perda/Perkada	3 Dokumen	3 Dokumen			
1436	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	-
1437	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	46.642.700,00	38.056.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1438	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	22 Berita Acara	22 Berita Acara	49.947.650,00	29.924.150,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1439	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	120.231.400,00	93.839.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1440	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	420 Usulan	420 Usulan	397.248.300,00	209.620.580,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1441	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	1.550.530.110,00	1.222.230.430,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) berbasis elektronik yang data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD	3 RPD	3 RPD			
1442	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50 Orang	50 Orang	279.446.150,00	56.912.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen			
1443	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	51.162.600,00	27.980.580,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1444	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	662.037.500,00	424.130.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD	1	1			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen RENSTRA Terhadap RPJMD dan Dokumen Renja Terhadap RKPD Pada Perencanaan Pembangunan tahun berkenaan bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	1			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
1445	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	2 Dokumen	2 Dokumen	45.433.500,00	28.633.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1446	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30 Laporan	30 Laporan	40.652.460,00	15.016.130,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1447	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	28 Laporan	28 Laporan	75.330.000,00	73.060.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1448	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	28 Laporan	28 Laporan	52.678.000,00	14.005.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1449	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD	7 Dokumen	7 Dokumen	402.499.245,00	328.345.170,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1450	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	6 Laporan	6 Laporan	28.476.700,00	14.755.100,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1451	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	6 Laporan	6 Laporan	60.120.000,00	28.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1452	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	6 Laporan	53.605.200,00	17.139.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1453	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD	3 Doku men	3 Doku men	42.316.500,00	16.440.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1454	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	3 Lapo ran	3 Lapo ran	35.168.740,00	3.700.180,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1455	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	5 Lapo ran	5 Lapo ran	48.320.780,00	252.780,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
456	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Lapo ran	3 Lapo ran	30.054.850,00	24.230.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
457	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD)	3 Doku men	3 Doku men	47.586.000,00	31.949.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
458	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	3 Lapo ran	3 Lapo ran	30.034.940,00	10.422.280,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
459	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	5 Lapo ran	5 Lapo ran	102.284.520,00	95.159.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
460	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Lapo ran	3 Lapo ran	26.834.280,00	13.064.260,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen RENSTRA Terhadap RPJMD dan Dokumen Renja Terhadap RKPD Pada Perencanaan Pembangunan tahun berkenaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1	1			
461	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD)	2 Doku men	2 Doku men	38.114.260,00	26.262.355,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
462	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Lapo ran	5 Lapo ran	43.233.750,00	30.383.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
463	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Lapo ran	5 Lapo ran	93.724.000,00	49.980.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
464	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Lapo ran	5 Lapo ran	79.261.000,00	65.170.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
465	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD).	2 Doku men	2 Doku men	38.892.000,00	14.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
466	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Lapo ran	4 Lapo ran	34.619.590,00	2.349.050,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
467	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Lapo ran	4 Lapo ran	55.934.000,00	20.440.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
468	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Lapo ran	4 Lapo ran	40.973.250,00	14.436.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi	0.32	0.32			
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Lapo ran	1 Lapo ran			
469	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						
		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Lapo ran	1 Lapo ran	70.000.175,00	37.410.080,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	-			
470	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika						
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi	1 Doku men	1 Doku men	30.034.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	-			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
471	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Doku men	1 Doku men	210.000.055,00	269.996.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
472	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Lapo ran	2 Lapo ran	29.999.720,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	KEUANGAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang	8 Doku men	8 Doku men			
473	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Doku men	2 Doku men	109.455.500,00	9.573.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
474	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Lapo ran	6 Lapo ran	21.722.500,00	15.335.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	1 OPD	1 OPD			
475	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	54 Ora ng/bul an	54 Ora ng/bul an	14.774.264.925,00	14.774.264.925,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	1	1			
476	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.324.900,00	29.324.900,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
477	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	404.782.000,00	376.182.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
478	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	81.239.190,00	53.130.510,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
479	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.407.450,00	14.044.470,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
480	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Lapo ran	2 Lapo ran	77.966.350,00	101.561.350,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
481	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Lap oran	20 Lap oran	169.397.000,00	110.395.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	1	1			
482	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3 Lapo ran	3 Lapo ran	286.500.000,00	286.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
483	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lapo ran	1 Lapo ran	44.900.000,00	244.900.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
484	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapo ran	1 Lapo ran	1.045.169.952,00	1.045.169.952,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	20 Unit	20 Unit			
485	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	92.072.580,00	66.799.330,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
486	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi	1 Unit	1 Unit	305.000.000,00	105.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0.02	0.02			
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Dokumen Penganggaran dan Regulasi	1	1			
487	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Doku men	2 Doku men	231.729.735,00	37.370.235,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
488	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Doku men	2 Doku men	254.968.000,00	97.734.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
489	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Doku men	2 Doku men	1.077.178.200,00	974.266.420,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
490	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Doku men	2 Doku men	1.006.285.500,00	894.587.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
491	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Doku men	1 Doku men	282.487.105,00	90.587.105,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
492	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6 Doku men	6 Doku men	670.765.390,00	148.164.390,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
493	Pembinaan Perencanaan Panganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Panganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	51 Orang	51 Orang	874.692.530,00	262.452.530,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tertib Capaian Penerbitan SP2D dan Penyerapan Belanja Daerah	1	1			
494	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1000 D okume n	1000 D okume n	143.307.380,00	76.424.465,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
495	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	800 Do kumen	800 Do kumen	249.618.980,00	8.187.465,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
496	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	10000 Dokum en	10000 Dokum en	691.411.560,00	192.178.560,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
497	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	51 Orang	51 Orang	249.385.515,00	98.353.515,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusnya Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah dan Pembinaan Akuntansi	1	1			
498	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						
		Jumlah Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Lap oran	18 Lap oran	334.416.660,00	127.868.160,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
499	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Lapo ran	1 Lapo ran	654.075.595,00	278.355.595,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
500	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	433.434.920,00	194.400.920,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
501	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						
		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	2 Dokumen	2 Dokumen	320.324.500,00	128.852.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
502	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	38 Orang	38 Orang	91.796.000,00	91.796.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0.6	0.6			
503	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	295.349.184.881,07	295.201.753.881,07	Dana Bagi Hasil (DBH)
504	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	18.865.358.704,00	18.865.358.704,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Prosentase Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	1	1			
505	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	286.890.250,00	108.936.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	1	1			
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis BMD yang Terkelola	1	1			
506	Penyusunan Standar Harga						
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	385.952.465,00	247.747.465,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
507	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah						
		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik	1 Dokumen	1 Dokumen	9.067.025,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
508	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	50 Dokumen	50 Dokumen	9.923.430,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
509	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik	1 Doku men	1 Doku men	65.042.585,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
510	Penatausahaan Barang Milik Daerah						
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Lapo ran	2 Lapo ran	378.184.600,00	365.819.995,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
511	Inventarisasi Barang Milik Daerah						
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Lapo ran	1 Lapo ran	47.215.845,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
512	Pengamanan Barang Milik Daerah						
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Lapo ran	1 Lapo ran	795.400.870,00	377.638.760,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
513	Penilaian Barang Milik Daerah						
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	25 Lap oran	25 Lap oran	113.565.100,00	85.930.100,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
514	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Lapo ran	2 Lapo ran	21.824.550,00	13.536.050,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
515	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pe mindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pe mindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	50 Dok umen	50 Dok umen	568.799.890,00	506.525.890,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
516	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	50 Lap oran	50 Lap oran	99.734.480,00	62.363.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
517	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Lapo ran	2 Lapo ran	485.069.450,00	362.392.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
518	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	50 Orang	50 Orang	105.633.500,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	KEUANGAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat	2 dokumen	2 dokumen			
519	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	41.487.500,00	14.097.500,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
520	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Laporan	3 Laporan	7.837.500,00	4.702.500,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	24 dokumen	24 dokumen			
521	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang / bulan	31 Orang / bulan	7.057.436.970,90	7.125.511.164,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	4 laporan	4 laporan			
522	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	20.570.000,00	0,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
523	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 Paket	43 Paket	194.072.872,70	121.783.469,10	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
524	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	26 Paket	26 Paket	218.874.650,00	213.990.650,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
525	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	253.976.000,00	45.595.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2 laporan	2 laporan			
526	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	73.992.600,00	73.992.600,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
527	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	197.651.216,00	304.301.216,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	28 unit	28 unit			
528	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	21 Unit	21 Unit	59.830.561,00	44.340.003,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
529	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	23.550.000,00	16.502.500,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penerimaan dana transfer ke daerah	100 Persen	100 Persen			
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah koordinasi pengelolaan dana transfer ke	6 kali	6 kali			
530	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	200.171.000,00	52.798.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan pajak daerah	3 Persen	3 Persen			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah pajak daerah	18050 88079 1 Rp	18050 88079 1 Rp			
531	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	106.690.000,00	68.595.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
532	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	75.109.000,00	64.909.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
533	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	234.437.750,00	151.936.500,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
534	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	2 Unit	128.958.000,00	126.460.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
535	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak	5 Laporan	5 Laporan	100.845.000,00	45.372.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
536	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	69011 Laporan	69011 Laporan	151.197.000,00	92.709.500,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
537	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	5 Objek Pajak	5 Objek Pajak	95.187.000,00	95.187.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
538	Penetapan Wajib Pajak Daerah						
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	69131 Dokumen	69131 Dokumen	167.759.000,00	125.557.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
539	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	120 Layanan	120 Layanan	11.340.000,00	0,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
540	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						
541	Penagihan Pajak Daerah						
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	149.700.500,00	60.805.750,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
542	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	19.680.000,00	8.180.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
543	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	22 Dokumen	22 Dokumen	186.187.300,00	92.036.680,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
544	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi	7 Lapo ran	7 Lapo ran	110.570.300,00	58.171.680,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
545	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi	2 Lapo ran	2 Lapo ran	91.403.500,00	80.434.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	KEPEGAWAIAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			
546	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	23.497.540,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
547	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Laporan	6 Laporan	59.029.260,00	40.283.350,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	4 unit	4 unit			
548	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	38 Orang/ bulan	38 Orang/ bulan	5.862.161.882,00	5.411.721.586,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	4 unit	4 unit			
549	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	44.854.310,00	27.310.980,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
550	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	-
551	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	9 Laporan	170.525.000,00	85.483.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	4 unit	4 unit			
552	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3 Laporan	3 Laporan	320.536.000,00	320.536.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
553	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	391.144.800,00	391.144.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	4 unit	4 unit			
554	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	9 Unit	9 Unit	57.948.260,00	45.134.560,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
555	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	33.301.000,00	20.651.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
556	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi	4 Unit	4 Unit	499.280.519,00	393.255.869,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai dengan kualitas pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	183.85 Persen	183.85 Persen			
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Jenis Informasi Kepegawaian yang terupdate	3 Jenis	3 Jenis			
557	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	58.116.720,00	30.467.160,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
558	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	7 Dokumen	7 Dokumen	58.375.000,00	29.757.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
559	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN						
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	-
560	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	96 Dokumen	96 Dokumen	122.037.650,00	49.820.050,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
561	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	67.389.580,00	41.339.460,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
562	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	58.960.680,00	29.236.680,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
563	Pengelolaan Data Kepegawaian						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data	3 Dokumen	3 Dokumen	60.818.250,00	38.015.920,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah SK yang terbit	1362 SK	1362 SK			
564	Pengelolaan Mutasi ASN						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	300 Dokumen	300 Dokumen	85.397.650,00	49.828.150,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
565	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	832 Dokumen	832 Dokumen	64.847.210,00	31.359.730,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
566	Pengelolaan Promosi ASN						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	220 Dokumen	220 Dokumen	82.710.590,00	7.248.010,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	220 ASN	220 ASN			
567	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	170 Orang	170 Orang	338.151.660,00	326.217.010,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
568	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	2 Dokumen	44.048.150,00	42.785.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Jumlah ASN yang mendapat pembinaan dan	140 ASN 349 ASN	140 ASN 349 ASN			
570	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 Laporan	6 Laporan	1.105.831.270,00	984.355.070,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
572	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai						
		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	307 Orang	307 Orang	56.361.900,00	56.361.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
573	Pembinaan Disiplin ASN						
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60 Orang	60 Orang	30.454.360,00	30.454.360,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
574	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Lap oran	12 Lap oran	104.059.900,00	104.059.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	PROGRAM PEN GEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4,35 Persen 4,35 Persen	4,35 Persen 4,35 Persen			
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	120 ASN	120 ASN			
575	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang	100 Orang	1.664.922.430,00	582.486.140,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 ASN	45 ASN			
576	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	2 Laporan	2 Laporan	1.896.662.430,00	1.474.855.590,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH						
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Umum	12 bulan 1 paket 2 dokumen 5 unit kerja	12 bulan 1 paket 2 dokumen 5 unit kerja			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	4 Dokumen 4 Laporan	4 Dokumen 4 Laporan			
577	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	44.944.000,00	21.137.620,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
578	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	34.157.575,00	21.275.600,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselurnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Paket	1 Paket			
579	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	3.201.076.332,95	2.988.845.598,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Komponen Instalasi/Penerangan yang tersedia Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang disediakan Berdasarkan Klasifikasi BMD Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan	1 Paket 1 Laporan 7 Paket 1 Paket 1 Laporan 6 Unit	1 Paket 1 Laporan 7 Paket 1 Paket 1 Laporan 6 Unit			
581	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.450.000,00	7.000.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
582	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	40.101.300,00	21.624.130,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
583	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.121.650,00	6.013.700,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
584	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	255.252.400,00	149.357.800,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
585	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	248.359.000,00	117.921.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket 12 laporan 1 Paket	1 Paket 12 laporan 1 Paket			
586	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	7.800.000,00	7.800.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
587	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	17.400.000,00	14.020.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
588	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	486.752.640,00	433.592.640,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan/Service Jumlah PKB yang dibayarkan tepat waktu	1 Paket 6 Unit	1 Paket 6 Unit			
589	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5 Unit	5 Unit	29.778.360,00	29.708.480,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
590	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	PENGELOLAAN PERBATASAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Jumlah kecamatan yang dimonitoring kawasan perbatasan Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan dikawasan perbatasan jumlah wilayah perbatasan yang terkoordinir Jumlah laporan monitoring dan evaluasi di kawasan perbatasan Jumlah Fasilitasi kerjasama dan dokumen Perencanaan yang dilaksanakan Persentase pengelolaan kawasan perbatasan yang dilaksanakan	1 kecamatan 1 laporan 2 kegiatan 2 laporan 4 dokumen 65 %	1 kecamatan 1 laporan 2 kegiatan 2 laporan 4 dokumen 65 %			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Fasilitas Kerjasama dan Dokumen Perencanaan yang Dilaksanakan Dalam Kegiatan Sosek Malindo, OBP, BTA dan BCA Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Renaksi dan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan	4 Kegiatan 3 Dokumen	4 Kegiatan 3 Dokumen			
591	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	317.500.420,00	151.597.210,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
592	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan						
		Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	767.500.655,00	520.567.265,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemanfaatan kawasan perbatasan jumlah pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan jumlah tanda batas daerah yang terpelihara jumlah tanda batas negara yang	2 dokumen 2 kegiatan 2 laporan 1 laporan 4 laporan	2 dokumen 2 kegiatan 2 laporan 1 laporan 4 laporan			
593	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	2 Dokumen	14.996.350,00	8.091.205,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
594	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	2 Dokumen	17.999.665,00	11.051.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
595	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara						
		Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	4 Dokumen	4 Dokumen	321.999.935,00	190.334.685,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
596	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah						
		Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	1 Dokumen	1 Dokumen	18.060.000,00	9.940.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
597	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota						
		Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	24.999.925,00	12.672.000,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan Presentase hasil Monitoring dan Evaluasi yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	2 laporan 2 laporan	2 laporan 2 laporan			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
598	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen	107.038.000,00	74.020.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
599	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan						
		Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen	125.052.490,00	68.353.110,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	INSPEKTORAT DAERAH						
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
	INSPEKTORAT DAERAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 % Persen	100 % Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen			
600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	259.667.020,00	173.197.235,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
601	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Laporan	6 Laporan	71.698.500,00	71.698.500,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Keuangan	5 Unit	5 Unit			
602	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang / bulan	45 Orang / bulan	9.227.632.828,00	10.822.745.269,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian	5 Unit	5 Unit			
603	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	46 Orang	46 Orang	2.562.704.000,00	2.061.154.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	5 Unit	5 Unit			
604	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	1.884.856.610,00	1.570.514.690,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
605	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	83.000.910,00	49.154.060,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
606	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.378.025,00	5.166.815,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
607	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	299.728.000,00	35.544.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa Penunjang	5 Unit	5 Unit			
608	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	4 Laporan	4 Laporan	41.400.000,00	41.400.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
609	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	3.500.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
610	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	123.480.000,00	103.080.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan barang milik Daerah	5 Unit	5 Unit			
611	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	192.301.000,00	149.661.700,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	196 Laporan	196 Laporan			
613	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	34 Laporan	34 Laporan	825.060.500,00	233.000.500,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
614	Reviu Laporan Kinerja						
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	32 Laporan	32 Laporan	123.250.000,00	100.980.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
615	Reviu Laporan Keuangan						
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	68 Laporan	68 Laporan	842.453.000,00	100.768.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
616	Pengawasan Desa						
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	56 Laporan	56 Laporan	973.230.000,00	74.506.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
617	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	6 Dokumen	678.937.000,00	479.510.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan	15 Laporan	15 Laporan			
618	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	15 Laporan	600.063.000,00	306.411.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PE NDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-	-			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-	-			
619	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	40 OPD	40 OPD			
621	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	767.819.980,00	328.229.400,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
622	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	31 perangkat daerah	31 perangkat daerah	610.044.000,00	360.967.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
623	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	246.712.000,00	173.416.000,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
624	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	599.003.600,00	302.772.418,00	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD)
	KEC. NUNUKAN						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	1	1			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			
625	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	6 Dokumen	6 Dokumen	5.499.560,00	4.119.720,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
626	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Laporan	6 Laporan	9.499.780,00	7.490.980,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5 Unit	5 Unit			
627	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	76 Orang / bulan	76 Orang / bulan	8.864.720.345,00	8.995.700.574,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen			
628	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	143Unit	143Unit	59.500.000,00	59.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	5 Unit	5 Unit			
629	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	10.384.440,00	10.384.440,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
630	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	302.465.000,00	209.665.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
631	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	118.835.200,00	83.862.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
632	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10Paket	10Paket	38.094.430,00	22.856.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
633	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	206.196.000,00	72.830.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5 Unit	5 Unit			
634	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	220.872.000,00	220.872.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
635	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.544.420.000,00	1.468.580.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5 Unit	5 Unit			
636	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	18 Unit	18 Unit	59.893.440,00	46.167.620,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
637	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	75 Unit	50.000.000,00	35.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
638	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	35.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif	1	1			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
639	Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	1 Laporan	49.751.665,00	49.751.665,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
640	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.173.216.000,00	1.173.216.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	1	1			
641	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	7.992.360,00	5.268.480,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
642	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	67.993.120,00	47.184.560,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	1	1			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang di berdayakan	3 Laporan	3 Laporan			
643	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	43.476.150,00	22.083.380,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan	1	1			
644	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	36.046.760,00	33.546.760,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
646	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	799.627.510,00	799.614.390,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
647	Evaluasi Kelurahan						
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	43.446.050,00	23.102.965,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kelembagaan kemasyarakatan yang diberdayakan	6 Dokumen	6 Dokumen			
648	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	5 Laporan	9.172.690,00	5.737.590,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
649	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	26.703.330,00	16.528.020,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-			
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-			
650	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan	5 Laporan	32.539.900,00	15.717.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1	1			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen			
651	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	60 Orang	60 Orang	14.899.400,00	7.922.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
652	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen	18.438.800,00	10.192.050,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	1			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan diawasi	5 Dokumen	5 Dokumen			
653	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	7.650.000,00	7.650.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. NUNUKAN SELATAN						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen			
654	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	6 Dokumen	6 Dokumen	9.680.835,00	5.342.980,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
655	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	8 Laporan	8 Laporan	6.110.940,00	3.652.880,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5 Unit	5 Unit			
656	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.068.465.906,00	6.068.465.906,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5 Unit	5 Unit			
657	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	14.978.540,00	14.978.540,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
658	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	80.170.000,00	80.170.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
659	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37 Paket	37 Paket	158.645.910,00	105.305.480,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
660	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan	51.826.000,00	25.853.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	5 Unit	5 Unit			
661	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	31.960.930,00	31.960.930,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan jasa penunjang urusan	5 Unit	5 Unit			
662	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	173.742.000,00	173.742.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
663	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.351.698.912,00	1.351.018.912,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5 Unit	5 Unit			
664	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	20 Unit	20 Unit	64.043.140,00	48.819.160,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
665	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	25.140.000,00	17.540.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
666	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	149.952.000,00	112.464.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	1	1			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1			
667	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	28.460.095,00	28.460.095,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase cakupan terlaksananya Urusan Pemerintahan dilimpahkan kepada Camat	1	1			
668	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	55.399.110,00	35.179.295,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	1	1			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase cakupan masyarakat kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	1	1			
669	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	28.364.235,00	28.364.235,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
670	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	458.161.000,00	458.161.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendaan Kelurahan
671	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	270.957.610,00	270.957.610,00	DAU Tambahan Dukungan Pendaan Kelurahan
672	Evaluasi Kelurahan						
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	47.525.105,00	23.023.665,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan	1	1			
673	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat						
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	12 Lembaga Masyarakat	12 Lembaga Masyarakat	808.359.190,00	762.622.670,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
674	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	27.907.570,00	11.052.530,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
675	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	51.970.000,00	2.420.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
676	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	65.020.245,00	41.764.955,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase cakupan wilayah yang terkoordinasikan penyelenggaraan	1	1			
677	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	47.731.520,00	26.764.375,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terselenggarakan	1	1			
678	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	40 Orang	40 Orang	22.949.415,00	13.044.325,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
679	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	58.553.800,00	38.435.555,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. SEBATIK						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah berkualitas yang disusun	14 dokumen	14 dokumen			
680	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4 Dokumen	4 Dokumen	25.449.330,00	13.077.860,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
681	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	10 Laporan	10 Laporan	22.466.940,00	9.443.990,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
682	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	30.151.900,00	15.481.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan administrasi keuangan	5 unit	5 unit			
683	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.283.427.247,00	2.231.935.819,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
684	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	41.125.400,00	31.017.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	5 unit	5 unit			
685	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.329.140,00	2.329.140,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
686	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	155.652.120,00	26.617.290,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
687	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.346.720,00	12.771.640,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
688	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.887.600,00	4.887.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
689	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	160 Laporan	206.332.000,00	94.508.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah BMD yang disediakan	24 unit	24 unit			
690	Pengadaan Mebel						
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	45.328.620,00	17.719.080,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
691	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	71.423.240,00	48.720.160,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5 unit	5 unit			
692	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	58.942.000,00	58.942.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
693	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	3.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
694	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	323.958.048,00	330.758.048,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pelayanan BMD	6 unit	6 unit			
695	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5 Unit	5 Unit	33.961.480,00	23.185.760,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
696	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	4.560.000,00	3.040.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
697	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	134.572.560,00	133.500.060,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	98 Persen	98 Persen			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1			
698	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	2 Laporan	2 Laporan	9.933.790,00	3.595.510,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
699	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	11.392.400,00	4.722.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1	1			
700	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	9.295.300,00	4.206.100,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
701	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	2 Laporan	2 Laporan	9.998.920,00	5.994.530,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1	1			
702	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	9.258.560,00	4.511.160,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
703	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5 Laporan	5 Laporan	9.973.620,00	5.011.160,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
704	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	12.348.880,00	5.722.360,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	0.98	0.98			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	0.98	0.98			
705	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	22.700.390,00	22.700.390,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 laporan	12 laporan			
706	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
		Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	14.101.410,00	7.040.080,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan	0.98	0.98			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1	1			
707	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	27.962.060,00	16.206.040,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	1	1			
708	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	2 Laporan	9.910.000,00	2.450.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1	1			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	1	1			
709	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.047.900,00	5.132.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	98 Persen	98 Persen			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi, mendapat rekomendasi dan terawasi pemerintahan Desa	1	1			
710	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	4 Dokumen	4 Dokumen	15.760.670,00	8.265.630,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
711	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	14.744.380,00	7.440.080,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
712	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	4 Laporan	11.978.950,00	5.270.840,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. SEBATIK BARAT						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah berkualitas	9 Dokumen	9 Dokumen			
713	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	3 Dokumen	3 Dokumen	2.690.920,00	2.690.920,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
714	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Laporan	4 Laporan	2.498.660,00	2.498.660,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
715	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1.800.500,00	1.800.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5 Unit	5 Unit			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
716	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.599.934.592,60	2.451.137.799,60	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5 Unit	5 Unit			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-			
718	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	53.475.000,00	53.475.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	5 Unit	5 Unit			
719	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.984.000,00	5.984.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
720	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	111.610.000,00	79.410.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
721	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	52.823.570,00	49.832.230,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
722	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.690.770,00	5.242.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
723	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laoran	100 Laoran	211.234.000,00	98.896.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	16 Unit	16 Unit			
724	Pengadaan Mebel						
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	33.300.000,00	33.300.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
725	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	92.940.000,00	92.940.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
726	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5 unit	5 unit			
727	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	94.167.200,00	94.167.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
728	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
729	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	350.540.400,00	350.540.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5 Unit	5 Unit			
730	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	6 Unit	6 Unit	67.640.000,00	58.180.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
731	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	6.260.000,00	6.260.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 Persen	100 Persen			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1	1			
732	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	1 Laporan	13.801.210,00	13.801.210,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	1	1			
733	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	3.468.770,00	3.105.770,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1	1			
734	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	9.644.678,00	9.644.678,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
735	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	14.513.860,00	10.756.060,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	1	1			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan	1	1			
736	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	7.088.860,00	4.318.860,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
737	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						
		Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	16.999.640,00	12.685.890,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1	1			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	1	1			
738	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	9.855.772,00	7.553.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	1	1			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum	1	1			
739	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 rang	30 rang	121.534.500,00	102.281.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	1			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	1			
740	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	7.073.140,00	5.571.420,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
741	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penguasaan Aset Desa						
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Penguasaan Aset	1 Dokumen	1 Dokumen	6.395.090,00	6.395.090,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
743	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	17.927.480,00	13.086.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. SEBATIK TIMUR						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang	14 Dokumen	14 Dokumen			
744	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	15.441.300,00	6.899.560,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
745	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12 Laporan	12 Laporan	22.973.580,00	9.836.240,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan			
746	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	2.132.176.793,00	1.878.072.873,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Umum	150 Paket	150 Paket			
747	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.127.840,00	2.127.840,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
748	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	200.813.120,00	200.813.120,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
749	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	51.973.060,00	47.799.050,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
750	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.721.830,00	7.784.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
751	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106 Laporan	106 Laporan	157.250.000,00	99.760.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja internal yang mendapatkan layanan Penyediaan jasa	24 Laporan	24 Laporan			
752	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	73.126.000,00	69.390.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
753	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	440.045.216,00	440.045.216,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			
754	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5 Unit	5 Unit	93.515.340,00	65.878.070,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
755	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	14.100.000,00	9.920.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
756	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	121.800.000,00	1.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 Persen	100 Persen			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat	49 Kegiatan	49 Kegiatan			
757	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	21.267.480,00	11.169.830,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
758	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48 Dokumen	48 Dokumen	17.580.570,00	9.587.520,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan yang dilimpahkan	32 Dokumen	32 Dokumen			
759	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	20 Laporan	27.260.600,00	9.265.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
760	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	35.237.080,00	12.874.270,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan yang dilimpahkan	15 Dokumen	15 Dokumen			
761	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	13 Dokumen	13 Dokumen	9.715.150,00	4.177.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
762	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	18.576.000,00	10.091.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	1	1			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang diberdayakan	4 Desa	4 Desa			
763	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	16.031.240,00	11.474.270,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	1	1			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-			
764	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	26.756.280,00	10.127.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1	1			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan fasilitas Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan			
765	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	24 Dokumen	3.740.000,00	3.740.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	1			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan Desa dan Kelurahan yang dibangun dan diawasi	4 Desa	4 Desa			
767	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	30.604.100,00	11.703.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. SEBATIK UTARA						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	1	1			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	1			
768	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	5 Dokumen	9.537.580,00	4.480.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
769	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	10 Laporan	10 Laporan	9.022.180,00	3.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan/Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN persentase terlaksananya kegiatan	14Bulan 100 %	14Bulan 100 %			
770	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	223 Orang / bulan	223 Orang / bulan	2.118.413.296,00	2.073.966.720,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	5 Unit 100 %	5 Unit 100 %			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	1	1			
772	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.591.600,00	2.591.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
773	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	89.000.000,00	89.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
774	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	64.211.250,00	50.771.430,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
775	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.026.470,00	4.023.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
776	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135 Laporan	135 Laporan	131.951.000,00	66.486.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penambahan barang milik daerah penunjang urusan	1	1			
777	Pengadaan Mebel						
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
778	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	179.170.000,00	179.170.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1			
779	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	55.422.000,00	55.422.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
780	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	321.460.752,00	321.460.752,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1			
781	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5 Unit	5 Unit	40.208.000,00	33.375.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
782	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit	8.000.000,00	5.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
783	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien	1	1			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat desa	1	1			
784	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	11.760.000,00	5.730.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
785	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.400.000,00	1.530.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan 100 %	1 Laporan 100 %			
786	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	4.397.090,00	2.183.590,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1	1			
787	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.100.000,00	2.040.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
788	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	19.310.190,00	10.360.290,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat pemberdayaan masyarakat	1	1			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	1			
789	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	20.272.220,00	16.892.220,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
790	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	3.400.000,00	1.530.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan	1	1			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Polri, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan			
791	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	10.920.000,00	5.192.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan			
792	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	13.673.010,00	6.977.180,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	1			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	3 Dokumen	3 Dokumen			
793	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	4.852.000,00	2.377.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
794	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	3 Dokumen	3 Dokumen	11.515.160,00	4.657.180,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
796	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan	3 Laporan	4.720.000,00	2.430.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1797	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	4.890.000,00	2.130.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. SEBATIK TENGAH						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas yang disusun	1 Laporan	1 Laporan			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			
1798	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Dokumen	1 Dokumen	8.640.000,00	4.320.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1799	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	32.631.440,00	26.230.960,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	10 Orang			
1800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.952.281.256,00	1.734.443.793,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	1 Paket	1 Paket			
1801	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	178.328.000,00	131.228.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1802	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	53.144.720,00	34.807.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1803	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.693.720,00	3.971.220,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1804	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	4.276.140,00	2.855.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
1805	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan	139.540.000,00	65.144.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan Barang	1 Unit	1 Unit			
1806	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	155.000.000,00	155.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
807	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	4 Unit	4 Unit	244.000.000,00	244.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			
808	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3 Laporan	3 Laporan	37.020.000,00	37.020.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
809	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	2.750.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
810	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	294.179.248,00	294.179.248,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	undefi ned Unit	undefi ned Unit			
811	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	77.040.640,00	61.449.220,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEN YELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	1 Laporan			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Musrembang	1 Laporan	1 Laporan			
812	Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	1 Laporan	33.240.010,00	26.110.010,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-			
813	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	12.810.000,00	6.590.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan			
814	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	8.207.590,00	4.240.390,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
815	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	15.042.440,00	7.582.920,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang proporsional	1 Laporan	1 Laporan			
816	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	6.690.000,00	3.340.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	1 Laporan	1 Laporan			
817	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	13.498.680,00	6.961.090,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen			
818	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	50 Orang	50 Orang	109.166.480,00	94.867.640,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
819	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	19.449.160,00	10.836.980,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Dokumen	1 Dokumen			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang proporsional	1 Dokumen	1 Dokumen			
820	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	6.642.800,00	5.336.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
821	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	19.832.720,00	8.957.860,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
822	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	1 Dokumen	1 Dokumen	6.249.860,00	5.309.860,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
823	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	20.026.120,00	5.561.060,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
824	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	5.886.060,00	3.825.060,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. SEI MENGGARIS						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	1	1			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang	8 Dokumen	8 Dokumen			
825	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	15.688.300,00	7.844.150,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
826	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Laporan	6 Laporan	9.218.300,00	6.204.150,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
827	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	4.948.300,00	2.454.150,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja			
828	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.917.496.749,00	1.978.556.919,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
829	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	60.447.800,00	30.170.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja			
830	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.371.600,00	2.371.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
831	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	164.436.400,00	144.436.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
832	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	18.831.180,00	13.563.170,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
833	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.266.050,00	4.358.420,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
834	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	146.100.000,00	73.198.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja			
835	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3 Laporan	3 Laporan	43.800.000,00	43.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
836	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	340.297.920,00	325.897.920,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja			
837	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	7 Unit	7 Unit	69.241.260,00	54.759.660,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
838	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	16.788.440,00	12.241.940,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
839	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	268.989.000,00	268.989.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	1	1			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Usulan	100 Usulan			
840	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	2 Laporan	2 Laporan	30.233.340,00	14.716.740,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Laporan	4 Laporan			
842	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	39.658.380,00	24.298.380,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	1	1			
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan			
843	Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	122.357.790,00	89.616.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	1			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	4 desa	4 desa			
844	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	4 Laporan	15.728.300,00	7.878.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. SEBUKU						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,dan evaluasi kinerja yang berkualitas Perangkat Daerah Yang Berkualitas	12 Dokumen	12 Dokumen			
845	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Dokumen	1 Dokumen	14.736.300,00	4.780.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
846	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	47.802.600,00	23.900.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	6 unit	6 unit			
847	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.197.703.543,00	3.070.152.735,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
848	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	33.460.000,00	16.730.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
849	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	9.560.000,00	4.780.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	6 unit	6 unit			
850	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
851	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	206.448.000,00	190.828.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
852	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	31.537.220,00	20.691.550,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
853	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4.131.600,00	2.065.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
854	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	182.075.000,00	91.007.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	6 unit	6 unit			
855	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
856	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	218.206.752,00	206.206.752,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	2 unit	2 unit			
857	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	2 Unit	2 Unit	20.885.000,00	16.185.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PEN YELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	1	1			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan			
858	Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	1 Laporan	28.777.410,00	17.954.630,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah urusan yang dilimpahkan	3 kegiatan	3 kegiatan			
859	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	27.077.410,00	14.102.630,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	30 dokumen	30 dokumen			
860	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	22.297.410,00	11.542.630,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	1	1			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang diberdayakan	10 desa	10 desa			
861	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	32.824.820,00	17.744.260,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang diberdayakan	10 desa	10 desa			
862	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	24.687.410,00	14.102.630,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian K3 Ketertiban,Ketent raman Keindahan	1	1			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-			
863	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	33.964.630,00	18.117.130,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEN YELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1	1			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	10 kegiatan	10 kegiatan			
864	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	330 Orang	330 Orang	84.898.300,00	68.663.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
865	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	26.562.410,00	15.535.630,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	1	1			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi Jumlah Pemerintahan desa dan kelurahan yang dibina dan	10 Desa 10 desa	10 Desa 10 desa			
866	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	22.569.910,00	9.111.130,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. TULIN ONSOI						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja internal yang dilayani oleh OPD kecamatan Tulin Onsoi	1	1			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas perangkat daerah yang berkualitas	2 dokumen	2 dokumen			
867	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4 Dokumen	4 Dokumen	18.790.380,00	10.047.080,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
868	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	87.146.000,00	43.552.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	1 Unit	1 Unit			
869	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.831.508.301,00	2.008.157.284,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5 Unit	5 Unit			
870	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.936.820,00	15.643.380,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
871	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.905.000,00	3.905.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
872	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	141.336.000,00	71.320.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	4 unit	4 unit			
873	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	33.648.300,00	33.648.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
874	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	280.479.540,00	252.859.540,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
875	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	309.505.248,00	297.505.248,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	6 unit	6 unit			
876	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	6 Unit	6 Unit	70.032.060,00	51.269.390,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
879	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
880	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	1 Laporan	36.776.476,00	19.909.238,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-			
881	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	42.643.856,00	22.800.238,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
882	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	22.502.238,00	12.591.702,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	1	1			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang di berdayakan	12 Desa	12 Desa			
883	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	8.458.238,00	4.871.702,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang dilaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	12 Desa	12 Desa			
884	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	32.139.904,00	17.628.238,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan	1	1			
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-			
885	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	130.783.608,00	94.472.612,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1	1			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitas Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
886	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	2.550.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	1			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa Yang Di Bina dan Di Awasi	12 Desa	12 Desa			
887	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	29.056.702,00	17.786.202,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. SEMBAKUNG						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	6 Dokumen	6 Dokumen			
888	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	27.000.000,00	13.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
889	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Laporan	4 Laporan	35.700.000,00	21.420.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
890	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	10.960.000,00	10.960.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
891	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	23 Orang Orang/bulan	23 Orang Orang/bulan	3.238.557.585,00	3.287.550.507,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
892	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	32.880.000,00	10.960.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
893	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	4 Laporan	4 Laporan	10.960.000,00	5.480.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	100 Persen	100 Persen			
894	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
895	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	281.643.100,00	140.249.010,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
896	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	38.291.220,00	29.971.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
897	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	150.350.000,00	99.736.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	100 Persen	100 Persen			
898	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	24.240.000,00	24.240.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
899	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	255.071.808,00	228.119.808,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan Pemeliharaan	100 Persen	100 Persen			
900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5 Unit	5 Unit	44.603.000,00	40.571.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 Persen	100 Persen			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan undefined	100 Persen undefined nedun defined	100 Persen undefined nedun defined			
901	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	2 Laporan	2 Laporan	33.099.180,00	28.339.180,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
902	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.140.000,00	9.360.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 Persen	100 Persen			
903	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 Dokumen	5 Dokumen	15.550.000,00	8.540.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
904	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	26.890.000,00	15.040.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	1	1			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang diberdayakan	2 Desa	2 Desa			
905	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	24.940.000,00	8.540.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan	1	1			
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan	2 Desa	2 Desa			
906	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	32.652.000,00	11.718.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1	1			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	10 Desa	10 Desa			
907	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	300 Orang	300 Orang	174.536.040,00	155.253.010,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
908	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	7.260.000,00	7.260.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	1			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pemerintahan Desa yang di berikan fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 Persen	100 Persen			
909	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	27.320.000,00	16.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
910	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	2 Dokumen	2 Dokumen	19.500.000,00	8.540.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
911	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	4 Laporan	26.864.000,00	15.328.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. SEMBAKUNG ATULAI						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-	-			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-			
912	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	3 Dokumen	3 Dokumen	56.399.780,00	27.475.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
913	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Laporan	3 Laporan	18.221.300,00	8.870.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-			
914	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	17/14 Orang/ bulan	17/14 Orang/ bulan	2.654.978.405,00	1.937.472.847,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-			
915	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	29.413.600,00	29.413.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-			
916	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	266.511.970,00	250.781.970,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
917	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	12 Paket	12 Paket	222.598.555,00	222.598.555,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
918	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	161.996.840,00	124.293.970,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
919	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.997.670,00	19.997.670,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
920	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	179.464.000,00	89.874.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			
921	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
922	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	368.594.976,00	249.494.976,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			
923	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	4 Unit	4 Unit	45.096.000,00	28.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
924	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	7.000.000,00	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-			
925	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	3 Laporan	3 Laporan	29.777.760,00	14.850.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-			
926	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	3 Dokumen	3 Dokumen	36.672.160,00	18.902.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
927	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	3 Laporan	3 Laporan	54.898.080,00	26.749.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-			
928	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	16.600.000,00	8.610.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
929	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	31.160.000,00	15.850.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-			
930	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	14.977.360,00	7.679.060,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-			
931	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	4.507.770,00	1.530.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-			
932	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	450 Orang	450 Orang	119.533.000,00	109.988.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-			
933	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	29.999.060,00	13.540.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
934	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	5 Dokumen	5 Dokumen	21.862.770,00	10.700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. LUMBIS						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kerja Yang	12 Dokumen	12 Dokumen			
935	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4 Dokumen	4 Dokumen	12.180.000,00	9.760.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
936	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Laporan	4 Laporan	8.377.680,00	4.980.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
937	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	4.977.760,00	2.490.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Keuangan Perangkat Daerah Yang tersusun tepat Waktu	12 Bulan	12 Bulan			
938	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 ORANG /14 BULAN Orang/bulan	35 ORANG /14 BULAN Orang/bulan	4.400.133.984,00	4.368.050.078,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
939	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulana n/Triwulanan/Sem esteran	12 Laporan	12 Laporan	25.408.080,00	21.720.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	2 Dokumen			
940	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.585.000,00	4.980.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum	5 Unit	5 Unit			
941	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.564.900,00	5.564.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
942	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	234.120.000,00	234.120.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
943	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.410.300,00	25.862.895,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
944	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.999.850,00	6.999.850,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
945	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	145.342.000,00	125.332.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan BMD	12 Bulan/unit	12 Bulan/unit			
947	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1 Laporan	1 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
948	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
949	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	319.800.000,00	389.280.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit			
950	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit	1 Unit	26.588.000,00	20.696.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
951	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	118.560.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
952	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	5.500.000,00	1.650.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
953	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-			
954	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	1 Laporan	188.928.380,00	188.928.380,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
955	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.800.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-			
956	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	6.970.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-			
957	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	95.200.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEN YELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-			
958	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	50 Orang	50 Orang	7.086.970,00	6.655.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
959	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.860.000,00	5.952.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	1			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	28 Desa	28 Desa			
960	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
961	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	7.320.500,00	7.320.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
962	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	1 Dokumen	1 Dokumen	7.950.910,00	6.655.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
963	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	5.235.000,00	5.235.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
964	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	1.700.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. LUMBIS OGONG						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-			
965	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	3.237.320.648,00	2.212.937.294,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
966	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	118.800.000,00	59.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	1	1			
967	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	174.980.000,00	112.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
968	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	26.732.190,00	15.408.760,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
969	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	792.000,00	792.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
970	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	156.742.000,00	78.686.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	1	1			
971	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	2.800.000,00	2.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
972	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	377.400.000,00	357.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	4 UNIT	4 UNIT			
973	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	6 unit Unit	6 unit Unit	126.798.740,00	88.754.010,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 Persen	100 Persen			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 KEGIATAN	10 KEGIATAN			
974	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	161.388.820,00	153.196.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	1	1			
975	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	44.200.000,00	22.100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-			
976	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26 Lembaga Kemasyarakatan	26 Lembaga Kemasyarakatan	23.183.560,00	23.183.560,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	1			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	10 DESA	10 DESA			
977	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	26 Laporan Laporan	26 Laporan Laporan	19.720.000,00	9.860.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. KRAYAN						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang	10 Dokumen	10 Dokumen			
978	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	12 Dokumen	12 Dokumen	5.063.850,00	3.000.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
979	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	13.475.300,00	9.102.650,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Internal yang mendapatkan layanan Administrasi	7 Unit	7 Unit			
980	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.883.258.664,40	2.883.258.664,40	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Umum	7 Unit	7 Unit			
981	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	87.731.750,00	49.748.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
982	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.226.278,00	36.362.798,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
983	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.318.750,00	4.916.230,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
984	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	16.017.980,00	11.952.380,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
985	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73 Laporan	73 Laporan	312.724.000,00	107.560.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pengadaan BMD	7 Unit	7 Unit			
986	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	49.950.000,00	28.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
987	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	14.000.000,00	7.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
988	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1 Unit	105.000.000,00	52.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Penyediaan Jasa Penunjang	7 Unit	7 Unit			
989	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
990	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	414.043.216,00	414.043.216,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	4 Unit	4 Unit			
991	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5 Unit	5 Unit	44.979.750,00	28.540.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
992	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	34.500.000,00	25.875.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif	1	1			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kali	2 Kali			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
993	Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	1 Laporan	24.958.500,00	24.958.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
994	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.423.820,00	6.246.622,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	5 Urusan	5 Urusan			
995	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	30.101.100,00	17.979.920,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
996	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	10.338.700,00	9.646.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	1			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	27 Laporan	27 Laporan			
997	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23 Lembaga Kemasyarakatan	23 Lembaga Kemasyarakatan	7.535.000,00	4.327.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan	1	1			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	1	1			
998	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	20.873.700,00	19.367.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
999	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	9.970.400,00	5.953.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEN YELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1	1			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	1	1			
2000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	24 Orang	24 Orang	110.549.500,00	103.468.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2001	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	10.662.400,00	6.311.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	1			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	23 Dokumen	23 Dokumen			
2002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	8.840.000,00	8.840.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	9.144.300,00	5.470.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2004	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	120 Laporan	120 Laporan	20.450.750,00	20.226.450,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. KRAYAN SELATAN						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	1	1			
2005	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	5 Dokumen	9.992.134,00	2.499.354,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 Laporan	5 Laporan	6.971.610,00	5.118.165,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	1	1			
2007	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.909.885.873,08	2.909.885.873,08	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internak yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum	1	1			
2008	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	151.550.000,00	50.550.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2009	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	24.998.959,00	21.126.348,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2010	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.999.660,00	4.070.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2011	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	208.002.000,00	146.193.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-			
2012	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	36.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2013	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	111.900.000,00	55.950.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2014	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1 Unit	149.997.500,00	73.574.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	1	1			
2015	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	429.492.528,00	427.092.528,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	1	1			
2016	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	5 Unit	5 Unit	75.960.000,00	72.072.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 Persen	100 Persen			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1			
2017	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	1 Laporan	49.964.850,00	26.055.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-			
2018	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	9.860.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2019	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	50.257.700,00	7.315.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-			
2020	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	22.252.400,00	6.314.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-			
2021	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	100 Orang	100 Orang	32.595.400,00	15.798.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2022	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.998.650,00	4.858.100,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	1			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
2023	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	21.567.500,00	9.972.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2024	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	15.300.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. KRAYAN BARAT						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase unit kerja internal yang dilayani oleh OPD kecamatan Krayan Barat Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas Perangkat Daerah Yang Berkualitas	1	1			
2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	2.722.275,00	2.722.275,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2026	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	9.983.025,00	9.983.025,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	1	1			
2027	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.481.185.164,00	2.481.185.164,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-			
2028	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	660.000,00	660.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2029	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	133.458.398,00	84.003.580,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2030	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	39.987.197,00	23.194.599,50	Dana Bagi Hasil (DBH)
2031	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.995.260,00	9.995.260,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2032	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	149.982.000,00	63.248.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	1	1			
2033	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2034	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	16 Laporan	342.617.920,00	342.617.920,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	13 Unit	13 Unit			
2035	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	2 Unit	2 Unit	114.534.000,00	108.666.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2036	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	9.780.000,00	6.750.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2037	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	226.883.667,00	170.441.721,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	10 Persen	10 Persen			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1			
2038	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	25 Laporan	25 Laporan	24.987.880,00	24.987.880,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	1	1			
2039	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	9.937.053,00	7.845.369,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2040	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	44.085.227,00	24.897.227,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	1	1			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4 Kali	4 Kali			
2041	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga Kemasyarakata n	25 Lembaga Kemasyarakata n	14.957.375,00	14.617.375,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-			
2042	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	25 Lembaga Kemasyarakata n	25 Lembaga Kemasyarakata n	59.911.965,00	35.084.246,84	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan	1	1			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	1	1			
2043	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	24.991.070,00	7.312.870,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEN YELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1	1			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	1	1			
2044	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	200 Orang	200 Orang	91.546.969,50	86.523.886,50	Dana Bagi Hasil (DBH)
2045	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	19.964.612,00	11.987.395,50	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	1			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1	1			
2046	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25 Dokumen	25 Dokumen	24.972.710,00	24.052.710,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2047	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	25 Laporan	25 Laporan	49.994.234,00	22.336.372,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. KRAYAN TIMUR						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tat kelola administrasi perencanaan dan keuangan perangkat daerah Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berk ualitasPerangkat Daerah Yang Berkualitas	1	1			
2048	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	5.468.300,00	2.734.960,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2049	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Laporan	4 Laporan	6.897.200,00	4.620.090,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	1	1			
2050	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	12/12 Orang/bulan	12/12 Orang/bulan	2.130.378.284,00	2.130.378.284,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	1	1			
2051	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	167.980.000,00	83.990.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2052	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21.351.250,00	12.533.350,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2053	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.753.140,00	5.246.560,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2054	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	254.198.000,00	122.209.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	1	1			
2055	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	193.648.224,00	168.268.224,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	1	1			
2056	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit	1 Unit	77.661.600,00	71.661.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2057	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif	1	1			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1			
2058	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	17 Laporan	17 Laporan	22.233.380,00	22.233.380,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	1	1			
2059	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	4.882.340,00	2.403.410,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2060	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	13.761.500,00	6.558.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	1	1			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	1			
2061	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32 Lembaga Masyarakat	32 Lembaga Masyarakat	2.166.050,00	1.300.150,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2062	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	17 Dokumen	17 Dokumen	2.166.050,00	1.300.150,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan	1	1			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	1	1			
2063	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	20.655.000,00	10.558.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana dengan Tepat	1	1			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1	1			
2064	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	200 Orang	200 Orang	130.047.370,00	69.880.320,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2065	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.971.980,00	2.443.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	1	1			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	1			
2066	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Dokumen	17 Dokumen	9.860.000,00	4.930.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2067	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	17 Laporan	17 Laporan	9.860.000,00	4.930.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. KRAYAN TENGAH						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	1	1			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berk ualitasPerangkat Daerah Yang Berkualitas	7 Dokumen	7 Dokumen			
2068	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12 Laporan	12 Laporan	8.085.825,00	8.085.825,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	1	1			
2069	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.003.408.781,00	2.003.408.781,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	1	1			
2070	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	18.766.770,00	18.766.770,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2071	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	311.801.124,00	155.684.124,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2072	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	31.514.563,00	18.837.730,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2073	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	4.222.706,00	4.222.706,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2074	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	250.350.000,00	103.565.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-			
2075	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	49.950.000,00	49.950.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	1	1			
2076	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	345.323.856,00	247.913.856,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5 unit	5 unit			
2077	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	2 Unit	2 Unit	21.223.800,00	14.823.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2078	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	40.193.378,00	28.129.898,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2079	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	33.300.000,00	24.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Jumlah	2 Jumlah			
2080	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	1 Laporan	25.851.900,00	25.851.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2081	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.073.110,00	5.762.758,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-			
2082	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11 Laporan	11 Laporan	13.950.000,00	6.700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-			
2083	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	168.405.949,00	141.832.391,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan	100 % 100 Laporan	100 % 100 Laporan			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1	1			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
2085	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	250 Orang	250 Orang	109.186.241,60	98.794.841,60	Dana Bagi Hasil (DBH)
2086	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.118.914,00	6.858.601,20	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	1			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa Yang di berikan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11 Desa 100 %	11 Desa 100 %			
2087	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11 Laporan	11 Laporan	44.000.000,00	13.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. LUMBIS HULU						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	Persentase unit kerja internal yang dilayani oleh OPD kecamatan Lumbis Hulu	1	1			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen			
2088	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4 Dokumen	4 Dokumen	24.980.000,00	12.490.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	1	1			
2089	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.016.429.124,00	2.096.455.014,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	1	1			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
2090	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	29 Paket	61.226.600,00	37.672.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2091	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.846.150,00	3.846.150,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2092	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	180.168.000,00	90.084.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	1	1			
2093	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	26.000.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2094	Pengadaan Mebel						
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	23.400.000,00	10.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2095	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	65.604.000,00	15.840.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2096	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	205.608.000,00	166.868.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	1	1			
2097	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	2.139.500,00	1.705.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2098	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	413.989.920,00	398.989.920,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	2 Unit	2 Unit			
2099	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	3 Unit	3 Unit	99.200.000,00	70.040.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2100	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	9.962.260,00	6.095.760,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 Persen	100 Persen			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang diliimpahkan	1 urusan	1 urusan			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
2101	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.986.000,00	6.409.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	1	1			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan partisipasi masyarakat desa yang	1	1			
2102	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	49.856.876,00	27.450.425,60	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEN YELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-			
2103	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	107.826.750,00	89.310.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	1			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cangkupan pemerintah desa yang diberikan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	10 Desa	10 Desa			
2104	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	10 Laporan	24.977.450,00	12.227.950,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	KEC. LUMBIS PANSIANGAN						
	UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas Perangkat Daerah Yang Berkualitas	5 Dokumen	5 Dokumen			
2105	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	8 Dokumen	8 Dokumen	7,920,000.00	3,740,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2106	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.920.000,00	3,380,000.00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	32.300.000,00	16.150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	14 Bulan	14 Bulan			
2108	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	18/bulan Orang/bulan	18/bulan Orang/bulan	1.798.797.510,00	1.965.460.667,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2109	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulana n/Triwulanan/Sem esteran	14 Laporan	14 Laporan	45.220.000,00	20.160.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen			
2110	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi	4 Dokumen	4 Dokumen	11.520.000,00	5.760.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-			
2111	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	125.000.000,00	105.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2112	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	44.818.080,00	22.291.680,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2113	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	16.771.370,00	16.771.370,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2114	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	54 Laporan	211.020.000,00	105.304.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	12Bulan	12Bulan			
2115	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	12 Laporan	6.120.000,00	6.120.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2116	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	388.200.000,00	371.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	2 Unit	2 Unit			
2117	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit	1 Unit	95.984.000,00	67.186.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2118	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	2.460.000,00	1.230.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEN YELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 Persen	100 Persen			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	1 Dokumen	1 Dokumen			
2119	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	2 Dokumen	2 Dokumen	9.891.000,00	3.230.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2120	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	2 Laporan	2 Laporan	4.180.500,00	3.330.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	2 Dokumen	2 Dokumen			
2121	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	25.227.000,00	16.703.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	1	1			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang diberdayakan	13 Desa	13 Desa			
2122	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	5.046.900,00	4.908.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			
2123	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	13.739.500,00	4.504.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan	1	1			
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan	1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
2124	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Laporan	9 Laporan	129.557.110,00	88.119.610,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	1			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	13 Kali	13 Kali			
2126	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	37.480.500,00	23.550.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2127	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	3 Dokumen	3 Dokumen	4.950.700,00	3.949.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2128	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan	3 Laporan	6.903.000,00	5.078.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-			
2129	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	10.202.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2130	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 Laporan	5 Laporan	3.204.210,00	1.530.150,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-			
2131	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	6.538.839.372,40	3.171.091.722,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
2132	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.584.000,00	1.584.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2133	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	2 Paket	2 Paket	183.600.000,00	183.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2134	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	26.430.210,00	12.675.360,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2135	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	12.072.000,00	8.960.550,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2136	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	99.731.000,00	54.937.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			
2137	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2138	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3 Laporan	3 Laporan	78.942.000,00	78.942.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2139	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	171.699.200,00	171.699.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-			
2140	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	42.089.600,00	30.671.710,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2141	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	7.350.000,00	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Peserta Sosialisasi Pembauran Kebangsaan dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan	0,0006 7 Persen	0,0006 7 Persen			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-			
2142	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	1000 Orang	1000 Orang	164.608.060,00	109.657.410,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2143	Pembentukan Paskibraka						
		Jumlah Paskibraka	54 Orang	54 Orang	834.094.530,00	700.842.680,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Pendidikan Politik bagi pemilih pemula	0,34 Persen	0,34 Persen			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	-			
2144	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	200 Orang	1.395.222.040,00	1.194.937.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEM BERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KE MASYARAKATAN	Presentase Pelayanan Pendaftaran bagi Organisasi Kemasyarakatan (LSM, Yayasan, Perkumpulan)	100 Persen	100 Persen			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-			
2145	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	50 Orang	50 Orang	174.734.550,00	100.076.030,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase peran Masyarakat dalam terciptanya ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	0,89 Persen	0,89 Persen			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	-			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	PAGU SEBELUM (Rp)	PAGU SESUDAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
2146	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	50 Orang	50 Orang	389.137.405,00	315.872.525,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase Wawasan Nusantara untuk NKRI	71,43 Persen	71,43 Persen			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	-			
2147	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	149.737.610,00	75.726.220,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2148	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	30 Orang	314.317.500,00	199.038.630,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
2149	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	1.099.260.980,00	670.175.520,00	Dana Bagi Hasil (DBH)

6,493,394,831.90 5,751,172,817.00

BAB VI PENUTUP

P- RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang akan menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan menyempurnakan Perubahan Renja tahun 2025. Selanjutnya dokumen ini ditetapkan dengan Perkada setelah melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.

P-RKPD diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Disusum sejalan dengan arah Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Kalimantan Utara. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan secara nasional. Dengan demikian pencapaian hasil- hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan nasional.

Secara normatif, P-RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan KUPA dan P-PPAS Tahun 2025 yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Secara operasional, P-RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Perubahan-Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Secara faktual, P-RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 menjadi tolok ukur untuk menilai pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Pelaksanaannya, P-RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah yaitu :

1. Penyusunan RKPD beserta perubahannya berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam rangka upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dari APBN, maka setiap perangkat daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 beserta perubahannya dengan berpedoman pada P-RKPD ini;
3. Setiap kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi penyusunan kebijakan pada saat penyusunan Renja-PD Tahun 2025 beserta perubahannya dan pada saat menyusun Perubahan RKA/DPA OPD Tahun 2023, serta evaluasi hasil Renja-PD tahun 2025 setiap Triwulan pada tahun berkenaan;
4. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam P-RKPD tahun 2025 beserta perubahannya wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara dan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;

5. Bappeda-Litbang melakukan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2025 beserta perubahannya yaitu pada saat penyusunan Perubahan DPA OPD Tahun 2025 dan melakukan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dalam kurun waktu semester dan tahunan berdasarkan evaluasi hasil Renja-PD Tahun 2025; dan
6. Bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 beserta perubahannya dan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 beserta perubahannya sudah berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi sipd-ri.kemendagri.go.id dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Nunukan, 20 Juni 2025

Bupati

IRWAN SABRI